



Lembaga Budaya Pela dan Gandong di Maluku Latar Sejarah, Peranan dan Fungsinya



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN MEDIA KEBUDAYAAN



**Lembaga Budaya Pela dan Gandong
di Maluku
Latar Sejarah, Peranan dan Fungsinya**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN MEDIA KEBUDAYAAN
2000**

**Lembaga Budaya Pela dan Gandong
di Maluku
Latar Sejarah, Peranan dan Fungsinya**

HAK CIPTA

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan Nasional

PENANGGUNG JAWAB

Dr. I Gusti Ngurah Anom

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Dr. Abdurahman

Dra. Gamar Azayny Ohorella

DESAIN GRAFIS

Agus Hariyanto

Ahmad Safari

PENYUNTING

Lembaga Pendidikan Kemasyarakatan dan Budaya
Universitas Indonesia

PENERBIT

Proyek Pengembangan Media Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Departemen Pendidikan Nasional RI

2000

KATA PENGANTAR

Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta dalam tahun anggaran 2000, melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi budaya, antara lain menerbitkan Pustaka Wisata Budaya.

Penerbitan Pustaka Wisata Budaya ini dilaksanakan mengingat informasi tentang aneka ragam kebudayaan Indonesia sangat kurang. Dengan menampilkan informasi yang mudah dipahami, diharapkan dapat meningkatkan perhatian, minat dan apresiasi masyarakat terhadap obyek atau sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata budaya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan, penyusunan, penyelesaian, hingga buku ini dapat terbit. Sebagai sebuah terbitan Pustaka Wisata Budaya, buku ini tentu masih jauh dari sempurna. Kritik, perbaikan serta koreksi dari pembaca kami terima dengan tangan terbuka, demi kesempurnaan buku ini.

Mudah-mudahan dengan terbitnya Pustaka Wisata Budaya ini, dapat bermanfaat dalam meningkatkan budaya dan pengembangan wisata budaya.

Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan Nasional

Pemimpin,



PRA KATA

Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar di katulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Agar kebudayaan itu tidak punah seluruhnya tanpa bekas, diperlukan kearifan – kearifan untuk mencatatnya dan mensosialisasikan nilai – nilai positifnya kepada masyarakat terutama generasi baru, pendukung baru kebudayaan bangsa.

Pela dan Gandong di Maluku khususnya di Maluku Tengah dewasa ini nilai – nilainya sedang terancam oleh kerusakan yang melanda daerah tersebut, padahal para perusuh justru adalah para pendukung utama nilai – nilai yang berada di dalam institusi Pela dan Gandong itu.

Melalui proyek Media Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Bapak Dr IGN. Anom pada awal September 2000 menginstruksikan untuk menuliskan berbagai aspek yang terdapat dan termuat di dalam institusi tersebut. Dengan dasar itu penulis mencoba mengungkapkannya. Pada awalnya penulis menyangka akan mengungkapkannya dalam bentuk leaflet atau booklet saja, sehingga penulis memberanikan diri dan mentargetkan waktu sekitar dua atau tiga minggu. Namun ketika waktu kurang satu minggu lagi penulis diberitahu bahwa penulisan yang diminta adalah dalam bentuk naskah Pustaka Wisata Budaya, dengan jumlah halaman kurang lebih 150 sampai 200 halaman, maka dengan susah payah penulis berupaya untuk mencari bahan atau data kepustakaan yang dapat mendukung penulisan ini. Waktu pun ditambah kurang lebih lima minggu sampai naskah ini terselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2000.

Dengan kondisi seperti terurai ini tentunya penulisan ini kadar kualitasnya sangat tidak memadai sebagai suatu pertanggung jawaban dan penulisan yang ilmiah. Oleh sebab itu penulis berharap para pembaca, rekan dan sahabat dapat memberi kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan naskah ini.

Kepada semua pihak yang telah memberi dorongan terutama Bapak Dirjen Kebudayaan dan pimpinan Proyek Media Kebudayaan, penulis

menyampaikan terima kasih yang tulus, atas kesempatan yang telah diberikan.

Akhirnya semoga naskah ini bermanfaat bagi generasi pendukung lembaga budaya Pela ini dan dapat menambah chasanah budaya bangsa yang beraneka ragam ini.

Jakarta, akhir Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Prakata	v
Daftar Isi	vii
Daftar Foto	ix
Daftar Peta	xii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Pokok Bahasan dan Masalah	1
1.2. Tinjauan Pustaka	4
1.3. Latar Sejarah	6
1.4. Ruang Lingkup dan Tujuan	16
Bab II. Geografi dan Budaya Maluku	19
2.1. Wilayah dan Pemerintahan	19
2.1.1. Maluku Utara	19
2.1.2. Maluku Tengah	43
2.1.3. Maluku Tenggara	43
2.2. Nilai - Nilai Budaya	45
2.2.1. Pakaian	51
2.2.2. Senjata	57
2.2.3. Arsitektur	59
2.2.4. Kesenian	62
2.2.5. Upacara – Upacara Adat	64
Bab III. Pela dan Siwa Lima	73
3.1. Kehidupan Sosial Budaya	73
3.2. Sistim Kemasyarakatan Dan Religi	82

3.3.	Sistem Pemerintahan Adat Negeri-Negeri yang Berpela	91
3.4.	Pela, Gandong dan Siwa Lima	98
Bab IV.	Peranan dan Fungsi Pela	102
4.1.	Pengertian Pela Pada Orang Ambon	102
4.2.	Negeri-negeri yang Berpela	106
4.3.	Pela dan Gandong dalam kehidupan beragama	111
Bab V.	Pela Gandong dalam Kerangka Budaya Nasional Indone- sia	118
	Penutup	124
	Daftar Pustaka	130

DAFTAR FOTO

	Halaman
1. Monumen peringatan penaikan bendera 27 – Desember – 1949 di negeri Hitu Messing	8
2. Sisa – sisa kemakmuran daerah Maluku. Perkebunan kelapa di tepi pantai dan pohon – pohon cengkeh di perbukitan	11
3. Kedaton Ternate. Sekarang berfungsi sebagai museum seja- rah dan budaya Maluku Utara	22
4. Kedaton Tidore. Tangga menuju pelataran kedaton berjumlah 100 anak tangga	23
5. Kora – kora / Jungga dari kesultanan Ternate	24
6. Armada pelayaran Hongi	25
7. Mahkota kesultanan Ternate	26
8. Sultan Ternate, Iskandar Moch. Jabir Syah	26
9. Orang Togutil di Halmahera	27
10. Wanita dari suku Furu Aru, menyusui bayinya di <i>Tamoli</i>	28
11. Benteng Belgica di Banda Neira	31
12. Sepasang muda – mudi Ambon	33
13. Pemukiman orang Wemale didesa Kanikeh, pedalaman pulau Seram	34
14. Buah Pala	35
15. Fuli	36
16. Orang Banda dan musik Gong Sembilan	36
17. Benteng Duurstede di Saparua	37
18. Benteng Amsterdam di Hila	38
19. Lokasi Pelaksanaan acara ritual semacam kekehan di lereng gunung Sirimau negeri Soya	39
20. Perahu nelayan di pulau Kei sekarang	44

21. Kubah Masjid Jami' di kota Ambon	46
22. Gereja Maranatha di kota Ambon	47
23. Pura Hindu di gunung Nona, Pulau Ambon	47
24. Arca , dan patung leluhur	49
25. Gadis Ambon berkebaya putih pada acara resmi	52
26. Gadis Ambon dengan mengenakan kaos dan cenela	53
27. Dua wanita pedagang berbaju cele	54
28. Wanita muslim dalam suatu acara keluarga	55
29. Baju cele merah / kuning	56
30. Parang dan Salawaku	58
31. Monumen Pattimura di Ambon	58
32. Sebuah Baileo di Maluku Tengah	60
33. Masjid Wapauwe dan bangunan dalamnya	60
34. Masjid Hila	61
35. Gereja Hila beserta menara loncengnya	61
36. Tari Tnabar Tiwal dan Tari Angkosi	63
37. Tifa	63
38. Suling kulit bia, fiol/biola tradisional dan tifa sawat	64
39. Pengantin adat Maluku Utara beragama Islam	67
40. Pengantin adat Maluku Tengah beragama Kristen	68
41. Orang-orang yang berpesta di atas perahu	70
42. Atraksi Bambu Gila oleh para pemuda peserta upacara Sama- suru	72
43. Upacara adat	90
44. Para kewan yang dipimpin <i>Latu Kewano</i> dalam upacara mulai menutup sasi di Baileo negeri Nolot	93
45. Tanjung Pela di Buru Utara	109
46. Perahu Motor Amahusu yang mengunjungi negeri Laha	110

47. Pohon sagu	111
48. Arombai Manggurebe, lomba dayung perahu hias antara berbagai negeri di Ambon Lease	118
49. Perahu Semang, alat transportasi laut serta sebagai sarana per- ekonomian maritim	120
50. Perahu nelayan sekarang yang sudah menggunakan motor tempel	120
51. Anjungan Maluku di TMII yang merupakan terminal infor- masi dan adaptasi	122
52. Penenunan kain tradisional Tanimbar	123

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta Propinsi Maluku	18
2. Peta Kabupaten Maluku Utara atau Propinsi Maluku Utara	21
3. Peta Geografi Maluku Tengah	30
4. Peta Pulau Ambon	32
5. Peta Kepulauan Lease	35
6. Peta Seram Barat dan Ambon Lease	41

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Pokok Bahasan dan Masalah

Pela dan Gandong adalah suatu institusi atau lembaga budaya yang mencerminkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan. Lembaga budaya semacam ini bisa dikatakan terdapat di hampir seluruh daerah di kepulauan Maluku.

Institusi “Pela dan Gandong” memiliki makna dan fungsi yang sangat penting nilainya bagi tatanan masyarakat adat di Maluku. Bahkan hampir dapat dikatakan bahwa ia merupakan faktor pendukung yang sangat vital dan strategis dalam menggaling dan membangun kebersamaan masyarakat untuk mencapai suatu target tertentu

Ditinjau dari segi cultural, Maluku terbagi atas tiga sub cultur yaitu wilayah Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Di tiga wilayah tersebut institusi pela berkembang dengan pengaruh lingkungan masing-masing dan dengan nama yang berbeda. Di Maluku Tenggara dengan struktur sosial yang bertingkat-tingkat dikenal dengan istilah *Te-e-bel* di kepulauan Kei dan *Kida-bela* di kepulauan Tanimbar. Di Maluku Utara daerah yang terkenal dengan bentuk kesultanan tidak mengenal lembaga semacam ini. Namun pada beberapa dasa warsa terakhir istilah pela dikenal juga karena keberadaan anggota persekutuan pela dari Maluku Tengah yang berdomisili di sana. Akan tetapi yang berkembang adalah institusi *Mapeng* dan *Babari* di Halmahera Utara. Kedua pola budaya itu memiliki hakekat yang sama dengan budaya *masohi* di Maluku Tengah. Masohi adalah wujud implementasi dari hubungan persaudaraan dan kekerabatan dalam bentuk kerjasama dan saling membantu secara ikhlas.

Di Maluku Tengah-lah budaya pela dan gandong hidup dan terpelihara sejak beratus tahun silam yaitu di pulau Seram, Ambon dan Lease. Hubungan persahabatan dan persaudaraan ini dahulu sangat dijaga oleh para leluhur. Tenggang-rasa, keharmonisan, saling menyayangi dan tolong-menolong sangat diperhatikan, sehingga di masa penjajahan dahulu para leluhur penduduk Maluku hidup damai. Kalaupun akan menghadapi

kekejaman penjajah mereka mengangkat senjata bersama-sama. Penduduk di Maluku Tengah yang dikenal dengan orang Ambon adalah pendukung utama budaya pela tersebut.

Lebih dari itu, lembaga pela dan gandong merupakan fenomena kultural yang telah ada sejak dahulu kala, dan menjadi bagian integral dalam interaksi sosial masyarakat Maluku Tengah. Yang diinginkan melalui lembaga atau pranata pela dan gandong adalah adanya suatu suasana hidup berdampingan secara damai serta saling membantu di antara dua atau lebih negeri, walaupun negeri-negeri itu sendiri memiliki latar belakang nilai yang berbeda seperti nilai religius, nilai ekonomis, nilai estetis, nilai politis dan nilai sosial budaya. Hubungan-hubungan yang dibangun dan terbina dalam konteks budaya seperti itu selalu akan mengedepankan penghargaan akan hak dan kewajiban yang sama dalam interaksi sosial. Pela merupakan budaya yang telah berurat akar di Maluku Tengah, dengan kepelbagaian dimensi adat dan kebiasaan yang menjadi citra utama dari pola perilaku sosialnya. Tentu merupakan gambaran yang sangat ironis bahwa dalam masyarakat kita yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang harmonis, ternyata dijumpai bahwa hidup berdampingan secara damai dan toleransi tersebut terusik secara frontal oleh faktor-faktor eksternal yang perlu dikaji secara arif dan bijaksana. Kerusuhan Ambon yang begitu sangat menggores kalbu dan nurani setiap putera Maluku bahkan mengganggu kestabilan masyarakat dan pemerintah mendorong kita untuk bersikap lebih arif dan bijaksana. Terutama dalam memberikan penilaian terhadap lembaga pela dan gandong yang selama ini menjadi kebanggaan dan aset daerah yang begitu tinggi nilainya.

Sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama yang begitu harmonis dalam konteks budaya pela dan gandong ternyata selalu menjadi acuan pokok dalam paradigma kerukunan bagi masyarakat dan bangsa kita. Akankah semua itu menjadi sirna karena keterikatan dan keberpihakan kepada nilai-nilai baru yang turut mempengaruhi akar budaya kita? Sampai sejauh manakah keberpihakan dan pendalaman kepada budaya pela dan gandong mampu menempatkannya sebagai wahana ketahanan kultural yang memperkaya wawasan kebangsaan secara utuh dan menyeluruh? Dapatkah nilai-nilai agama memberikan kontribusinya secara terarah sehingga lebih

memperkokoh komitmen kita untuk melestarikan budaya *pela* dan *gandong* dan menempatkannya sebagai bagian asset nasional yang perlu dipertahankan? Itulah sejumlah pertanyaan mendasar sekaligus permasalahan yang perlu menjadi pertimbangan bersama guna melihat persoalan yang dihadapi secara proporsional.

Permasalahan-permasalahan ini dapat dipecahkan apabila dapat dipahami bahwa daerah Maluku, khususnya Maluku Tengah adalah wilayah yang pluralitas masyarakatnya bersifat multidimensional. Artinya, kita akan menjumpai keanekaragaman latar belakang budaya serta nilai yang turut mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakatnya. Keanekaragaman itu kita jumpai pada kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Atau antara desa (negeri) yang satu dengan desa (negeri) yang lainnya. Mencermati struktur masyarakat dari satu negeri dengan negeri lainnya, masing-masing memiliki kekhususan, misalnya negeri yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dengan negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, atau antara negeri-negeri yang berada di pulau Ambon dan Lease dengan negeri-negeri yang berada di pulau Seram.

Adanya keragaman yang dijumpai bukanlah merupakan indikasi bahwa tidak ditemukan adanya persamaan dalam lingkup kehidupan bersama. Sebagai contoh kebersamaan dalam membangun gereja yang dikerjakan secara bergotong-royong oleh negeri yang beragama Kristen dengan dibantu negeri yang beragama Islam atau sebaliknya, pada saat harus membangun mesjid dikerjakan pula secara bersama-sama antara mereka yang beragama Islam dengan bantuan mereka yang beragama Kristen. Masih banyak lagi contoh lainnya yang memperlihatkan dimensi kebersamaan ini, sebagai salah satu nilai tradisional yang paling menonjol. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan ialah mengapa hal itu bisa terjadi, padahal di tempat lain persoalan agama dan sosial budaya cenderung memicu peluang terjadinya perpecahan dan konflik sejak dahulu. Jawabannya adalah, masyarakat Maluku Tengah dan Maluku pada umumnya sampai beberapa waktu yang lalu, masih menghormati latar belakang historis yang dimiliki bersama, serta pengakuan tentang adanya prinsip-prinsip pokok dalam sistem kekerabatan yang diakui bersama, yang lebih populer dikenal sebagai institusi/pranata/lembaga *pela* dan *gandong*.

I.2. Tinjauan Pustaka

Sumber terpenting tentang pela dan gandong yang cukup akurat dan terpercaya adalah sumber-sumber primer dari para raja patih/ketua adat dan orang-orang tua penduduk negeri-negeri berpela. Selain itu penelitian ilmiah di lapangan yang telah dilakukan oleh para peneliti asing dan domestik memaparkan berbagai hal secara proporsional. Baik dari segi sejarah, sosiologis, antropologis, ekonomi maupun hukum adat.

Dalam tahun 1918, O.D. Tauerer telah menerbitkan hasil penelitiannya berjudul "Patasiwa and Patalima" di Leipzig. Ia memberi interpretasi tentang pata siwa dan pata lima yang diperbandingkan dengan uli siwa dan uli lima. Kedua istilah tersebut menurut Tauerer tidak memiliki perbedaan yang kental, namun pata siwa dan pata lima lebih terkenal di Seram dan Maluku Tengah, sedang uli siwa dan uli lima lebih dikenal di Maluku Utara. Patasiwa adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari sembilan Soa, sedang Patalima adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas lima Soa.

Sebagai inti dari pata siwa dan pata lima atau uli siwa dan uli lima ataupun kemudian lembaga pela adalah *Kakehan*. Tentang lembaga sosial ini Duyvendak dan Deacon A.B. menulisnya dalam dua versi. Deacon menulis tentang kelompok kakehan dan upacara inisiasi yang dilaksanakan di dalamnya, dengan judul *The Kakihan Society of Ceram and New Guinea Initiation Cults* diterbitkan tahun 1925. Sedang Duyvendak menulisnya dengan judul *Het Kakehan, Genootschap van Seran*. Kajian tentang kakehan juga dilakukan oleh van Ekris yang diterbitkan pada tahun 1986.

Sachse dan Stressemann yang masing-masing mengadakan penelitian terpisah, menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1922 (Sachse) dan 1927 (Stressemann). Kedua mereka banyak mengulas tentang pela baik di Seram maupun di Ambon. Tulisan kedua peneliti tersebut banyak dikutip oleh penulis-penulis kemudian.

Dieter Bartels yang menerbitkan tulisannya pada tahun 1977 membuat uraian yang panjang lebar tentang Eti, Tala dan Sapalewa di Nunusaku pulau Seram. Ia menyebutkan bahwa Nunusaku adalah suatu tempat yang tidak diketahui dengan jelas di pulau Seram namun diyakini keberadaannya

oleh penduduk pulau Seram sebagai asal muasal terbentuknya Pela; yaitu Kakehan. Kemudian tentang lembaga pela dan upacara ritual yang mengikat beberapa desa (negeri) dalam suatu aliansi (ikatan), terutama antara negeri-negeri Kristen dan negeri-negeri Islam. Penelitian Bartels yang dipaparkan dalam disertasinya di Cornell University itu menjadi acuan Prof. Leirissa dan juga Wim Manuhutu dalam menulis tentang Sejarah Kebudayaan Maluku. Wim Manuhutu menulis tentang kebudayaan orang Maluku yang ada di negeri Belanda.

Tentang pela di Maluku Tengah Bartels menulis sejalan dengan yang diyakini para raja pati, bahwa pela selalu menyangkut dua negeri, tetapi setiap negeri bisa mengadakan hubungan pela dengan sejumlah negeri lain sesuai kebutuhannya. Hubungan pela bisa dilakukan antara dua negeri yang berlainan agama atau antara negeri-negeri yang terletak di pulau-pulau yang berbeda. Untuk menunjukkan hubungan-hubungan pela itu Bartels membuat suatu kisi-kisi, semacam jaringan atau hubungan antara negeri-negeri yang berpela dalam suatu gambar (sistim hubungan). Sistem pela adalah institusi yang paling penting yang mengintegrasikan masyarakat Ambon di atas tahapan ikatan desa. Pela dianggap sebagai hubungan persaudaraan yang abadi. Leirissa mengutarakan bahwa sekalipun studi Bartels itu belum lengkap tetapi tulisannya mengenai pela di Maluku Tengah tersebut cukup menjelaskan lembaga yang mengatur integrasi masyarakat Maluku Tengah itu.

Sumber-sumber yang sering dikutip juga adalah Imam Rijali tentang Hikayat Tanah Hitu yang banyak diulas oleh Manusama dalam disertasinya di Leiden dan diterbitkan dalam tahun 1977.

Sejak tahun 1970, Leirissa telah banyak menulis tentang sejarah Maluku, baik itu sejarah sosial atau sejarah sosiologis maupun sejarah kebudayaan dan sejarah perekonomian. Sartono Kartodirdjo juga mengungkapkan segi-segi sosial dari masa sebelum Portugis sampai masa-masa awal dan pertengahan VOC. Dari sumber-sumber tersebut para penulis paling mutakhir telah menggunakan sebagai acuan dalam berbagai seminar dan sarasehan tentang pela dan gandong dan kebudayaan Maluku pada umumnya. Bahan-bahan pustaka tersebut penulis gunakan juga dalam penulisan Pustaka Wisata Budaya tentang Budaya Pela dan Gandong ini.

I.3. Latar Sejarah

Maluku merupakan salah satu propinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka. Daerah ini dinyatakan sebagai propinsi bersama tujuh daerah lainnya yaitu Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera serta Sulawesi. Hanya dua hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 19 Agustus 1945, kedelapan daerah itu dinyatakan sebagai propinsi. Namun secara resmi pembentukan Maluku sebagai propinsi daerah tingkat I RI baru terjadi 12 tahun kemudian, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1958.

Hal ini terjadi karena pada masa-masa awal kemerdekaan, Belanda masih terus berusaha untuk menguasai Maluku. Kondisi itu menyebabkan roda pemerintahan daerah tidak sempat berjalan. Karena itu setelah pembentukannya pada tanggal 19 Agustus 1945, terpaksa kedudukan pemerintah Propinsi Maluku di bawah pimpinan Gubernur Mr. J. Latuharhary tetap berada di Jakarta.

Pembentukan propinsi ini, sebagai manifestasi dari tekad untuk mempertahankan kemerdekaan, disambut oleh rakyat Maluku dengan semangat juang yang tinggi. Pada tahun 1946, para pejuang dan pemuda Maluku yang ada di pulau Jawa mengorganisasi suatu ekspedisi kembali ke Maluku untuk menegakkan dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Ekspedisi yang dikenal dengan nama "Ekspedisi Merah Putih" ini dipimpin oleh Bram Matulessy, seorang putra Maluku penganut Kristiani dan berdomisili di Jawa. Dengan diantar oleh dua kapal Angkatan Laut RI KM Sindoro dan KM Semeru yang masing-masing berada di bawah komando Letnan Ibrahim dan Letnan Mulyadi, rombongan ekspedisi mendarat di daerah Namlea, Pulau Buru. Dari sana mereka menggerakkan perlawanan rakyat dan mengibarkan Sang Merah Putih. Perlawanan di Pulau Buru dipimpin oleh Adam Pattisahusiwa seorang putra Maluku yang Muslim dan kawan-kawan.

Sementara itu di kota Ambon sendiri, berita tentang Proklamasi

Kemerdekaan RI disambut oleh tokoh-tokoh pergerakan dan pemuda dengan membentuk wadah-wadah perjuangan. E.U. Pupella bersama Ot Pattimapu mengorganisasi para pemuda ke dalam Partai Indonesia Merdeka (PIM); Tokoh PIM lainnya, Wim Reawaru, segera membentuk semacam laskar rakyat yang terdiri dari anggota-anggota PIM. Kemudian dia juga membentuk organisasi Persatuan Pemuda Indonesia (PPI). Di Maluku Tenggara (Tual), muncul tokoh pejuang seperti Mohammad Fogi Renwarin yang membentuk barisan pemuda. Demikian pula di Maluku Utara yang berpusat di Ternate, Ali Kama membentuk laskar pemuda sedang di Ambon sendiri dibentuk Pasukan Terpendam yang dipimpin M. Kasim Maruapey. (Sejarah KODAM XV Pattimura : 1970). Kondisi di Maluku ini tidak seperti kondisi di Jawa dan Sumatera dimana para pemuda harus menghadapi kekuatan militer Belanda yang ingin menjajah kembali wilayah Indonesia.

Namun pergolakan politik di Maluku ini hampir sama seperti di wilayah Indonesia lainnya dan berlangsung hingga dicapainya Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 dan kemudian dilaksanakannya Pengakuan Kedaualatan RIS oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Di Ambon hampir seluruh penduduk pulau itu dan Pulau Haruku menyambut gembira acara penyerahan kedaualatan tersebut yang dilakukan di negeri (desa) Hitu — Pulau Ambon. Upacara penyerahan/pengakuan kedaualatan terhadap RIS dari Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 di Den Haag dan Jakarta dirayakan pula di negeri Hitu Messing, dengan penaikan Bendera Merah Putih pada waktu yang sama. Di tempat penaikan bendera tersebut, yang dilakukan oleh para pemuda pejuang Muslim maupun Kristen, kini dibangun sebuah tugu peringatan. (foto 1).

Akan tetapi Penaikan bendera merah putih yang menandai penyerahan/pengakuan kedaualatan di negeri Hitu tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya ketegangan di kota Ambon pada awal tahun 1950. Di sana-sini terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah. Dalam situasi itu orang-orang yang berpela lupa pada hubungan persahabatan dan perkerabatan mereka. Terjadi bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok nasionalis atau republikein yang militan melawan kelompok-

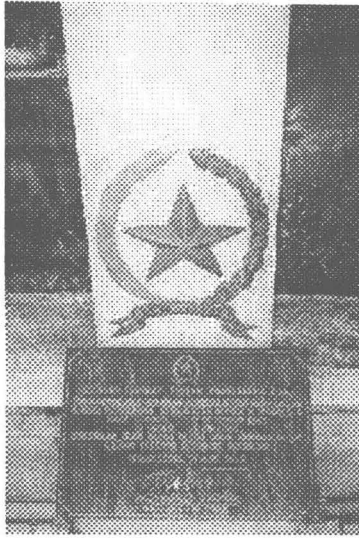


Foto 1 Monumen peringatan penaikan bendera 27 Desember 1949 di negeri Hitu
Messing

kelompok reaksioner termasuk anggota-anggota KNIL yang tidak setuju dengan RIS ataupun Unitarisme (negara kesatuan). Keadaan itu semakin memburuk ketika satu kompi baret hijau bekas anak buah Westerling mendarat di Ambon pada 17 Januari 1950. Pada 22 Januari 1950 terjadi penyerbuan ke dalam Kota Ambon. Banyak rakyat yang dianiaya dan terbunuh, Kota Ambon dibumi hanguskan. Hal itu tentu memberi gambaran bahwa aparat pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak dapat berbuat apa-apa atas peristiwa tersebut. Kondisi saat itu tidak jauh berbeda dengan situasi Ambon dewasa ini yaitu sejak awal tahun 1999 sampai 2000 ini. Keadaan yang sudah panas dan memburuk ini masih ditambah lagi dengan menjalarnya kebencian masyarakat Ambon terhadap kekuasaan yang bersandar pada KNIL.

Untuk mengatasi hal itu Prof. Leirissa mengungkapkan bahwa Pemerintah NIT telah mengirim Menteri dalam negerinya Iskandar Moh. Djabir Syah (yang juga adalah Sultan Ternate) ke Ambon. Pemerintah RI mengirim Ir. M. Putuhena dan Mayor Saleh Lahade, sedang pihak KNIL

mengirim Kapten J. Tahiya dan beberapa perwira Belanda. Di Ambon para delegasi tersebut mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi politik dan sosial seperti PIM dan Ina Tunjika serta mengadakan perundingan dengan *Troepen Commandan Molukken* (TCM) Koning. Hasil pertemuan dan perundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu menampilkan hasil yang optimis, karena pemimpin TCM Koning berjanji akan berusaha untuk mengatasi kejadian itu. Akan tetapi di kalangan politisi masih terdapat kekecewaan sebab tidak ada jaminan mengenai keamanan di Kota Ambon.

Keadaan Kota Ambon yang tidak menentu itu disebabkan oleh : 1) Timbulnya salah paham dalam kalangan KNIL diantara mereka yang ingin masuk menjadi anggota APRIS dan mereka yang tidak mau. 2) Adanya infiltrasi dari golongan Belanda yang tetap berpaham kolonial yang dengan sengaja mengatur kekacauan itu. Akibat dari kedua hal tersebut timbul kegelisahan di kalangan anggota KNIL yang kemudian membuat keonaran di Ambon. Keonaran-keonaran semakin meningkat menjadi teror, yang dimotori oleh suatu pasukan *istimewa* yang dinamakan *Baret Hijau*. Pasukan ini adalah bagian dari *Korps Speciale Troepen*, yang dibentuk Kapten Raymond Westerling di Batujajar dekat Bandung. Pasukan ini didatangkan ke Ambon dalam rangka mendukung rencana Soumokil membentuk RMS. Dalam bulan April 1950 jumlah mereka menjadi 200 orang. Mereka bertindak semena-mena sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan kaum republikain. Bahkan kemudian pada tanggal 25 April 1950 dibawah kendali tokoh separatist Soumokil, kelompok ini mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). (Leirissa; 1975, 1995).

Mulanya pemberontakan ini ingin diatasi oleh pemerintah RI dengan jalan perundingan. Pemerintah RI mengutus tokoh Maluku yang lain yaitu Dr. Leimena, berangkat ke Maluku untuk berunding dengan tokoh-tokoh RMS tersebut. Tetapi perundingan ini tidak berhasil, bahkan pasukan kolonial Belanda KNIL menyatakan dirinya sebagai angkatan perang RMS. Karena itu untuk mengatasi pemberontakan ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah RI selain mempertahankan keutuhan wilayahnya dengan kekuatan senjata.

Maka pada tanggal 14 Juli 1950 dimulailah operasi penumpasan pemberontakan RMS. Operasi ini berakhir dengan dibebaskannya Kota

Ambon dari tangan kaum pemberontak pada tanggal 8 November 1950. Dalam operasi pembebasan ini telah gugur tiga orang perwira menengah TNI yaitu Letkol Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, dan Mayor Abdullah.

Beberapa pemimpin RMS berhasil melarikan diri ke pulau Seram, tetapi dalam waktu singkat sebagian dapat ditangkap. Di antara mereka yang ditangkap adalah Manuhutu (presiden), Wairisal (PM) dan Gaspersz (menteri dalam negeri). Begitu pula tokoh utama RMS, Dr. Soumokil. Akhirnya dia tertangkap dan kemudian diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Sedangkan beberapa tokoh lainnya, seperti J. Manusama berhasil melarikan diri ke Negeri Belanda.

Sukses pembebasan kota Ambon dan penumpasan RMS membuka peluang pemerintah Propinsi Maluku di bawah Gubernur Latuharhary seorang Kristiani yang ta'at, untuk menjalankan fungsinya sampai tahun 1955. Pemerintahan daerah pun mulai dikembangkan dengan pembentukan daerah otonom tingkat II Maluku Tengah dan Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952. Demikian pula daerah tingkat II Ambon ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1956. (Sejarah Daerah Maluku, Depdikbud; 1976).

Setahun kemudian dikeluarkanlah Undang-undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1958. Pada waktu ini, Maluku dipimpin oleh Gubernur M. Djosan sampai tahun 1960 dan digantikan oleh Gubernur Mohammad Padang seorang putra Maluku yang Muslim yang memimpin Maluku sampai tahun 1965.

Era baru sejarah daerah Propinsi Tingkat I Maluku dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur G.J. Latumahina (1966-1968) dan dimantapkan pada periode Gubernur Sumitro tahun 1969. Hal ini berkaitan dengan dimulainya program pembangunan jangka panjang tahap pertama, Repelita I.

Situasi politik, sosial dan ekonomi masyarakat Maluku sebelum itu, seperti halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, tidak menentu. Sisa-sisa kemakmuran daerah ini, yang sudah dikenal di dunia Internasional sejak abad ke-7 sebagai kepulauan yang kaya dengan rempah-

rempah, sudah tidak tampak lagi yaitu pohon-pohon cengkeh yang berbuah banyak dan sangat diperlukan di benua Eropa. (Foto 2). Masa penjajahan yang panjang, disusul pemberontakan RMS dan kemudian dampak buruk dari peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965 telah memporak-porandakan berbagai sumber kehidupan rakyat setempat.



Foto 2. Sisa-sisa kemakmuran daerah Maluku. Perkebunan kelapa di tepi pantai dan pohon-pohon cengkeh di perbukitan.

Situasi politik baik di tingkat lokal maupun nasional sangat tidak mendukung upaya perbaikan taraf hidup masyarakat. Keadaan ini bertambah parah dengan tidak memadainya prasarana dan sarana yang ada.

Upaya ke arah itu secara terencana dan terarah baru dilaksanakan mulai tahun 1969, sehubungan dengan pelaksanaan Repelita I. Pengadaan infrastruktur seperti jalan, pengairan, pelabuhan, dan prasarana lainnya yang dibangun secara besar-besaran sejak itu segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini.

Sukses yang dicapai tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterap Gubernur Sumitro dan para penerusnya – Sumeru (1974-1976), Hasan Slamet (1977-1987) dan

Sebastian Sukoso, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku berusaha keras untuk mengembalikan kejayaannya di masa lalu sebagai daerah “Emas Hijau”. Namun di akhir dekade 1980-an Era Orde Baru, keadaan perekonomian Maluku mulai menurun lagi. Kondisi itu masih diperparah dengan anjloknya harga cengkeh dari Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 menjadi Rp. 2.500 sampai Rp. 3.000.

Seperti halnya daerah-daerah lainnya di Indonesia, kepulauan Maluku memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan.

Pulau-pulau di kawasan “Emas Hijau” ini telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Ciri-ciri fisik penduduk asli Maluku mirip dengan suku-suku bangsa asli Indonesia lainnya yang berasal dari percampuran antara bangsa Wedoid dan Negroid. Penduduk asli keturunan kedua ras tersebut kemudian berkembang menjadi suku-suku baru setelah terjadi percampuran dengan suku-suku yang datang kemudian.

Kendati di Maluku tidak ditemukan fosil kerangka manusia purba, asumsi bahwa di sana pernah hidup manusia prasejarah diperkuat dengan keahlian suku asli menggunakan peralatan yang merupakan warisan dari kebudayaan zaman prasejarah.

Para ahli sependapat bahwa bahasa-bahasa penduduk asli Kepulauan Maluku masih satu rumpun dengan bahasa penduduk asli di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kebhineka tunggal ika-an itu memang bermula dari rentangan sejarah yang sangat panjang. Manusia Homo Sapiens yang hidup sekitar 40.000 SM di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Nusantara adalah manusia Australoid, suatu ras manusia yang punya kemiripan dengan para penghuni pertama di Pulau Seram, Pulau Halmahera, orang Irian, dan pribumi Australia sekarang. Mereka mengembangkan alat-alat batu, mengenal api, berburu dan meramu.

Jejak-jejak kehidupan manusia Australoid bahkan menyebar sampai ke Sarawak, di ujung utara Pulau Kalimantan, yang diperkirakan berasal dari masa kurang lebih 35.000 SM. Manusia Australoid ini antara 15.000 hingga 5000 SM telah membuat kapak-kapak batu dan dapat menanam pohon-pohon buah dan umbi-umbian. (Bambang Sumadio, Uka Tjandrasasmita, SNI II, 1983).

Perubahan-perubahan biologis, bahasa dan budaya terjadi maka orang-orang Australoid berbaur dengan kaum pendatang Austronesia. Bahasa-bahasa mereka pun menyebar dan menguasai kepulauan Asia Tenggara atau Nusantara dengan budaya neolitiknya.

Sebagai daerah yang subur, Maluku tentu saja mengundang kedatangan kaum migran dari berbagai kawasan, yang kemudian menimbulkan gelombang perpindahan dan pada akhirnya menghasilkan percampuran kebudayaan antara penghuni lama dengan suku-suku pendatang baru. Mereka pun kemudian membentuk suku-suku baru. Suku-suku yang diketahui sebagai penghuni pertama daerah ini adalah Suku Alune dan Suku Wemale. Mereka menghuni Pulau Seram, Pulau Halmahera dan Pulau Buru, dan diduga merupakan nenek moyang dari suku-suku yang ada sekarang, seperti Alifuru, Togutil, dan Furu-aru.

Daerah Maluku cukup kaya dengan benda-benda peninggalan dari zaman neolitikum. Alat-alat yang digunakan pada zaman itu, seperti kapak persegi, ditemukan antara lain di Ambon, Amahusu, Saparua, dan Pulau Kei.

Kawasan kepulauan yang kaya dengan rempah-rempahnya ini sudah dikenal di dunia internasional sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-7 pelaut-pelaut dari daratan Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang, kerap mengunjungi daerah ini untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka sengaja merahasiakannya untuk mencegah datangnya bangsa-bangsa lain ke daerah ini.

Ketika Kerajaan Sriwijaya berada dalam masa kejayaannya, Kepulauan Maluku termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Namun setelah kejayaan Sriwijaya berakhir pada abad ke-12, dan Kerajaan Majapahit mengambil alih kekuasaan Maritim hampir di seluruh Asia Tenggara pada awal abad ke-14, perdagangan rempah-rempah Maluku dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Jawa. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol dan Belanda baru menemukan jalan dagang ke Maluku pada awal abad ke-16.

Maluku mulai mengenal bentuk pemerintahan yang lebih rapi dan teratur setelah masuknya agama Islam ke daerah itu, misalnya dengan

berdirinya kesultanan-kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, kendati sebenarnya kehidupan pemerintahan telah sejak lama dikenal di sana.

Kesultanan-kesultanan itu sendiri sebelumnya merupakan kerajaan-kerajaan. Tetapi ketika itu bentuk, susunan maupun sistem pemerintahan masih sangat sederhana dan lebih banyak didasarkan atas persekutuan kelompok-kelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan genealogis. Sebelum terbentuk kerajaan-kerajaan pada abad ke-14, masyarakat Maluku sudah terorganisasi dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat kekeluargaan. Di Tidore, misalnya, terdapat kesatuan masyarakat yang disebut *soa* yang merupakan kesatuan terkecil. Bentuk persekutuan yang lebih besar lagi disebut *boldan* dan dikepalai seorang *kolano*. Di Ternate dan Bacan juga terdapat bentuk pemerintahan serupa, hanya istilahnya saja yang berbeda. *Kolano* inilah yang kemudian, setelah Islam masuk, menjadi *sultan*.

Agama Islam, yang masuk ke Kepulauan Maluku melalui pedagang-pedagang dari Aceh, Malaka, dan Gresik antara tahun 1300 sampai tahun 1400, dengan cepat berkembang di hampir seluruh pelosok di kawasan tersebut. Pusat-pusat penyebarannya adalah Hitu, Tidore, Ternate dan Kepulauan Banda. Ketika bangsa Eropa datang, hampir seluruh penduduk Maluku sudah memeluk Islam.

Bangsa Eropa yang pertama menemukan Kepulauan Maluku adalah Portugis: tahun 1512. Pada tahun itu dua armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Anthoni d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Pulau Banda dan Pulau Penyu. Segera mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat, seperti dengan kerajaan Ternate, sehingga Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikapoli, negeri Hitu lama dan Mamala.

Sembilan tahun kemudian bangsa Spanyol mendarat pula di kepulauan ini dan mendirikan benteng di Tidore. Kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol yang semula hanya mengurus perdagangan rempah-rempah saja, ternyata kemudian menggiatkan pula usaha penyebaran agama Kristen. Hal ini menimbulkan kegusaran penduduk khususnya di daerah Maluku

Utara yang sejak abad ke-15 sudah menjadi pemeluk-pemeluk agama Islam yang taat. Keadaan ini menyebabkan sering terjadi benturan dan pertentangan antara Portugis dengan penduduk setempat. Namun hubungan yang kurang baik antara Portugis dan Kesultanan Ternate menjadi semakin meruncing karena Portugis mulai memaksakan kehendaknya memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1530 persahabatan antara Kerajaan Ternate dengan Portugis berakhir, setelah pedagang-pedagang dari Benua Eropa itu merampas hasil-hasil cengkeh milik Sultan Hairun (dari Ternate) di Makian. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Dalam peristiwa itu Sultan Hairun tewas di benteng Santo Paolo, Ternate. Sejak saat itu hubungan antara Portugis dengan Ternate tidak pernah harmonis lagi.

Pada tahun 1570, ketika Sultan Babullah memerintah Ternate, terjadi lagi peperangan dengan bangsa Portugis. Dalam pertempuran ini pasukan Sultan Ternate menang, sehingga Portugis diusir dari Ternate dan pindah ke Ambon dan Tidore.

Sementara itu Inggris yang sudah lama pula mengincar kepulauan rempah-rempah itu menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Ternate yang pada masa itu hampir menguasai seluruh Kepulauan Maluku. Armada Inggris tiba di Ternate pada tahun 1577.

Perlawanan rakyat terhadap Portugis dimanfaatkan pula oleh Belanda untuk menjejakkan kakinya di Kepulauan Maluku. Ketika terjadi perang antara Hitu melawan Hatiwe-Tawiri yang telah dikristenkan oleh Portugis, Belanda segera membantu Hitu dan memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda menguasai sebagian besar wilayah Maluku.

Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602. Pada saat itu Belanda sudah menjadi penguasa tunggal perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku.

Sistem perdagangan monopoli yang diterapkan Belanda tidak luput dari perlawanan rakyat, misalnya seperti yang terjadi di Banda pada tahun

1621. Untuk lebih memantapkan kekuasaannya dan menjaga sistem monopoli perdagangan rempah-rempah tetap menguntungkan, pada tahun 1625 Belanda (VOC) mulai menggerakkan sistem pelayaran hongi, atau *Hongi Tochten*, yang merupakan gerakan untuk memberantas penyelundupan rempah-rempah. Selain itu juga untuk menghasilkan cengkeh yang berlimpah-limpah, Belanda memberlakukan kerja paksa, tanam paksa, dan bahkan penyerahan paksa. Para penulis Belanda maupun penulis asing lainnya menyatakan bahwa pada masa inilah muncul aliansi-aliansi negeri (desa) dalam bentuk *pela*.

I.4. Ruang Lingkup dan Tujuan

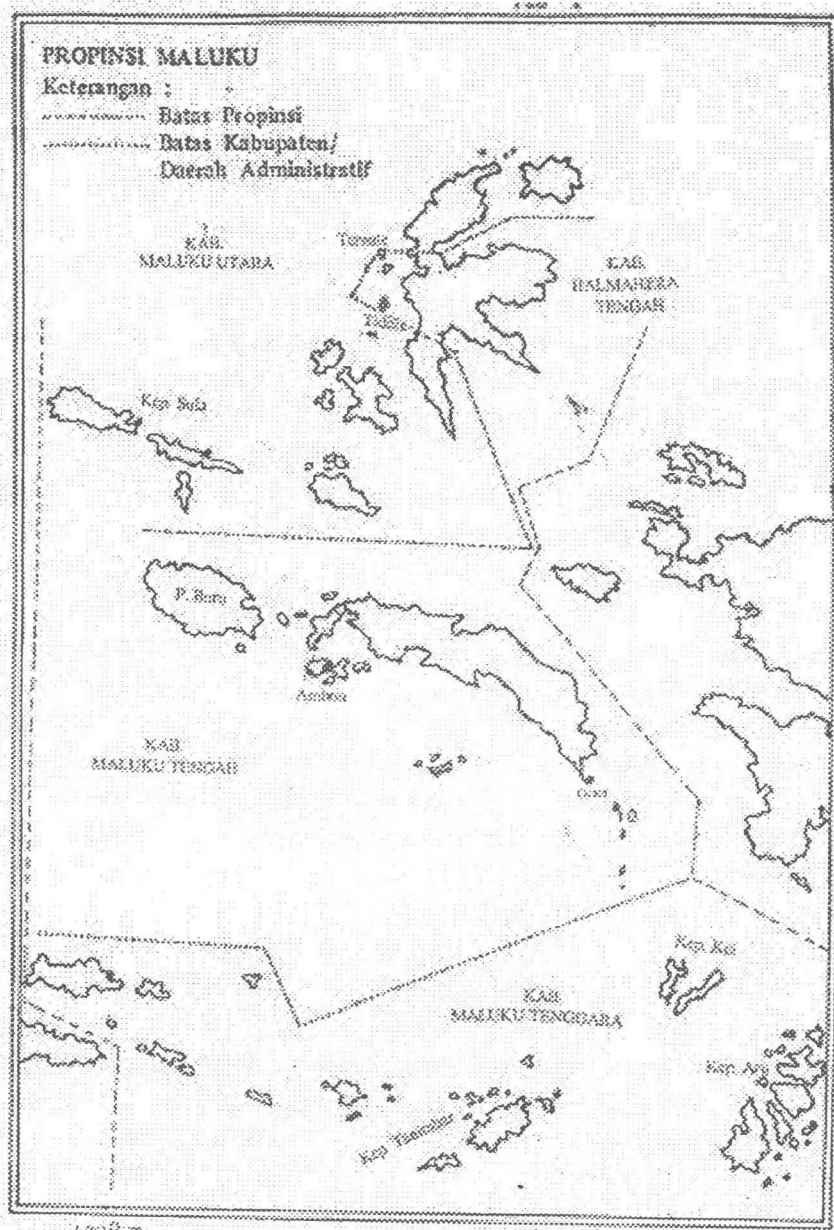
Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada beberapa hal yang diperkirakan dapat memberikan pengertian mengenai pela dan gandong, yaitu suatu institusi budaya Maluku yang peranannya sangat efektif dalam rangka integrasi masyarakat. Namun lintasan sejarah daerah Maluku dikedepankan juga untuk memberi suatu gambaran yang utuh dan hubungan causal dari keadaan yang terjadi saat ini. Aspek-aspek yang akan diungkapkan adalah :

- a) Geografi dan politik
- b) Kehidupan sosial budaya
- c) Sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan
- d) Pela dan siwa lima
- e) Peranan dan fungsi pela
- f) Pengertian pela pada orang Ambon
- g) Negeri-negeri yang berpela
- h) Hukum Adat tentang Pemerintahan Negeri
- i) Pela dan gandong dalam kehidupan beragama
- j) Pela gandong dalam konteks budaya nasional.

Penulisan tentang lembaga budaya pela dan gandong di Maluku ini dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan lembaga budaya pela dan gandong tersebut ke tingkat nasional sebagai salah satu puncak kebudayaan daerah yang dahulu digunakan sebagai *center of inte-*

gration. Lebih dari itu diperlukan adanya campur tangan pemerintah secara nasional untuk membina institusi *pela gandong* tersebut agar fungsi dan peranannya sebagai *center of integration* dapat berjalan seperti yang kita inginkan bersama. Dengan adanya perhatian pemerintah dan terbinanya lembaga *pela dan gandong* diharapkan upaya rekonsiliasi masyarakat dapat terlaksana. Sehingga dengan demikian pembangunan bangsa secara keseluruhan dapat terrealisasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

PETA PROPINSI MALUKU



BAB II

GEOGRAFI DAN BUDAYA MALUKU

2.1. Wilayah dan Pemerintahan

2.1.1. *Maluku Utara*

Nama *Maluku* pada mulanya menunjuk pada empat pusat kerajaan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Prof. Leirissa dalam disertasinya mengenai Jailolo, dengan panjang lebar menguraikan tentang daerah itu. Disebutkan bahwa suatu bentuk penggabungan tertentu dari keempat kerajaan tersebut diperkirakan muncul dalam abad ke-14, disebut *Maloko Kie Raha* atau empat gunung Maluku. Kemudian keempat kerajaan itu berekspansi sehingga mencakup seluruh Maluku Utara (sekarang) dan sebagian dari Sulawesi dan Irian Jaya.

Dengan demikian wilayah kepulauan Ambon dan Lease yang kini dinamakan Maluku Tengah dan sebagian wilayah kepulauan Banda yang kini dinamakan Maluku Tenggara dalam masa itu sama sekali tidak termasuk dalam pengertian asli dari istilah Maluku.

Dari segi etimologi arti dari kata *Maluku* memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi bahan spekulasi dari berbagai kalangan dan ahli. Banyak para penulis menyatakan bahwa istilah itu berasal dari bahasa Arab *Jaziratul Muluk*, artinya wilayah banyak raja. *Muluk* adalah bentuk jamak dari kata *Malik* yang berarti raja. Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa di Maluku Utara terdapat empat raja besar yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Menurut Leirissa sebagai kelaziman politik, agaknya menjadi ilham bagi pemberian arti dari kata Maluku tersebut. Di lain pihak istilah *Maluku* itu telah digunakan sebelum masuknya agama Islam di wilayah itu dalam abad ke-15. Mengenai hal tersebut diperlukan kajian yang lebih teliti.

Ada pula pendapat lain dari Van Fraassen, yang mengadakan penelitian mengenai sistem pemerintahan tradisional dan pola pengaturan masyarakatnya. Dengan mengenal pola budaya dan bahasa setempat, ia berargumentasi bahwa ada kemungkinan kata *Maluku* seperti digunakan di Maluku Utara dalam masa-masa sebelum abad ke-18 mengandung arti

dunia. Pengertian itu hampir sama dengan kata *bhumi* atau *bhuwana* dalam tradisi politik Jawa. (Van Fraassen 1987, dalam Leirissa 1999:2).

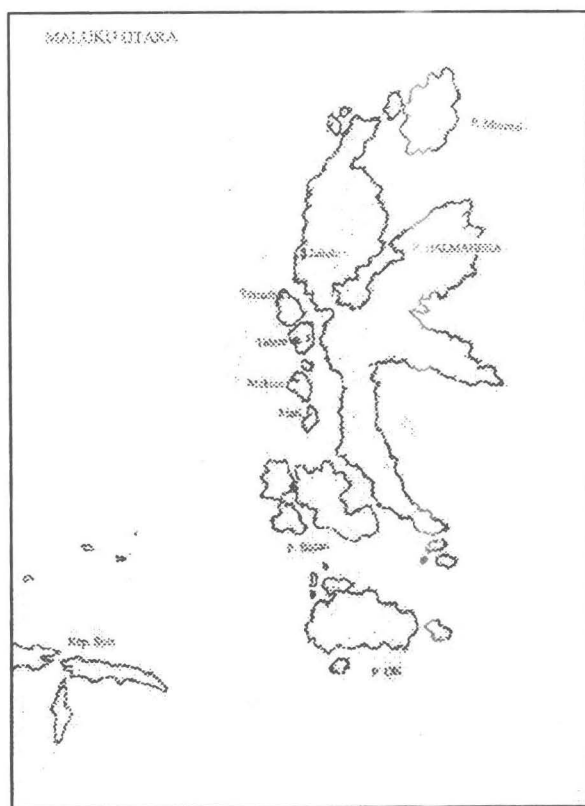
Selanjutnya Van Fraassen dalam penelitiannya itu ia menemukan, bahwa dalam salah satu bahasa di Halmahera Utara, arti kata loko dari Maloko mengacu pada gunung. Gunung sebagai lambang kerajaan adalah suatu hal yang lumrah pula di masa lampau, terutama di Jawa dan Sumatera. Kemudian Van Fraassen meluaskan interpretasinya dengan mengemukakan bahwa mungkin istilah *loko* di Maluku Utara itu mengandung makna yang sama dengan kata loka di Jawa, yang berarti tempat atau bumi. Dengan demikian maka kata *Maloko* atau *Maluku* berarti *penguasa dunia*.

Hal itu dapat dihubungkan dengan kondisi di Maluku; Setiap raja, baik Ternate, Tidore, Bacan, maupun Jailolo, menggunakan istilah *maloko* sebagai bagian dari gelar kebesarannya, yaitu Maloko Boldan Ternate, Maloko Boldan Tidore, Maloko Boldan Bacan dan Maloko Boldan Jailolo. Dengan begitu berarti bahwa setiap raja atau sultan adalah *penguasa dunia*. Interaksi antara mereka diatur sedemikian rupa sehingga konflik-konflik yang menghancurkan dapat dihindari. Inilah makna pokok dari ideologi *Maloko Kie Raha* (Maluku Empat Gunung) yang membenarkan adanya konfederasi atau penggabungan tersebut.

Wilayah Maluku yang sekarang ini dari pulau Morotai sampai ke pulau-pulau Babar luasnya kurang lebih 900 km². Umumnya terdiri atas pulau-pulau vulkanis atau pulau-pulau karang yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sehingga tidak terdapat dataran rendah yang luas seperti di Sulawesi atau di pulau Jawa. Bagaimana kondisi wilayah ini pada beberapa abad yang lalu, belum ada penelitian yang mendalam dan akurat. Akan tetapi dengan adanya beberapa penulisan dari abad ke 16-18 dapat disimpulkan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi atas topografi kepulauan ini. Kalau pun ada perubahan itu tidak berarti. Pulau-pulau Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Sula, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Banda, Kei, Luang, Babar, Wetar, dan Damar pernah tercatat sebagai pulau-pulau yang menghasilkan komoditi tertentu yang dibutuhkan manusia sampai di Eropa.

Betapapun juga, hubungan antara geografi dan politik cukup jelas di Maluku Utara. Dari segi geografi, istilah Maluku terbatas pada pulau-pulau

yang memiliki kraton (kedaton) saja yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Seluruh wilayah perairannya yaitu Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram merupakan sarana yang memungkinkan perluasan jangkauan kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut. Demikian pula persebaran budaya kedaton Maluku Utara memanfaatkan jalur-jalur politik dan perdagangan itu, dengan batasan-batasan geografi yang sama pula. Dengan demikian tidak mengherankan kalau interaksi antara Maluku Utara dan pulau Seram (Seran/Ceran) serta kepulauan Ambon-Lease sangat menentukan pola masyarakat di kedua wilayah itu; demikian pula interaksi antara pusat-pusat kekuasaan di Maluku Utara dengan pulau-pulau di sekelilingnya merupakan akibat langsung dari keadaan geografi itu. (Leirissa 1996, 1994).



Maluku Utara memiliki wilayah perairan yang luas dengan 353 buah pulau tersebar di sekitarnya. Luas wilayah Maluku Utara itu adalah 107.383 km², dengan luas pulau-pulau secara keseluruhan hanya 32.000 km². (Leirissa, 1999). Pulau yang terbesar adalah Halmahera dikelilingi sejumlah pulau kecil seperti pulau Ternate, pulau Tidore, pulau Gebe, pulau Bacan, pulau Makian, pulau Obi, dan kepulauan Sula.

Disebutkan bahwa pulau-pulau ini merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi yang menjangkau sampai ke Sulawesi. Pulau-pulau kecil yang penting itu sesungguhnya adalah puncak-puncak dari gunung api, seperti pulau Tidore dan pulau Ternate. Perairan di antara pulau-pulau tersebut kini dinamakan Laut Maluku yang terbentang antara Halmahera dan Sulawesi Utara, Laut Halmahera antara pulau Halmahera dan Samudera Pasifik, dan Laut Seram antara pulau Halmahera dan pulau Seram yang menyambung terus ke Laut Banda di selatannya.

Penduduknya berjumlah 378.537 jiwa (menurut sensus 1977) dengan kepadatan penduduk rata-rata 17 jiwa per km². (Andili, 1979).

Tiga kerajaan dari keempat kerajaan di Maluku Utara itu masing-masing berpusat (berkedaton) pada sebuah pulau kecil, Kerajaan Ternate berkedaton di pulau Ternate, Kerajaan Tidore berkedaton di pulau Tidore, dan Kerajaan Bacan berkedaton di pulau Bacan. Di pusat-pusat kekuasaan itu dibangun istana (kedaton) untuk penguasa (sultan).



Foto 3. Kedaton Ternate. Sekarang berfungsi sebagai museum sejarah dan budaya Maluku Utara.

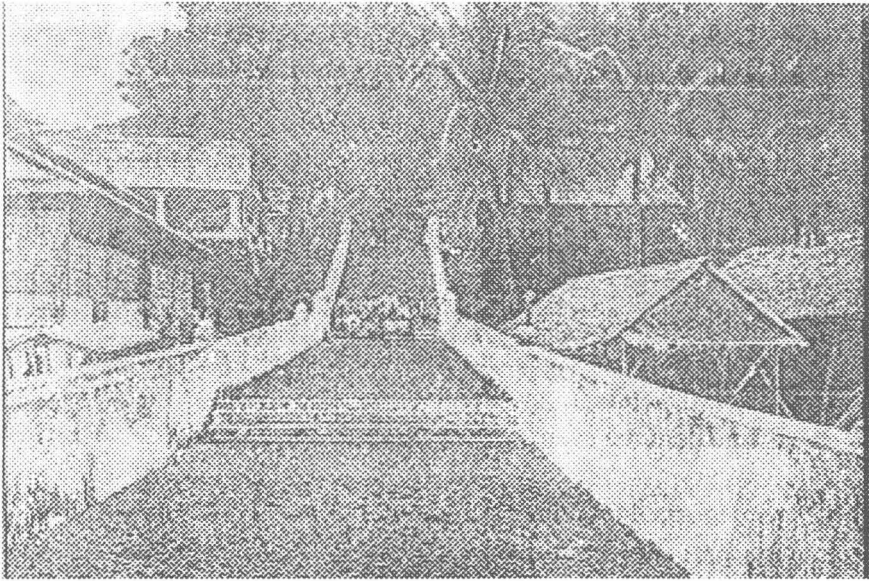


Foto 4. Kedaton Tidore. Tangga menuju pelataran kedaton berjumlah 100 anak tangga.

Hanya Kerajaan Jailolo yang berpusat di pulau yang besar, yaitu di pulau Halmahera. Akan tetapi pada awal abad ke-17 seluruh pulau Halmahera telah menjadi bagian dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Jazirah utara dan selatan pulau Halmahera menjadi bagian dari Ternate, sedangkan Halmahera tengah yang terdiri atas jazirah-jazirah timur laut dan tenggara menjadi wilayah Tidore. Kemudian Ternate meluaskan kekuasaannya ke barat, sehingga mencakup pantai timur Sulawesi, kepulauan Banggai dan kepulauan Sula, sedangkan Tidore meluaskan kekuasaannya ke timur menjangkau kepulauan Raja Ampat, pesisir Irian Jaya, kepulauan Gorong - Seram Laut, dan Seram Utara.

Pada masa VOC kerajaan-kerajaan tersebut berusaha pula dalam perebutan hegemoni ke arah selatan. Banyak pemukiman-pemukiman di pesisir pulau Seram, Ambon dan Lease mendapat pengaruh dari dua kerajaan tersebut. Setiap pemukiman diwajibkan memiliki sebuah jungga atau kora-kora. Kora-kora tersebut dikayuh oleh kurang lebih 50 sampai 100 orang

pengayuh atau pendayung. Di tengah kora-kora terdapat suatu anjungan atau panggung, tempat duduk pemimpin kora-kora atau pejabat Sultan dan pejabat Kompeni Belanda. (Foto 5).

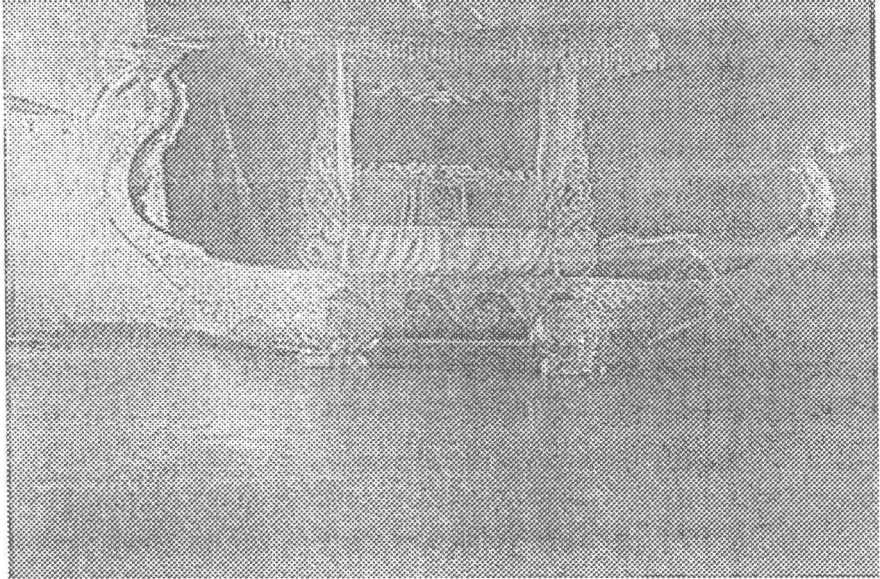


Foto 5. Kora-kora/Jungga dari Kesultanan Ternate

Penduduknya secara bergiliran dan teratur berkewajiban menjadi awaknya. Pada saat-saat tertentu jungga-jungga itu dikumpulkan di kedaton sehingga membentuk sebuah armada kerajaan yang lazimnya dinamakan *Hongi*. *Hongi* merupakan alat politik yang utama dari kerajaan-kerajaan di Maluku, dan *Hongi* pula yang memungkinkan terjadinya ekspansi ke pulau-pulau yang letaknya jauh di luar wilayah kerajaan. (Leirissa, 1996). *Hongi* tersebut sering digunakan oleh pemerintah Belanda (VOC) dalam aktifitas dagangnya dari pulau ke pulau atau dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Aktifitas itu terkenal dengan *Pelayaran Hongi* atau *Hongi Tochten*.

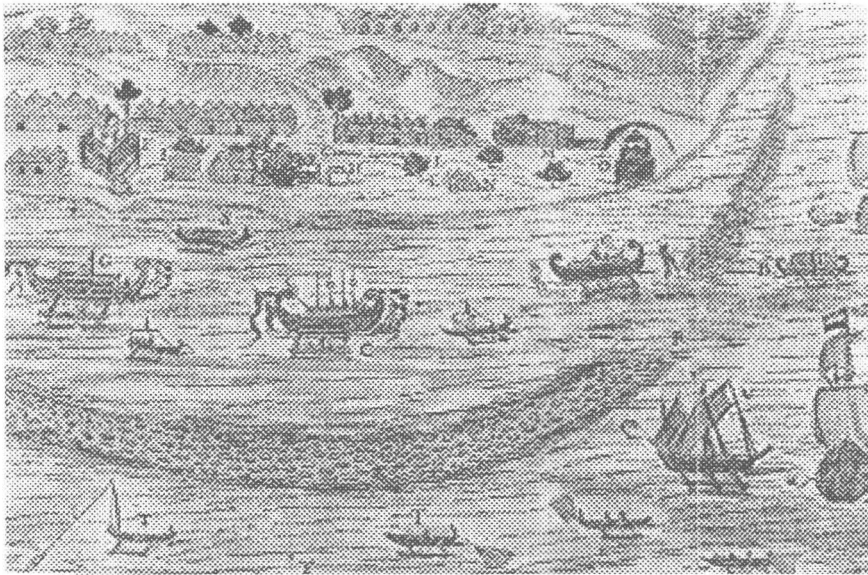


Foto 6. Armada pelayaran Hongi

Melalui gerak perdaganganlah kerajaan-kerajaan di Maluku Utara terutama Ternate dan Tidore, dapat berkomunikasi dan berhubungan lebih jauh melampaui batasan-batasan fisik dan geografisnya termasuk ke arah selatan di daerah Maluku Tengah sekarang.

Adanya interaksi dengan daerah atau wilayah-wilayah lain di luar batas geografi kerajaan-kerajaan di Maluku Utara itu mempunyai hubungan yang erat terhadap perkembangan budayanya. Menurut Prof. Leirissa bentuk interaksi ini mungkin sekali sudah berlangsung berabad-abad sebelum para pedagang Portugis memasuki wilayah ini dalam abad ke-16. Tradisi lisan dan berbagai *Hikayat* seperti *Hikayat Ternate* menunjuk pada adanya kegiatan politik dan perdagangan sebelum abad ke-14. Kegiatan tersebut tentunya berdampak pada perubahan kebudayaan.

Masuknya agama Islam ke Maluku melalui perdagangan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan politik, sosial dan budaya. Bukan saja di kalangan para penguasa (sultan dan aparat pemerintahannya); melainkan juga di kalangan rakyat biasa. Para pedagang yang berkonsentrasi di kota-kota pelabuhan mengembangkan pola-pola

budaya baru. Dengan demikian pola budaya para pedagang asing di kota-kota pelabuhan tertentu, menyebar ke lapisan-lapisan elite kerajaan dan menjadi ciri khas dari kerajaan-kerajaan yang bersangkutan. (Reid, 1988). Antara lain nama penguasa yang sebelumnya disebut *Kolano* berubah menjadi *Sultan*. Ia memiliki identitas tertentu yang mudah dikenal masyarakatnya dan para tamu yang datang dari luar. Sultan memakai mahkota yang mewah dan kharismatik.

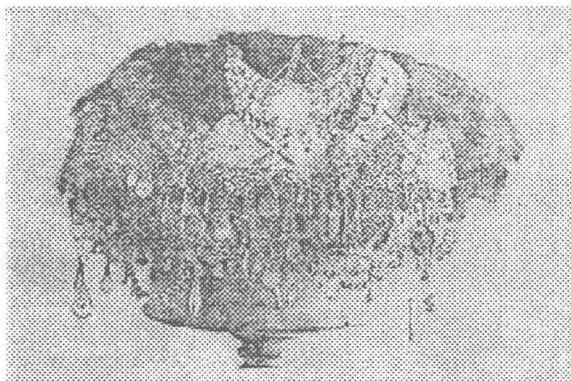


Foto 7. Mahkota Sultan Ternate



Foto 8. Sultan Ternate Iskandar Moch. Jabir Syah

Desa-desa di pesisir lambat laun semakin banyak bercorak Islam. Setiap desa dilengkapi oleh rumah ibadah, dan para pejabat agama disebut *bobato akherat*. Mereka merupakan bagian penting dari elite negeri (*bobato*). Pada umumnya para penguasa negeri ditandai dengan jubah hitam serta tutup kepala hitam atau destar ngongare yang merupakan pemberian sultan sebagai tanda status kedudukan *bobato*. Penduduk pada umumnya juga berpakaian yang terbuat dari aneka macam tekstil yang diimpor atau hasil produksi kota-kota kedaton. Ini membedakan penduduk negeri-negeri pesisir itu dengan penduduk pedalaman yang umumnya hanya bercawat dan masih menganut agama nenek moyangnya (leluhur). Sampai kira-kira 10-20 tahun yang lalu masih banyak penduduk pedalaman di pulau Seram dan di Halmahera menggunakan *cidako* atau *cawat* saja; misalnya suku bangsa Togutil ini.

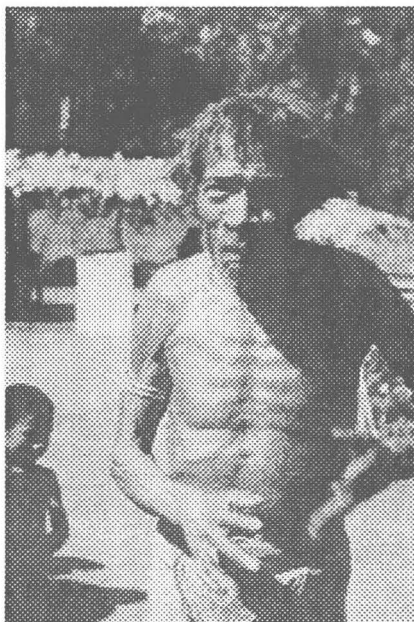


Foto 9. Orang Togutil di Halmahera

Rumah-rumah di negeri-negeri pesisir pun berbeda dengan di pedalaman. Di negeri-negeri pesisir rumah-rumah penduduk berdiri di atas

tanah dan pada umumnya adalah rumah untuk satu keluarga. Di pedalaman rumah-rumah pada umumnya adalah rumah panjang untuk keluarga besar dan berdiri di atas tiang-tiang. Perbedaan itu menunjuk pada kenyataan, bahwa di bagian pesisir budaya kaum pedagang telah merata, paling kurang sejak abad ke-18, sedangkan di pedalaman perubahan yang diakibatkan perdagangan itu tidak nampak. (Leirissa, 1996). Pola budaya lama, yang pada umumnya dinamakan kebudayaan *halefuru* di Maluku Utara atau *alifuru* di Maluku Tengah belum hilang sama sekali. Misalnya dalam adat istiadat kehidupan masyarakat yang sederhana. Adat mengayau masih dilaksanakan, penduduk masih mengenakan cawat atau cidako saja, dan para wanita masih bertelanjang dada, seperti pada foto ini.



Foto 10. Wanita dari suku Furu-Aru, menyusui bayinya di *Tamoli*.

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di Maluku, penduduk asli di Maluku telah memiliki satu kepercayaan dalam kebudayaannya yang disebut *kepercayaan asli*. Sistem kepercayaan ini terdiri dari kepercayaan

animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan ini menganggap bahwa seluruh alam ini dihuni oleh roh atau jiwa, ada roh yang baik ada pula roh jahat. Di Maluku, kepercayaan kepada roh ini dihubungkan dengan roh nenek moyang. Upacara-upacara adat yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan menunjukkan adanya sistem kepercayaan itu. Di samping itu terdapat kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, misalnya batu besar, pohon besar atau benda-benda pusaka. Ada pula kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang suci dan keramat. Sistem *kepercayaan asli* ini sampai sekarang masih ditemukan di berbagai pelosok kepulauan Maluku.

Di Maluku Utara misalnya, penyembahan terhadap roh nenek moyang di Ternate disebut *Gomangga*. Peraturan-peraturan dari nenek moyang sampai sekarang masih dipegang dan takut dilanggar karena dapat mendatangkan malapetaka. Berbagai bentuk roh jahat juga dikenal, antara lain Hatemadubo, Meki, Gonda yang masing-masing mendiami pohon-pohon, gunung dan goa. Di Ternate juga terdapat satu kepercayaan kepada roh tertinggi yang disebut *Gikirimoi* artinya pribadi tertinggi yang tidak kelihatan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kekuasaannya diserahkan kepada manusia pertama yang diciptakannya dan manusia itulah yang menjadi nenek moyang masyarakat Ternate yang selalu dipuja-puji. Di Tidore roh tertinggi disebut *Jou Wange* yang menurunkan kekuatannya kepada seseorang yang disebut *Momale*, yaitu orang yang menjalankan upacara-upacara adat.

Proses adaptasi budaya yang demikian panjang sejak abad 14 sampai abad ke-20, belum menampakkan bahwa di Maluku Utara terdapat semacam lembaga budaya seperti lembaga Pela di Maluku Tengah.

2.1.2. Maluku Tengah

Nama Maluku Tengah memang mengacu pada istilah Maluku seperti yang diuraikan di muka. Namun sebelum abad ke-19 tidak ada kebiasaan untuk menyebut kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya itu dengan istilah Maluku. Sebab itu pula sebelum abad ke-19 tidak ada istilah *Maluku Tengah* ataupun Maluku Tenggara. Sampai abad itu istilah Maluku masih tetap digunakan dalam pengertian *Maluku Kie Raha* seperti yang dikemukakan di atas.

Perubahan itu terjadi dalam masa VOC yaitu pada abad ke-17 hingga ke-18. Kepulauan yang terbentang antara Sulawesi dan Irian itu dibagi dalam tiga *gouvernement*, yaitu pertama *gouvernement* Ternate untuk Maluku Utara yang berpusat di Benteng Oranye di Ternate, kedua *gouvernement* Amboina untuk Maluku Tengah yang berpusat di Benteng Victoria di pulau Ambon, dan ketiga *gouvernement* Banda untuk Maluku Tenggara yang berpusat di Benteng Belgica di Bandaneira.

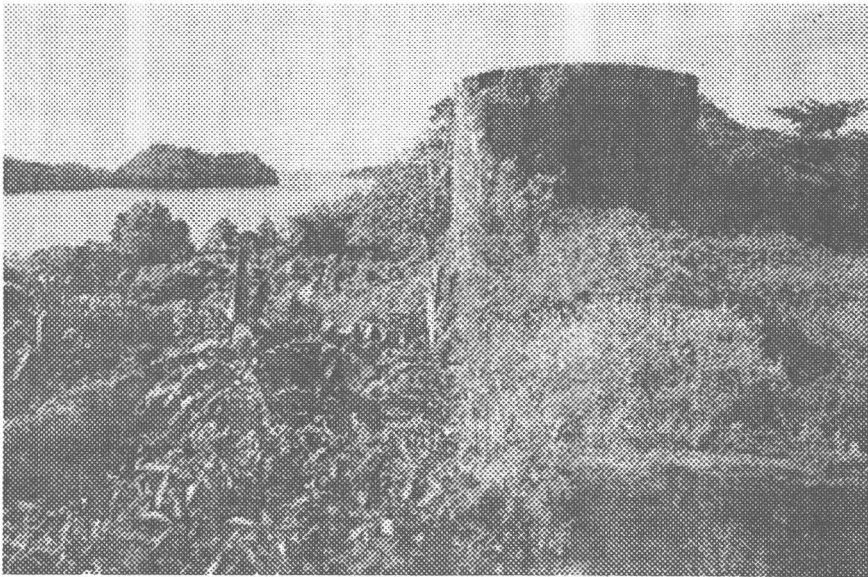
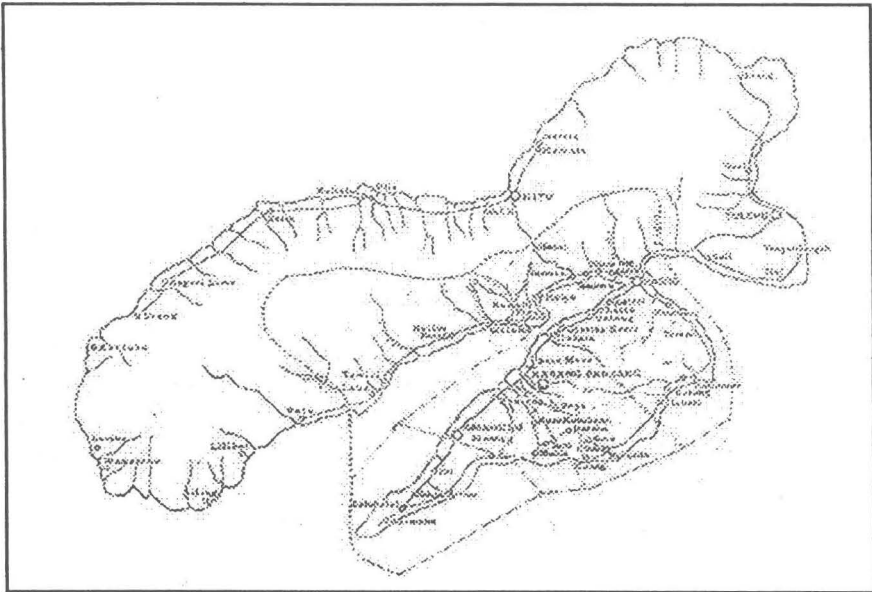


Foto 11 Benteng Belgica di Bandaneira



PULAU AMBON

Setelah VOC dibubarkan, Belanda membentuk Hindia Belanda pada tahun 1817. Ketiga *gouvernement* tersebut di atas lalu disatukan menjadi satu *gouvernement*, dan pusatnya ditempatkan di kota Ambon di pulau Ambon. Satuan administrasi pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1817 itu diberi nama *Gouvernement de Molukken*, dan sejak itu pula muncul kebiasaan untuk menggunakan istilah Maluku bagi seluruh kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya. (Leirissa, 1971).

Sejalan dengan perkembangan administratif itu, penduduk yang mendiami kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya mulai dinamakan orang Maluku (Molukkers), sekalipun sesungguhnya dari segi budaya terdapat perbedaan yang cukup besar antara ketiga wilayah tersebut. Kemudian orang juga mulai menggunakan istilah *orang Ambon* (*Ambonezen*) untuk penduduk di Maluku Tengah. Dalam hal pada mulanya istilah itu hanya digunakan untuk penduduk kota Ambon saja yang memiliki budaya *meztizo*, yaitu percampuran antara unsur-unsur kebudayaan Maluku (Maluku Tengah) dan unsur-unsur kebudayaan Portugis dan Belanda. Misalnya dalam

hal bahasa, kesenian dan pakaian yang dikenakan dua muda-mudi di bawah ini. Pakaian ini berbeda dengan pakaian yang dikenakan muda-mudi di jazirah Hitu pulau Ambon.

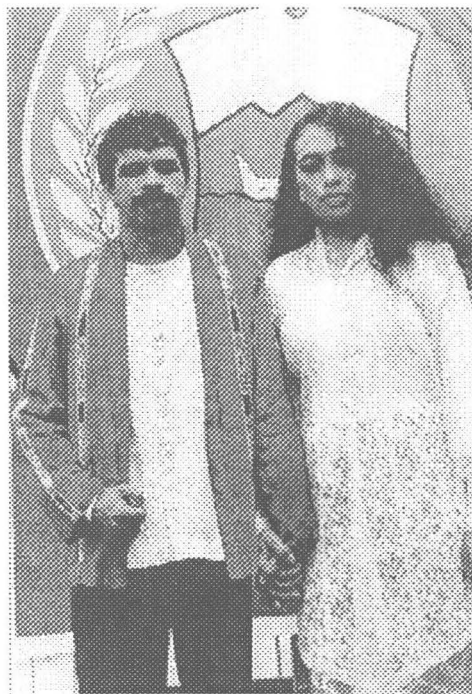


Foto 12 Muda-mudi Ambon

Kemudian orang-orang yang pergi keluar Maluku dan mulai berangkat dari pelabuhan Ambon disebut atau menyebut diri sebagai orang Ambon pula.

Dalam perkembangan sejarah dan budaya, istilah *Ambon* mengacu pada penduduk Maluku Tengah saja. Padahal mereka tidak memiliki satu sistem budaya yang utuh, karena terdapat cukup banyak perbedaan, yaitu antara penduduk yang beragama Kristen dan yang beragama Islam, penduduk pesisir dan pedalaman di pulau Seram, penduduk di pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut dan pulau-pulau di sekitarnya.

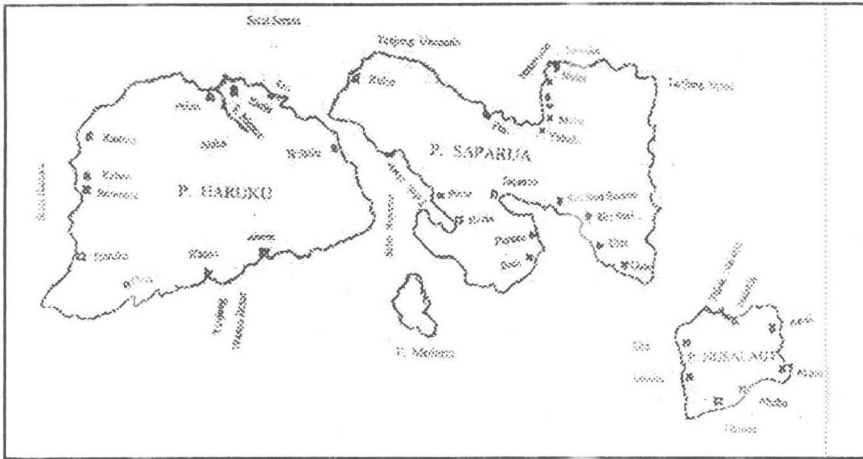
Misalnya pada pola perkampungan. Di pulau Ambon dan Lease sudah banyak dipengaruhi unsur-unsur perkotaan (modern); sedang di pulau Seram masih tradisional. Dinding rumah terbuat dari gaba-gaba dan tiang-tiang rumah panggung walau sudah agak rendah seperti pemukiman di desa Kanikeh ini.



Foto 13. Pemukiman orang Wemale di desa Kanikeh, pedalaman pulau Seram.

Sejak tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan istilah Maluku Tengah, untuk membedakan kabupaten tersebut dengan kabupaten Maluku Utara dan kabupaten Maluku Tenggara. Istilah yang digunakan dalam masa penjajahan, yaitu Maluku Selatan (*Zuid Molukken*), tidak digunakan dalam masa RI. Pertama-tama karena istilah itu terkait dengan sebutan *RMS*, dan kedua alasan yang lebih penting karena wilayah itu telah dibagi pula menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Maluku Tenggara. Pulau-pulau utama di Maluku Tengah adalah pulau Buru, pulau Seram, pulau Ambon, dan kepulauan Uliase di sebelah timurnya yang terdiri atas Haruku, Saparua dan Nusalaut.

Peta Kepulauan Lease



Kepulauan Ambon dan Lease menjadi penting karena sejak pertengahan abad ke-17 oleh VOC dijadikan wilayah monopoli produksi cengkeh yang dipindahkan dari Maluku Utara. Sejak itu hingga tahun 1862 kepulauan Ambon dan Uliase menjadi satu-satunya produsen cengkeh bagi Belanda, sedangkan wilayah asli cengkeh di Maluku Utara menjadi daerah larangan produksi cengkeh.

Sementara itu monopoli produksi pala dibangun oleh VOC di kepulauan Banda, yang berpusat di benteng Belgica di Banda Neira. Buah pala yang berdaging tebal mempunyai biji dan fuli (disebut bunga pala) sangat mahal di pasar Eropa.

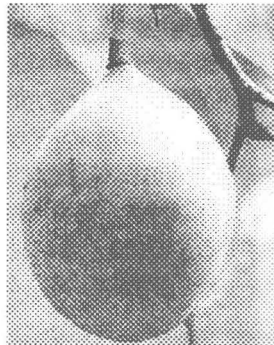


Foto 14 Buah Pala

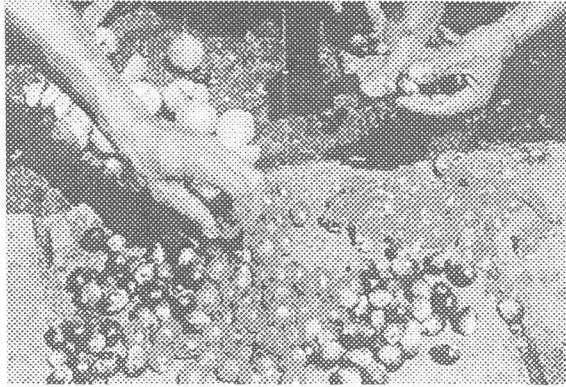


Foto 15 Fuli

Untuk menguasai Kepulauan Banda dan perkebunan-perkebunan pala, VOC pernah menghukum Banda pada tahun 1629 yang hampir memusnahkan seluruh penduduk pulau itu. Kemudian mereka mendatangkan penduduk dari pulau-pulau lain di Indonesia untuk mengelola perkebunan pala yang telah dimiliki kaum *perkenir*. Meskipun begitu orang Banda yang masih ada, tetap memelihara kebudayaannya, seperti tari cakalele dan musik gong sembilan.



Foto 16 Orang Banda dan Musik Gong Sembilan

Dalam masa VOC yang berlangsung sekitar dua abad itu terbentuklah suatu masyarakat perkebunan cengkeh yang khas di Maluku Tengah. Sistem pemukiman (*negeri*) dan pemilikan tanah direkayasa demi kelangsungan sistem perkebunan itu. Struktur negeri ditata sedemikian rupa sehingga penduduk dapat dikerahkan dengan efisien untuk kepentingan perkebunan dan kepentingan pengerahan tenaga lainnya. Sistem pemerintahan negeri juga disesuaikan sedemikian rupa sehingga antara elite negeri dan pimpinan VOC terdapat ikatan politik yang kuat. (Leirissa: 1971).

Pengaruh VOC atas masyarakat kepulauan Ambon dan Lease dengan demikian jauh lebih intensif dibandingkan dengan di pulau-pulau Seram, Buru dan Banda. Beberapa negeri di kepulauan Ambon dan Lease berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan VOC karena menjadi tempat kedudukan seorang residen (kemudian di masa Hindia Belanda menjadi kontrolir), yang berkedudukan dalam sebuah benteng (*fort*) yang dilengkapi tentaranya. Selain kota Ambon dengan Benteng Victoria yang menjadi pusat seluruh wilayah Maluku Tengah itu, muncul pula kota-kota yang jauh lebih kecil karena posisinya sebagai pusat kekuasaan VOC di daerah-daerah. Pusat-pusat kekuasaan itu sesungguhnya terdapat dalam benteng-benteng kecil yang terletak di sekitar negeri-negeri tertentu, seperti benteng Duurstede di Saparua yang menjadi pusat kepulauan Uliase, benteng Amsterdam di Hila yang menjadi pusat wilayah jazirah Hitu (di pulau Ambon) dan jazirah Hoamoal (di pulau Seram).



Foto 17 Benteng Duurstede di Saparua



Foto 18. Benteng Amsterdam di Hila

Negeri-negeri yang dilengkapi perbentengan itu kemudian berkembang sejak abad ke-19 menjadi pusat-pusat administrasi pemerintahan, sedangkan pulau Seram dan pulau Buru yang tidak diizinkan memproduksi cengkeh memiliki struktur sosial yang terbelakang dibandingkan di kepulauan Ambon dan Uliase. (Van Fraassen, 1972; Leirissa, 1996). Budaya pedalaman Seram dan Buru itu, oleh masyarakat pesisiran (dan Belanda) dinamakan *alifuru*.

Pola budaya dari masyarakat *alifuru*, sangat berbeda dengan negeri-negeri pesisir tersebut. Terutama pada agama dan bahasa. Di negeri-negeri pesisir berkembang agama Islam maupun agama Kristen, sedangkan di pedalaman terdapat berbagai macam bahasa suku yang disebut sebagai bahasa-bahasa Nunusaku. Nunusaku adalah suatu daerah di Seram Barat yang kemudian dianggap sebagai sumber yang memancarkan manusia-manusia yang mendiami kepulauan Ambon dan Lease.

Di pulau Seram terdapat sebuah lembaga budaya yang dinamakan *kakehan* yang hanya terdapat di Seram Barat. Arti kata itu sendiri tidak

jelas, namun intinya adalah suatu ritus yang harus dijalani para pemuda agar bisa diterima sebagai anggota masyarakat yang bertanggung-jawab. Menurut Leirissa, ritus kakehan adalah mekanisme seleksi pimpinan dalam masyarakat primitif di Seram Barat.

Anggota-anggota yang telah mengikuti ritus *kakehan* itu ditandai dengan *tatoo* di dadanya. Simbol-simbol yang di *tatoo* itu pun tidak jelas, namun nampaknya pemuda yang terseleksi sebagai pemimpin mendapat *tatoo* yang lebih banyak. Perang di antara berbagai klan di pedalaman Seram Barat itu, agaknya merupakan salah satu dorongan ke arah terbentuknya sistem seleksi itu. Ritual semacam kakehan masih dilakukan sampai dewasa ini yang disesuaikan dengan napas keagamaan. Misalnya di negeri Soya Pulau Ambon, upacara ini dilaksanakan pada bulan Desember yang dimulai dengan upacara bersih desa. Kemudian para pemuda digiring ke puncak gunung Sirimau untuk menjalani suatu acara seleksi yang berakhir pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan Hari Natal.

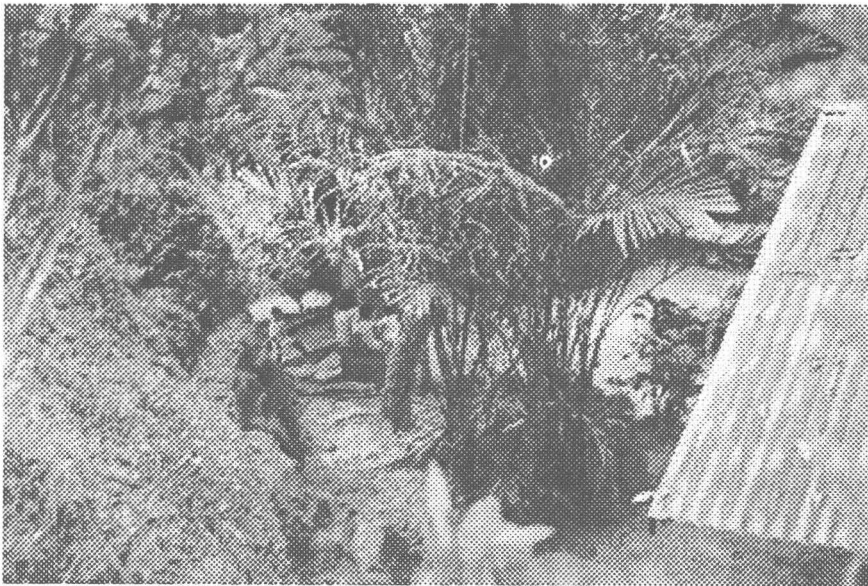


Foto 19 Lokasi pelaksanaan acara ritual semacam kakehan di lereng gunung Sirimau Negeri Soya.

Selanjutnya Leirissa menulis bahwa sejak abad ke-17 Belanda mencatat adanya suatu pembagian atau pengelompokan dalam masyarakat Seram Barat itu menjadi tiga bagian besar. (Leirissa, 1999). Di sebelah baratnya terbentuk pengelompokan Eti sesuai dengan nama sungai yang mengalir di wilayah itu; di sebelah timurnya terdapat saniri pengelompokan Tala menurut nama sungai pula; dan di utaranya terdapat pengelompokan Sopalewa, juga nama sebuah sungai. Ketiga kelompok besar itu mempunyai suatu persamaan. Semua anggota prianya ditattoo sesuai dengan ritus *kakehan*. Oleh sebab itu kesatuan dari ketiga kelompok itu dinamakan masyarakat *Waele Telu* (tiga sungai), atau dalam bahasa Melayu *Tiga Batang Air*.

Dari waktu ke waktu anggota-anggota *Waele Telu* berkumpul di suatu tempat untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara musyawarah. Tempat musyawarah ditentukan secara bersama pula. Tokoh utama di dalam musyawarah tersebut adalah apa yang dinamakan *Ina-ama* (Ina = ibu, ama = bapak) atau para orang tua yang merupakan pimpinan spiritual tertinggi dalam setiap pengelompokan. Untuk mengurus pelaksanaan musyawarah saniri Tiga Batang Air ada petugas-petugas yang menghubungi setiap kelompok, biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan.

Musyawarah berlangsung di tempat yang ditandai oleh dua batang pohon yang dibaringkan sejajar. Di ujung-ujungnya duduk para petugas saniri yang dinamakan Tiang Bendera dan Ujung Bendera. Para petugas itu mempersilahkan mereka yang ingin mengemukakan pendapatnya untuk berdiri di tengah-tengah kedua batang pohon itu dan berbicara. Keputusan diambil secara aklamasi, dan pihak-pihak yang bersalah dikenakan denda berupa sejumlah gong perunggu. Kesatuan *Waele Telu* di Seram Barat itu yaitu di daerah Eti, Tala dan Sapalewa berlangsung sampai abad ke-19. (Duyvendak, dalam Leirissa, loc-cit).

Empat Perdana Hitu, yang memimpin secara periodik. Meskipun demikian jazirah Hitu dan jazirah Leitimur termasuk dalam dua Uli besar yaitu *Uli Lima* dan *Uli Siwa*. Di kemudian hari disebut *Pata Siwa* dan *Pata Lima*. Sementara itu terdapat pula beberapa Uli yang kecil di pulau Ambon maupun pulau-pulau Lease. Diantaranya adalah *Uli Solemata* yang meliputi petuanan negeri-negeri Tial, Tengah-Tengah dan Tulehu; *Uli Sailessy* meliputi petuanan Waai, Liang dan Morella. Kedua Uli ini dan lima yang lainnya berada di jazirah Hitu. Sementara di Jazirah Leitimur terdapat *Uli Nusaniwel*, *Uli Kilang* dan *Uli Soya*. (Depdikbud, Sejarah Daerah Maluku : 1978).

Di pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut masing-masing terdapat dua buah Uli yaitu : *Uli Hatuhaha* dan *Uli Haturessi*, *Uli Iha* dan *Uli Honimua* serta *Uli Ina Haha* dan *Uli Ina Lehu*. Di bawah persekutuan Uli tersebut, negeri-negeri atau desa hidup dalam keadaan yang tenteram dan menjalankan perdagangan berbagai komoditi dengan berbagai suku bangsa.

2.1.3. Maluku Tenggara

Geografi dan Masyarakat

Maluku Tenggara adalah bagian terselatan dari propinsi Maluku. Daerah ini merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari Propinsi Maluku dengan ibukotanya Tual. Wilayahnya meliputi Kep. Key, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, Kep. Damar, Kep. Moa, Sermata, Leiti, Lakor, Kisar, dan Wetar. Dalam waktu dekat kabupaten ini akan terbagi menjadi Kabupaten Maluku Teng-gara dan Maluku Tenggara Barat yang beribu kota di Saumlaki Pulau Tanimbar.

Penyebutan Maluku pada nama Kabupaten Maluku Tenggara adalah mengikuti istilah Maluku seperti yang diuraikan dalam sub bab 2.1.1 dan sub bab 2.1.2 dalam bab ini. Kebudayaan asli di daerah Maluku Tenggara sendiri belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan pada dasarnya kebudayaannya hampir sama dengan kebudayaan penduduk di Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur, Maluku Tengah terutama Seram Timur sampai ke Kepulauan Gorom, Kuur, Kesui dan Watubela. Demikian juga ada persamaannya dengan kebudayaan penduduk di pantai selatan dan barat daya Irian. Kebudayaan yang tersebar di antara wilayah-wilayah itu adalah kebudayaan Austronesia, Melanesia dan Polynesia. Di sekitar abad ke-16 sampai abad ke-19 kebudayaan dari kerajaan-kerajaan Islam Ternate dan Tidore masuk pula ke wilayah ini. Penduduk pulau Banda dari Maluku Tengah juga berimigrasi ke sana pada abad 17-18. Mereka berpindah ke Kepulauan Key dan Aru menghindari kekejaman VOC di masa J.P. Coen. Penduduk dari kepulauan Banda itu kemudian menetap di Elat di pulau Kei Kecil yang kemudian disebut dengan Banda Eli.

Di antara tahun 1500 dan 1800, Kepulauan Maluku Tenggara ini merupakan batas paling selatan dari Kesultanan Ternate dan Tidore sekaligus merupakan wilayah dari salah satu kesultanan tersebut. Karena letaknya yang jauh dari pusat kekuasaan induknya, maka sejak tahun-tahun tersebut Maluku Tenggara mulai merupakan salah satu tempat yang diincar para missionari Portugis dan Belanda untuk penyebaran agama Kristen. (Paul Michael Taylor & L.V. Aragon : 1992). Proses pembudayaan daerah ini walau tidak memperlihatkan penekanan-penekanan tertentu namun berbagai

unsur kebudayaan yang masuk ke sana dan ciri-ciri fisik penduduknya dapat mengungkapkan berbagai proses asimilasi penduduk sekaligus kebudayaannya. Selanjutnya berbagai kebudayaan juga masuk ke sana seiring dengan kedatangan suku-suku bangsa pendukung kebudayaannya, seperti suku bangsa Bugis, suku bangsa Makassar, dan suku bangsa Jawa. Kontak-kontak kebudayaan tersebut telah meninggalkan warna dan corak-corak tertentu pada kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Tenggara.

Penduduk Maluku Tenggara yang dikenal sekarang tentulah merupakan percampuran dari berbagai suku bangsa yang bermigrasi ke sana puluhan dan ratusan tahun yang lalu. Pada awal perkembangan kebudayaannya, ada manusia yang telah hidup di gua-gua dalam kelompok-kelompok masyarakat kecil yang dikenal dengan keluarga Batih. Keluarga Batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, kemudian berkembang menjadi *masyarakat gua* dan membentuk kelompok-kelompok tertentu. (Kuncaraningrat : 1958).

Ditemukannya lukisan di dinding gua di daerah Ohoider di Pulau Kei menunjukkan perkembangan tingkat kebudayaan masyarakat pada masa itu. Lukisan-lukisan di dinding gua berupa gambar telapak tangan, bentuk-bentuk manusia, perahu, binatang melata, ikan, burung dan berbagai simbol, memberi kesan magis-religius. Namun gambar-gambar tersebut pada dasarnya melukiskan situasi kehidupan manusia di dunia nyata dan aktivitasnya. Misalnya menangkap ikan dengan menggunakan perahu dan tombak serta alat pancing.



Foto 20 Perahu
nelayan di pulau Kei
sekarang.

Kemudian penemuan kapak-kapak batu berbentuk pacul atau cangkul menandakan masyarakat di masa itu sudah mengenal pertanian sederhana. Kemudian masyarakat mulai menggunakan peralatan logam seperti besi dan perunggu. Dari logam itu dibuatkan alat-alat seperti, tombak yang disebut Jok, panah yang disebut Temar-Yubil, Lembing (=Nganga), dan lain-lain.

Dengan peralatan-peralatan sederhana itu, penduduk di Maluku Tenggara melakukan aktivitas kebudayaannya. Mereka hidup dalam ikatan kekeluargaan yang familiar dan dalam suasana keakraban dan kegotong-royongan. Mereka hidup berkelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kegiatan perekonomian tertentu dalam wilayah semacam desa/kampung. Di sini ada lembaga pemerintahan yang dipimpin seorang kepala dan beberapa pembantunya. Lembaga pemerintahan desa ini merupakan suatu badan yang berbentuk *raadschap* dan dikepalai *orang kaya*. Ia merupakan pemimpin atau kepala desa yang bersama-sama stafnya bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Geografi Budaya Daerah Maluku: 1978).

2.2. Nilai-Nilai Budaya

Maluku sebagai propinsi yang terkenal dengan sebutan “daerah seribu pulau”, terdiri dari ratusan pulau yang didiami oleh sejumlah suku bangsa. Wilayah yang luas dan sarat dengan keanekaragaman ini disatukan oleh semboyan *siwa lima*, yaitu persekutuan adat yang terdiri dari kesatuan sembilan dan kesatuan lima desa. Sehingga secara umum *siwa lima* juga mengandung pengertian satu untuk semua. Hal ini tercermin dalam kepercayaan sebagian masyarakat Maluku yang mengaku bahwa mereka seluruhnya berasal dari satu moyang terutama di Maluku Tengah.

Kesatuan pendapat tentang asal mula keturunan mereka itu menyebabkan percampuran dan persatuan di antara sejumlah clan atau marga yang terdapat di ketiga wilayah Maluku cukup erat. Selain itu, kehidupan beragama juga memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi. Dari sensus penduduk tahun 1998 diketahui, masyarakat Maluku sebagian besar menganut agama Islam, sebagian lagi beragama Kristen (Katolik dan

Protestan), di samping Budha, Hindu, serta kepercayaan lainnya. Hal itu tercermin dari adanya tempat-tempat ibadah masing-masing agama yang terdapat di ibukota propinsi Maluku yaitu kota Ambon.

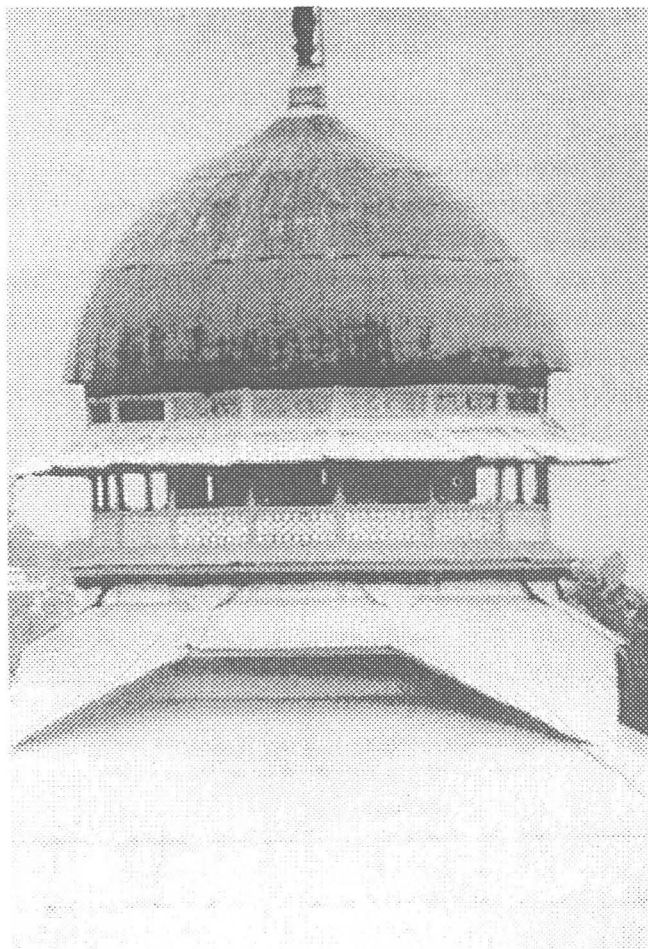


Foto 21 Kubah Masjid Jami' di Kota Ambon.



Foto 22 .Gereja Maranatha
di Kota Ambon.

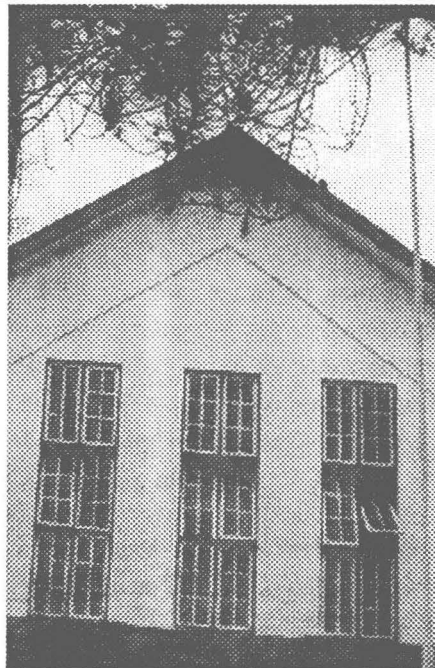


Foto 23 Pura Hindu di
Gunung Nona, pulau Ambon

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di negeri-negeri atau kampung-kampung, berbagai upacara yang berlatar belakang agama seperti sunatan, pembaptisan, lebaran, dan sebagainya sering dirayakan bersama-sama dengan bersantap bersama sambil menari tari lenso. Meskipun demikian, masih ada larangan pernikahan antara sepasang muda-mudi karena perbedaan agama yang dianut masing-masing.

Pada masa sekarang ini, telah banyak terjadi perubahan adat istiadat masyarakat Maluku pada umumnya. Terutama yang berkaitan dengan kepercayaan. Masuknya agama Islam dan agama Kristen Protestan serta Katolik membawa dampak yang sangat besar terhadap variasi perwujudan unsur-unsur kebudayaan Maluku.

Sistem kepercayaan tradisional yang sifatnya animistik dan dinamistik telah mengalami perubahan, sejalan dengan masuknya pengaruh agama-agama besar itu. Pada sejumlah masyarakat di beberapa daerah, perubahan yang berhubungan dengan sistem kepercayaan ini mengalami perubahan total. Pada sejumlah masyarakat di daerah-daerah lainnya, perubahan yang terjadi tidak menyeluruh, walaupun tetap menghasilkan bentuk-bentuk baru akibat adanya penyesuaian. Dari kenyataan ini dapatlah disimpulkan bahwa dalam kehidupan religi sebagian masyarakat Maluku telah berlangsung berbagai proses asimilasi dan akulturasi. Namun dengan adanya pengaruh ajaran agama-agama besar, maka konsepsi politeisme yang berupa kepercayaan animisme dan dinamisme telah banyak ditinggalkan.

Masyarakat Maluku Utara (terutama di Ternate) masa lampau, berkeyakinan bahwa selain *Gikirimoi*, alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh suatu kekuatan sakti yang disebut *Kokiraba* atau *Jini*. Kekuatan sakti ini harus selalu disembah (dijunjung) dan dipuja untuk menjaga keseimbangan alam dan keselamatan seluruh warga masyarakat. Untuk keperluan pemujaan terhadap kekuatan sakti tersebut, dibuat sebuah rumah khusus di atas tiang yang disebut *koseba*. Rumah yang dianggap sebagai tempat kediaman *kokiraba* tersebut dilengkapi dengan meja, bangku atau kursi dalam bentuk miniatur serta dihias dengan *wowe* (daun muda pohon enau) dan *ihul* yaitu pucuk daun kelapa muda atau janur.

Kepercayaan tentang alam dewata yang dianggap menguasai kehidupan manusia memang sudah mulai ditinggalkan. Namun di beberapa

daerah, penduduk masih mengenal “dewa-dewa” yang dianggap berperan dalam kehidupan mereka, khususnya tatanan kehidupan masa lalu. Ada sebagian masyarakat di Maluku Tengah dan Maluku misalnya, mewujudkan dewa-dewa mereka dalam bentuk arca atau patung yang disebut *Kabasa Elako*. Ia dianggap paling berkuasa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Ada pula pemujaan terhadap arwah leluhur dengan menempatkan patungnya di dalam rumah.



Foto 24 Arca, dan patung leluhur.

Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dapat dikatakan hampir punah, namun kepercayaan masyarakat terhadap makhluk halus maupun kekuatan-kekuatan gaib lainnya masih ada.

Masyarakat Maluku Tengah menyebut makhluk halus dari jenis yang baik dengan *upu ama*. Jenis makhluk halus ini berupa roh para leluhur dan berfungsi sebagai pelindung. Agar makhluk-makhluk supranatural tersebut dapat benar-benar berperan sebagai pelindung dan penjaga keselamatan, diperlukan ketaatan dan pemujaan kepada mereka melalui berbagai upacara adat tertentu. *Upu ama* dapat pula menyebabkan malapetaka dalam bentuk kutukan (*katula*). Hal ini terjadi bila terdapat penyelewengan terhadap norma-norma adat yang berlaku, baik yang dilakukan secara pribadi maupun masyarakat pada umumnya. *Katula* atau kutukan yang berasal dari *upu ama* semata-mata merupakan hukuman atau peringatan sehingga kesalahan atau penyelewengan sejenis tidak terulang kembali.

Jenis makhluk halus atau roh yang jahat dikenal sebagian masyarakat dengan sebutan *lita* atau setan. Makhluk-makhluk halus ini selalu dianggap sebagai pembawa bencana dalam masyarakat. Bencana itu berupa wabah penyakit kematian yang tidak wajar, kecelakaan, bencana alam dan berbagai kejadian yang dianggap merugikan manusia. Akan tetapi secara umum bencana yang ditimbulkan oleh *upu ama* hampir sama dengan yang ditimbulkan oleh *lita*. Sumber bencana ini baru dapat dibedakan melalui suatu upacara yang dipimpin *mauweng*. Selain makhluk-makhluk halus tersebut, masyarakat juga mengenal adanya *burana* atau *buntiana* yaitu makhluk halus yang berasal dari seorang wanita yang meninggal akibat melahirkan.

Pada umumnya masyarakat Maluku menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu garis keturunan dihitung dari pihak ayah dengan adat sesudah nikah *urolokal/patrilokal*. Kesatuan keluarga yang terpenting selain keluarga batih adalah *mata rumah* atau *rumah tau* atau *fam* pada masyarakat suku bangsa Ambon.

Negeri-negeri sebagai pelaksana administrasi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala yang dikenal dengan *raja*. Dalam menjalankan tugasnya raja didampingi oleh pemimpin adat. Sebagian masyarakat menyebutnya *amakaha* (orang tua adat/tua-tua adat), sedangkan pelaksanaan adat berada dalam tanggung jawab *tuan tanah* yang bertalian dengan soal-soal agama berada dalam wewenang *Kasisi* yang dipimpin Imam di negeri-negeri Islam dan *Tuagama* yang dikepalai Pendeta di negeri-negeri Kristen bersama

staf penghulunya. Keempat (= lima) golongan ini selalu terlibat dalam upacara-upacara adat seperti upacara *panas pela* dewasa ini.

Selain itu masyarakat Maluku pada zaman dulu juga mengenal adanya sistem pelapisan masyarakat (stratifikasi sosial), yang terdiri atas : golongan bangsawan yang terdiri dari para raja, pati dan latu yang dibantu oleh hulubalang, kapitan dan malesi. *Orang kaya* berkedudukan sebagai wakil raja karena mempunyai hak otonomi atas wilayahnya sendiri walaupun masih dalam kekuasaan raja; golongan agama, merupakan golongan yang dianggap memiliki pengetahuan khusus dalam bidang agama; dan golongan rakyat biasa. Golongan ini lazim disebut dengan *bala-bala* yang terdiri atas petani, nelayan dan buruh. Ada pula yang disebut *ata*. Sekarang sistem pelapisan masyarakat itu hanya tergolong dalam pelapisan sosial samar.

Banyaknya pulau yang tersebar di perairan Maluku memang menjadi sebab terdapatnya berbagai variasi dan perbedaan dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya. Hal ini juga dapat dilihat dari suku bangsa-suku bangsa penduduk asli Maluku, yang mengaku sebagai sub suku bangsa, seperti Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera, Sula dan sebagainya.

2.2.1. Pakaian

Wanita-wanita Maluku pada umumnya mengenal bentuk-bentuk pakaian sejenis kain dan kebaya, baju panjang, dan baju kurung. Wanita-wanita golongan menengah dan golongan atas di Maluku dan Maluku Utara biasanya memakai baju panjang yang terbuat dari katun berwarna putih. Ciri khas pakaian wanita Maluku Utara adalah bentuk baju yang agak longgar dengan lengan yang sempit di pergelangan tangan. Tujuh buah kancing (manset) yang biasanya terbuat dari emas menjadi hiasan bagian pergelangan tangan. Baju yang panjangnya sampai ke atas lutut, bagian mukanya ditutup dengan tiga buah peniti emas yang masing-masing dihubungkan dengan rantai emas. Pakaian semacam ini di Maluku Tengah, dikenakan pada kesempatan acara resmi.



Foto 25 Gadis
Ambon berkebaya
putih pada acara
resmi

Sebagai pakaian sehari-hari, baju ini di Maluku Tengah dipadukan dengan sarung katun atau lurik. Hanya golongan tertinggi saja yang boleh mengenakan kain batik dari Jawa atau Solo untuk sehari-hari. Pada saat digunakan untuk pesta, khususnya bagi wanita-wanita golongan menengah ke atas baju dipadukan dengan kain songket Silungkang yang berwarna merah keemasan atau biru keperakan. Sepatu khas yang menyertai penggunaan baju panjang ataupun baju yang lainnya dalam acara resmi terbuat dari beludru merah, hitam atau ungu dengan bentuk melengkung ke atas dan berujung runcing. Dihiasi dengan bundaran-bundaran kecil yang terbuat dari kuningan atau emas dan manik-manik. Alas kaki seperti ini

dikenal dengan nama *cenela*.



Foto 25 Gadis
Ambon dengan
mengenakan kaos dan
cenela

Sanggul atau konde merupakan pelengkap utama dihiasi dengan empat buah tusuk konde emas. Ada karangan bunga putih yang mungil disebut *papaceda* selalu melingkar mengelilingi sanggul. Ada sementara wanita yang sudah menikah umumnya meletakkan sekeping bundaran emas tepat di tengah sanggul. Kadang-kadang dihiasi dengan sisir yang berbentuk hampir setengah lingkaran untuk menahan sanggul bagian atas, biasanya digunakan oleh para gadis. Adapun wanita golongan menengah umumnya

menggunakan tusuk konde, kancing, dan perlengkapan lainnya yang terbuat dari perak. Selop yang dipakai pun biasanya dari jenis selop keras yang disebut *kaos*. Perbedaan *kaos* dengan *cenela* terletak pada bentuk ujungnya yang persegi.

Selain kebaya panjang wanita Maluku mengenal pula *baju cele* yang dipadukan dengan kain (sarung) *selele*. Umumnya merupakan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita-wanita biasa dan wanita-wanita petani atau pun pedagang. *Baju cele* adalah semacam baju kurung yang terbelah sedikit di depan bagian tengah. Kadang-kadang bahannya dikombinasi dan terdiri dari dua atau tiga corak yang senada. Pakaian ini dipakai sehari-hari dan pada acara-acara resmi dengan sedikit modifikasi.



Foto 27 Dua wanita pedagang berbaju cele, menutup kepala dari sengatan panas matahari.

Wanita-wanita biasa di negeri-negeri Islam tidak menggunakan baju cele, tetapi kebaya pendek dan kain panjang batik buatan Pekalongan atau daerah Jawa lainnya. Pada acara-acara resmi mereka juga mengenakan kebaya panjang atau baju cele dilengkapi kerudung.



Foto 28. Wanita Muslim dalam suatu acara keluarga.

Bahan dan perhiasan yang dipakai pun lebih sederhana. Sarung tenunan didatangkan dari Silungkang, Sumatera Barat, karena di Maluku Tengah tidak terdapat industri tenun. Sekarang ini baju cele sudah dimodifikasi sehingga dapat dipakai dalam kesempatan-kesempatan dan acara-acara resmi atau pun acara-acara adat.

Status perkawinan dari para pemakainya dapat terlihat dari warna baju dan jenis hiasan rambut yang dipergunakan. Warna merah dan jingga biasa dipakai oleh para gadis, warna hijau dan biru digunakan oleh wanita yang sudah menikah, sedangkan wanita-wanita yang lebih tua umumnya memilih warna yang terang atau putih.

Secara lengkap pakaian adat semacam ini terdiri dari dua helai sarung tenunan tangan warna merah dan/atau biru dengan corak sederhana yang

dipadu benang berwarna emas, serta baju yang panjangnya sampai ke pertengahan pinggul, longgar dan berlengan panjang. Setagen pendek dan sanggul yang letaknya tinggi dan dilingkari bunga *papaceda* ikut melengkapi pemakaian pakaian adat *cele* ini.

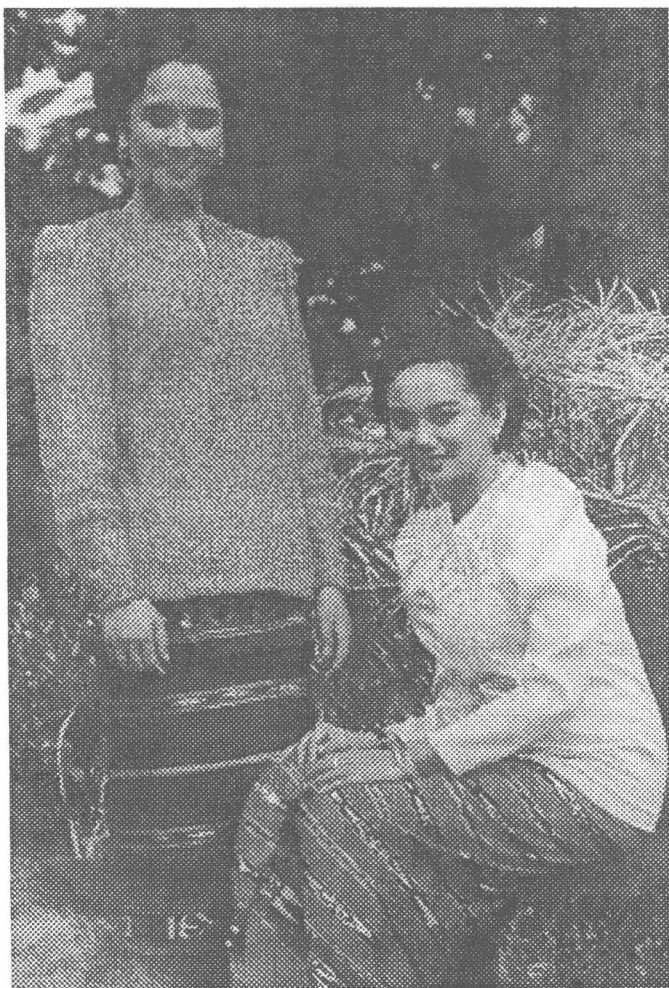


Foto 29. Baju cele merah/Kuning

Pada masa lampau, *cidaku* atau *cawat* bagi pria dan *kanune* atau *tape* bagi wanita merupakan pakaian yang dikenakan sehari-hari masyarakat Maluku Tengah. Namun pada masa sekarang jenis pakaian tersebut sudah tidak lagi digunakan, kecuali pada saat akan menarikan tarian adat. Masyarakat kebanyakan sudah menggunakan pakaian yang umum dipakai oleh berbagai masyarakat lain di Indonesia.

Beberapa pakaian adat masih digunakan dalam berbagai upacara. Salah satu pakaian upacara yang masih dikenal adalah *pakeang adate*. Pakaian adat ini hanya dikenakan pada saat-saat tertentu, biasanya pada saat upacara penyambutan tamu agung, upacara pelantikan pemerintah negeri atau raja. Pakaian yang terdiri dari baju putih atau hitam panjang berlengan panjang dengan ikat pinggang *berang* (kain polos berwarna merah) ini hanya dapat dikenakan oleh *Badan Saniri Negeri* (Dewa Desa). Pakaian lainnya yang juga dikenal oleh sebagian masyarakat Maluku Tengah adalah *tabi-tabi* atau baju panjang berlengan panjang yang terbuat dari potongan-potongan kain.

Bagi masyarakat Maluku Tengah yang beragama Islam, seperti penduduk Kabau, Ruhumoni, Pelau, Masaway dan penduduk desa Iha-Kulor, pakaian upacara yang biasa digunakan berupa jubah polos (umumnya putih) yang dilengkapi dengan serban berwarna putih atau kekuning-kuningan.

2.2.2. Senjata

Salah satu senjata tradisional yang terkenal adalah *parang* dan *salawaku*, yaitu semacam golok panjang atau pedang yang tajam dan *salawaku* atau perisai. Parang yang biasanya memiliki panjang 90-100 cm terbuat dari besi yang ditempa khusus oleh seorang pandai besi. Untuk membuat *ulu* parang atau kepala parang umumnya dipergunakan kayu keras, seperti kayu besi atau kayu *gupasa*. Sebagai pasangan parang, *salawaku* atau perisai juga terbuat dari kayu keras. Senjata ini dipergunakan untuk berperang.

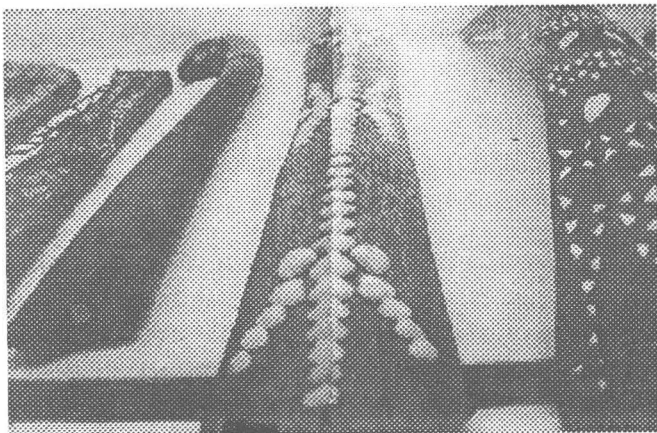


Foto 30. Parang dan salawaku



Foto 31. Monumen Pattimura di Ambon

Pasangan senjata ini pernah digunakan juga oleh Kapitan Pattimura dalam perang melawan Belanda.

Selain parang dan salawaku, masyarakat Maluku khususnya di Maluku Tenggara mengenal pula beberapa jenis senjata lain yang merupakan perlengkapan perang. Beberapa di antaranya adalah *nganga* atau *yuk nganga* (tombak), *ngir* atau *nger* (parang biasa), *suruk* (parang panjang), *yok* (bambu runcing), dan *temar yubil* (panah). Ada juga beberapa jenis senjata yang disebut *peda* (semacam pisau atau parang pendek), dan *kakalai* (tombak).

2.2.3. *Arsitektur*

Baileo merupakan bentuk bangunan tradisional Maluku yang diakui oleh seluruh warga masyarakat Maluku, karena *baileo* merupakan satu-satunya bangunan warisan nenek moyang orang Maluku yang menggambarkan lembaga kebudayaan *siwa-lima*.

Baileo adalah sebuah rumah panggung. Beratap kukuh dan besar, menutupi sebagian badan rumah. Seolah-olah berkesan memberi perlindungan pada rumah dan segala isinya. Atap *baileo* terbuat dari daun rumbia, sedangkan dindingnya terbuat dari tangkai pelepah rumbia yang disebut *gaba-gaba*. Aslinya *baileo* ini tidak berdinding. Hal ini mengandung maksud agar roh nenek moyang mereka dapat bebas keluar masuk bangunan tersebut. Letak lantai yang umumnya dibuat tinggi dimaksudkan agar kedudukan tempat bersemayam roh-roh nenek moyang lebih tinggi dari tempat berdirinya rakyat desa yang bersangkutan. Jumlah tiang penyangga bangunan yang ada melambangkan jumlah clan yang terdapat di negeri/desa tempat *baileo* tersebut berada. *Baileo* juga dilengkapi dengan *batu pamali* dan *bilik pamali* tempat persembahan dan tempat penyimpanan benda-benda yang dianggap suci, khususnya pada saat upacara.

Fungsi *baileo* adalah sebagai tempat bermusyawarah dan bertemunya rakyat dengan dewan rakyat atau dewan negeri (*saniri*). *Baileo* juga merupakan pusat kegiatan upacara/religi masyarakat, seperti pada saat dilaksanakan upacara adat *saniri negeri* dan berbagai upacara yang melibatkan warga desa pada umumnya.

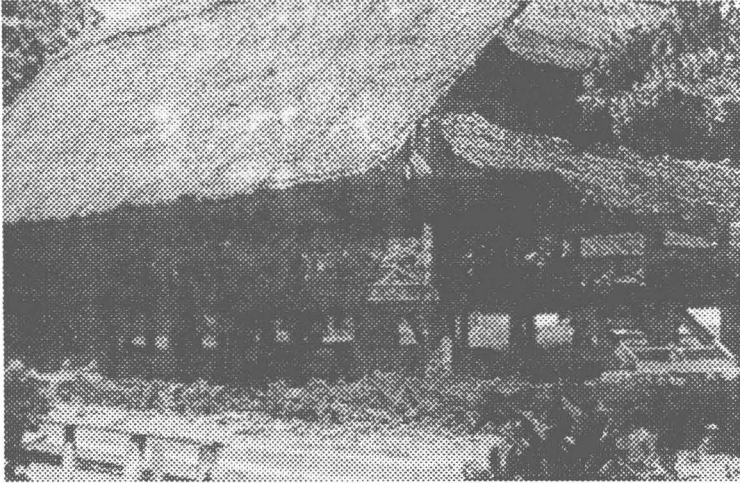


Foto 32. Sebuah baileo di Maluku Tengah.

Rumah Sigit (Masjid) adalah rumah ibadah kaum Muslimin. Bentuk arsitektur masjid tradisional di negeri-negeri Islam mengikuti arsitektur masjid yang pertama di Maluku Tengah di negeri (desa) Kaitetu yaitu Masjid Wapauwe.



Foto 33. Mesjid Wapauwe dan bangunan dalamnya.

Masjid ini mula-mula dibangun di gunung Wawane pada tahun 1414. Pada tahun 1614 dipindahkan oleh Imam Rijali ke Tehalla dan kemudian ke Atetu (Kaitetu) pada tahun 1664 di dekat pantai. Bangunan arsitektur masjid ini tanpa menggunakan paku. Arsitektur yang sama terlihat pula pada masjid di negeri lain di Maluku Tengah.

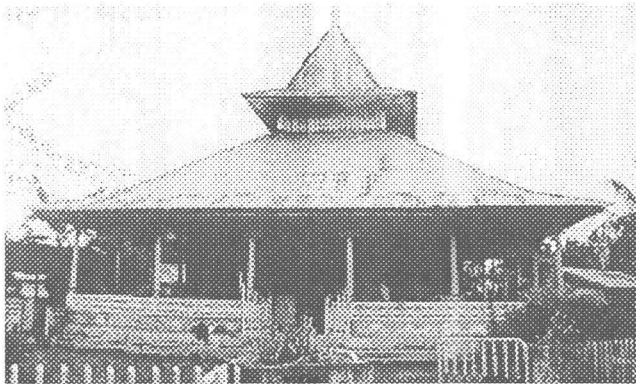


Foto 34 Mesjid Hila

Gereja; Rumah tempat ibadah kaum Kristiani yang pertama di Maluku Tengah ini terletak di di negeri Hila. Bangunan ini agaknya dibangun bersamaan dengan dibangunnya benteng/loji Amsterdam di Hila pada tahun 1700. Kedua bangunan ini letaknya berdekatan. Arsitekturnya nampak bergaya Eropa, dengan tempat atau menara loncengnya berada di luar pintu masuk.



Foto 35 Gereja Hila

2.2.4. Kesenian

Masyarakat Maluku pada umumnya sangat menggemari seni suara, baik nyanyian maupun alunan musik. Keindahan lagu dan musik yang sesuai dengan lingkungan alam di sekelilingnya seringkali dipadukan dengan tari-tarian dalam pesta-pesta adat maupun pesta rakyat. Masyarakat Maluku mengenal beraneka ragam tarian pergaulan yang biasanya ditarikan pada saat-saat tertentu yang penuh kegembiraan. Beberapa tarian tersebut adalah tari *lenso*, tari *katreji*, tari *sahu reka-reka*, tari *pondango*, tari *cakalele* dan tari *soya-soya*.

Tari Katreji. Tari yang menggambarkan kegembiraan masyarakat pada saat diadakannya pesta-pesta besar. Gerak tari yang penuh variasi dan berkesan riang membuat suasana pesta menjadi semakin meriah. Biasanya tarian ini ditarikan bersama oleh seluruh yang hadir.

Tari Sahu reka-reka. Terang bulan merupakan saat yang cukup dinantikan oleh sebagian besar masyarakat Maluku. Datangnya waktu terang bulan selalu disambut gembira dengan pesta rakyat. Para penari pria dan wanita dengan lincah melompat di antara gerakan gaba-gaba atau bambu yang dipukul-pukulkan menurut irama musik.

Tari Pondango. Suatu tari pergaulan yang biasanya dibawakan sebagai hiburan untuk memeriahkan suatu pesta perkawinan maupun pesta-pesta lainnya. Selain tari-tarian pergaulan, masyarakat Maluku yang terkenal sangat menghargai para pahlawannya juga memiliki beberapa tarian yang khusus ditujukan bagi para pahlawan yang akan maju ke medan perang maupun untuk menyambut kedatangan kembali para pahlawan perang. Dua tari kepahlawanan yang terkenal adalah tari *soya-soya* dan tari *cakalele*. Keduanya menggambarkan keperkasaan, kepahlawanan, keberanian, ketabahan, dan persatuan di antara pahlawan perang mereka. Gerakan yang dinamis memperlihatkan keyakinan bahwa kemenangan pasti di tangan mereka. Masyarakat Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara pun mengenal berbagai tarian adat. Umumnya tarian adat masyarakat Tanimbar lebih bersifat ritual, seperti misalnya tari *tnabar tiwal* dan tari *angkosi*. Tari *tnabar tiwal*, yang merupakan warisan leluhur Tanimbar, hanya ditampilkan dalam upacara-upacara penting tertentu. Misalnya pada peresmian negeri dan penobatan raja serta penyambutan tamu-tamu agung.

Adapun tari angkosi juga ditarikan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti dalam upacara syukuran atau pelepasan tamu agung.



Foto 36 Tari Tnabar Tiwal (kiri) dan Tari Angkosi (kanan)

Alat musik tradisional yang biasa digunakan untuk mengiringi berbagai tarian tersebut adalah *tifa*. Tifa merupakan alat musik pukul sejenis gendang khas Maluku. Salah satu sisi gendang ditutup dengan kulit kambing yang ditegangkan dengan rotan untuk mengencangkan tifa agar lebih baik dan nyaring bunyinya. Potongan-potongan kayu kecil yang disebut *badeng* diselipkan di antara rotan dan kulit kambing. Sisi lainnya yang berfungsi sebagai rongga penggema dibiarkan terbuka.



Foto 37 Tifa

Ada tifa yang sejenis dengan rebana disebut *sawat*. Alat musik sawat biasanya mengiringi orang menari sawat. Alat musik tradisional lainnya adalah *suling*. Ada yang terbuat dari bambu mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang paling besar kira-kira berdiameter 7-8 cm. Ada pula yang terbuat dari *kulit bia* (kulit siput).

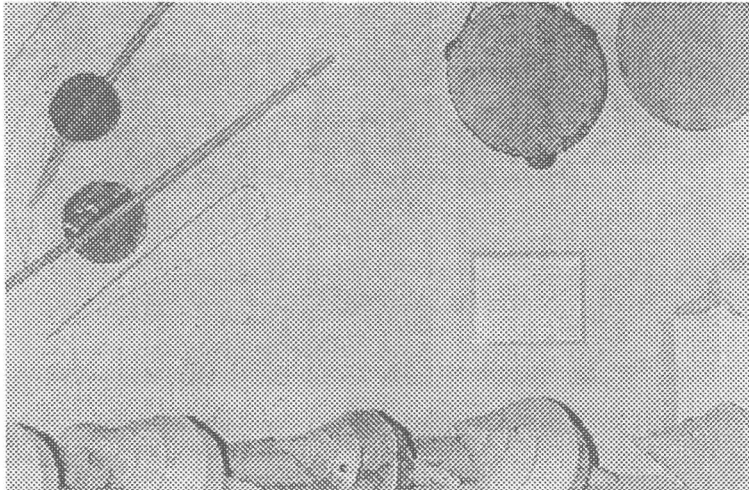


Foto 38. Suling kulit bia, fiol/biola tradisional dan tifa sawat (kanan atas).

2.2.5. Upacara-Upacara Adat

Setelah masuknya agama-agama besar ke Maluku, berbagai upacara adat yang tadinya dilakukan oleh masyarakat menurut ajaran nenek moyang mulai berubah. Baik terjadi penambahan maupun pengurangan. Bahkan tidak jarang masyarakat Maluku pada umumnya hanya melakukan upacara di sekitar daur hidup manusia, khususnya kelahiran, perkawinan, dan kematian dengan berpegang pada ajaran agama yang mereka anut. Namun, di beberapa daerah, upacara adat yang berpegang pada tradisi lama masih juga bertahan sampai sekitar tiga dekade terakhir.

Upacara Menyambut Kelahiran. Pada masa lalu masyarakat Maluku Tengah memiliki kebiasaan untuk mendirikan sebuah rumah panggung di luar kampung, yang disediakan khusus sebagai tempat seorang wanita

melahirkan bayinya. Rumah khusus ini dikenal dengan nama *tamoli*. Pada saat akan melahirkan, *biang kampung* (dukun beranak) memanjatkan doa di bawah tamoli yang ditujukan kepada *Upa Ama* (para leluhur) maupun *Kabasa-Elako* (pencipta yang agung).

Setelah bayi lahir, diadakan upacara untuk memandikan ibu dan bayi di bawah tamoli. Kemudian, selama 40 hari ibu dan bayi berdiam di atas tamoli tanpa bisa ditemui oleh siapa pun. Kecuali seorang wanita yang bertugas mengantar makanan. Itu pun tak boleh bertemu langsung dan berkata-kata.

Selama 40 hari tersebut tamoli dan sekitarnya merupakan daerah tabu bagi kaum pria, termasuk suaminya sendiri. Masa tersebut baru berakhir setelah hari ke-40. Pada hari itu diadakan suatu upacara untuk mengeluarkan ibu dan bayi dari tamoli. Ciri khas upacara semacam selamat ini dipimpin oleh biang adat. Sajian hidangannya yang beraneka ragam dilengkapi sirih dan pinang. Selesai makan bersama, para wanita yang hadir mengiringi ibu dan bayi kembali ke rumah tempat tinggalnya. Di depan rumah, sang suami beserta kaum pria desa sudah menunggu dengan sebuah upacara penyambutan yang dipimpin oleh seorang *mauweng*.

Setelah bayi diserahkan pada ayahnya, pesta di tamoli pun kembali dilanjutkan. Seusai pesta, tamoli kemudian dibongkar dan daerah yang semula merupakan daerah tabu menjadi daerah sebagaimana biasanya lagi yang dapat dilalui oleh kaum pria. Dewasa ini upacara semacam menyambut kelahiran ini masih diadakan juga namun sudah sarat dengan nilai-nilai agamis seperti upacara *akekah* dan upacara *anak serani*. Bila bayi yang lahir laki-laki, maka dalam upacara *akekah* disunnatkan memotong dua ekor kambing, sebaliknya kalau bayi perempuan upacara penyambutan hanya dengan satu ekor kambing. Pada golongan Kristiani bayi segera dibaptiskan di gereja yang disebut *anak serani*.

Upacara Menjelang Dewasa. Pada dasarnya masa peralihan merupakan krisis kehidupan yang dianggap sangat penting oleh masyarakat tradisional, begitu juga pada masyarakat Maluku khususnya di Maluku Tengah. Oleh karena itu, bagi seorang anak yang akan meninggalkan masa kanak-kanaknya menuju masa dewasa perlu dilakukan beberapa upacara

tertentu. Meskipun pada masa sekarang ini bentuk-bentuk upacara yang menandai masa peralihan ini sudah jarang ditemukan, masih ada sejumlah warga masyarakat yang tetap melaksanakannya. Mereka yang masih melaksanakan walaupun tidak lagi selengkap masa lalu tetap beranggapan bahwa krisis dalam masa peralihan tidak hanya menyangkut individu bersangkutan, melainkan juga dapat berakibat buruk pada masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu upacara yang diadakan antara lain :

Upacara Ahkwankei yaitu upacara pemakaian cawat pada anak laki-laki di daerah Lumoli-Morekau, di Maluku Tengah. Upacara ini dilaksanakan di bahwa pimpinan salah seorang anggota *kakehan* yang senior. Upacara dimulai dengan pemakaian *cidaku* (cawat) polos pada seorang anak yang dianggap sudah waktunya untuk memasuki alam kedewasaan. Setelah itu, anak laki-laki tersebut diangkat dan dihadapkan ke arah matahari terbit untuk kemudian diturunkan ke tanah. Anak tersebut harus menyentakkan kakinya sebanyak tiga kali ke tanah tempatnya berpijak. Acara ini disebut *tandang tanah*, yang melambangkan sifat patriotisme. Sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap pria atau lelaki Maluku dewasa.

Cawat polos yang dikenakan anak tersebut akan diberi motif-motif tertentu apabila yang bersangkutan telah membuktikan kedewasaannya. Bukti yang diperlukan antara lain adalah telah memiliki tanggung jawab baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Di bidang ekonomi, kedewasaan seseorang harus dibuktikan dengan kesanggupannya membuat kebun dan memukul sagu. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, yang diperlukan adalah kesiapannya untuk memperlihatkan keperkasaan dan jiwa kepahlawanannya dalam membela negeri serta kemampuannya untuk mengambil isteri dan melindunginya. Upacara semacam itu masih dilakukan juga di negeri Soya di lereng gunung Sirimau pulau Ambon.

Upacara Perkawinan. Perkawinan biasanya didahului dengan peminangan. Hampir setiap daerah memiliki tata cara peminangan yang berbeda. Namun intinya tetap sama, yaitu menjajaki kemungkinan kecocokan antara kedua belah pihak dan merupakan sarana kedua calon pengantin untuk saling lebih mengenal, termasuk keluarga besar masing-masing.



Foto 39. Pengantin adat Maluku Utara beragama Islam.

Makan pinang (makan sirih) bersama merupakan kelanjutan dari permohonan berkunjung pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam rangkaian peminangan yang terdapat di setiap daerah. Adapun upacara perkawinan yang dilaksanakan pada masa sekarang ini lebih berpegang pada tata cara dan ajaran agama yang dianut. Seperti pada masyarakat Maluku Utara, misalnya. Walaupun secara adat kedua calon mempelai sudah dianggap sah sebagai suami-istri, mereka masih harus tinggal di rumah masing-masing sampai diadakan upacara pemberkatan di gereja.



Foto 40. Pengantin adat Maluku Tengah Beragama Kristen.

Upacara Kematian. Pada sejumlah besar desa di berbagai daerah di Maluku, upacara kematian menurut adat tidak lagi merupakan hal yang dianggap sangat penting. Umumnya mereka telah mengikuti tata cara dan ajaran agama yang mereka anut untuk merawat mayat dan menguburkannya.

Namun, masyarakat desa Galela di Maluku Utara masih menjalankan sebagian adat *tomako*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat di sekitar peristiwa kematian seseorang menurut adat. Adat kematian *tomako* yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Galela dimulai segera setelah meninggalnya seseorang. Biasanya beberapa orang kaum kerabat dari orang yang meninggal berdiri di tepi jalan yang biasanya dilalui oleh para

penjual sayur, ikan, dan sebagainya. Setiap penjual yang melalui jalan tersebut dihentikan dan mereka mengambil bahan-bahan yang diperlukan tanpa membayar. Kepada si penjual hanya dikatakan untuk *tonake* dan si penjual pun dengan rela memberikan.

Dahulu jasad orang yang meninggal itu biasanya tidak dikubur, melainkan diletakkan di dalam peti yang dibuat dari pelepah daun nipah. Kemudian jasad tersebut dibawa dengan iring-iringan para pengantarnya ke suatu tempat tertentu dan dibakar di dalam suatu upacara. Pada masa lalu, upacara kematian ini selalu disertai dengan tari-tarian yang disebut *sosaloho* dan *siolegu*.

Masyarakat Maluku juga mengenal berbagai upacara lain di sekitar kehidupan mereka, baik yang berhubungan dengan alam, kemasyarakatan, dan sebagainya. Upacara yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan di beberapa daerah adalah upacara adat *Panas Pela*, upacara adat *Penobatan Kapita*, dan upacara *Cuci Negeri*.

Upacara adat Panas Pela adalah upacara mempereratkan kembali hubungan persahabatan dan perdamaian pada masyarakat Maluku Tengah. Upacara ini diselenggarakan oleh dua kampung yang berpela, untuk kemudian saling berjanji bahwa sejak saat itu di antara dua kampung tersebut terjalin persaudaraan yang lebih erat lagi. Acara utama pada upacara adat *Panas Pela* adalah adat minum/pertukaran darah. Di mana penduduk masing-masing negeri saling bertukar darah kemudian meminum darah yang telah dicampur dengan air atau tuak. Adat tersebut dilakukan sebagai tanda memperingati kembali ikrar ikatan pela atau persaudaraan yang sudah pernah dilakukan para leluhur dahulu.

Upacara panas pela memiliki dampak yang lebih lanjut terhadap sistem kemasyarakatan kedua pihak yang telah melaksanakannya seperti yang telah disinggung di muka. Negeri-negeri atau pihak-pihak yang telah mengadakan ikatan pela dengan sumpah meminum darah tidak diperbolehkan mengadakan ikatan perkawinan. Kepercayaan tersebut berdasarkan pada adat setempat yang menyatakan bahwa di antara dua saudara sedarah tidak diperbolehkan saling menikah. Apabila hal ini dilanggar maka mereka akan terkena sumpah. Upacara dilaksanakan di salah satu negeri yang berpela, meskipun itu harus menyeberangi laut.



Foto 41. Orang-orang yang berpesta di atas perahu

Upacara Adat Penobatan Kapita. Kapita atau Kapitan adalah sebutan yang sangat dihormati, khususnya pada masyarakat di Kesultanan Ternate, Maluku Utara dan Maluku Tengah. Kapita atau Kapitan adalah seorang panglima perang besar yang diangkat oleh para *Kepala Soa* dan rakyat Maluku. Para *Kepala Soa* adalah para pemimpin adat dan pemuka masyarakat (di Maluku Utara jumlahnya mencapai 32 orang).

Pengangkatan kapita di Ternate (dan daerah Maluku Utara) oleh para kepala soa ini pun masih harus memperoleh persetujuan dari *Bobato*, yaitu penguasa dunia dan akhirat yang berjumlah sembilan orang. Pengambilan sumpah bagi calon kapita dilakukan oleh *Joju* (perdana menteri) dan disaksikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan Kesultanan Ternate lainnya.

Pada pelaksanaan upacara Penobatan Kapita ini, biasanya dilakukan uji kekuatan calon Kapita. Caranya adalah dengan memarangkan *peda* (golok) pada bahu dan dada, agar masyarakat umum mengetahui tingkat kemampuan calon kapita yang baru diangkat. Rangkaian upacara biasanya diakhiri dengan pesta yang menyajikan berbagai kesenian daerah.

Upacara Adat Cuci Negeri adalah rangkaian upacara adat bersih desa yang dilakukan oleh masyarakat Soya, negeri tertua di jazirah Leitimur pulau Ambon. Pada masa lalu, upacara cuci negeri dipadukan dengan upacara semacam kakehan dan dilakukan selama lima hari berturut-turut dan jatuh pada bulan Desember, segera setelah angin barat tiba. Setelah masuknya agama Kristen, acara tersebut dilaksanakan di awal minggu ketiga bulan Desember dan disesuaikan dengan ajaran agama Kristen. Puncak acara biasanya bertepatan dengan Hari Natal.

Rangkaian upacara cuci negeri atau bersih desa itu dimulai pada malam hari. Pimpinan upacara (*Upu Nee*) mengumpulkan para pemuda yang semuanya memakai *cidaku* atau sejenis cawat. Wajah para pemuda tersebut dicat hitam. Maksudnya adalah untuk menolak segala kekuatan jahat yang mungkin mengganggu. Kemudian mereka diantarkan menghadap Raja (*Upu Latu*). Setelah dipekenalkan pada Upu Latu, para pemuda tersebut bersemadi selama lima hari lima malam di puncak Sirimau dalam posisi saling bertolak belakang. Pada hari kelima, mereka dibawa ke Samasuru, suatu tempat dimana upacara akan dilangsungkan. Di Samasuru, para pemuda tersebut telah ditunggu oleh orang-orang tua negeri beserta sanak keluarganya. Kepada mereka dikenakan pakaian upacara berwarna hitam dengan lilitan atau salele kain *gandong*, atau semacam/sehelai pita panjang. Kemudian mulailah acara pembersihan desa secara beramai-ramai. Biasanya acara pembersihan desa ini ditutup dengan sebuah pesta yang menampilkan berbagai atraksi dan kesenian rakyat, khususnya tarian bersama dan nyanyian. Misalnya atraksi *bambu gila* oleh para pemuda yang baru menyelesaikan upacara ritual di Samasuru. Mereka menguji tingkat kerjasama dan kekuatan dalam mengendalikan bambu yang diberi kekuatan secara magis oleh seorang mauweng (pawang/dukun). Bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter dapat membanting para pemuda (7 orang pemuda) itu kalau mereka tak dapat mengendalikannya dengan baik.

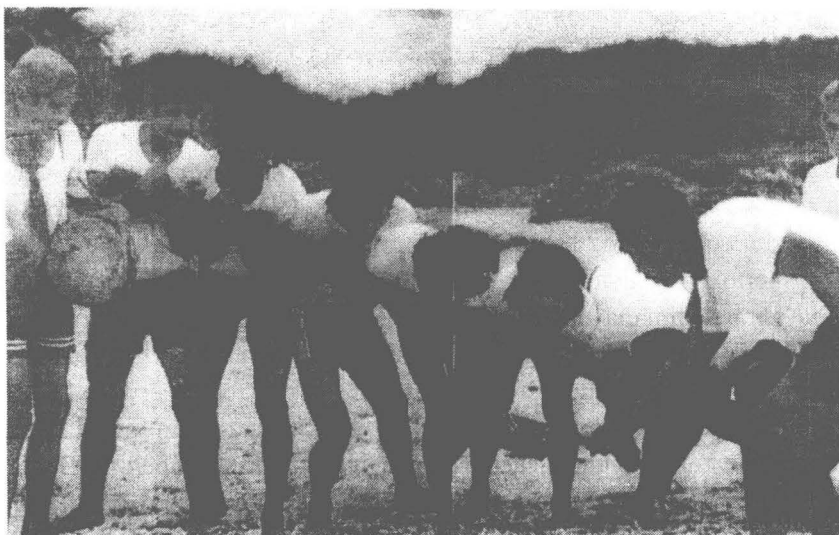


Foto 42. Atraksi bambu gila oleh para pemuda peserta upacara Samasuru.

BAB III

PELA DAN SIWALIMA

3.1. Kehidupan Sosial Budaya

Maluku yang identik dengan kepulauan rempah-rempah, sejak zaman dahulu sudah menjadi legenda bagi para pemburu cengkeh dan pala. Sebagai penghasil komoditi tersebut, Maluku mempunyai daya tarik bagi para pedagang yang datang dari Arab, Persia, India, Malaka dan Cina. Dari bagian barat Indonesia, berdatangan suku-suku Jawa, Melayu, Bali, Bugis, Makassar, dan lain-lain. Sementara dari Eropa, berbondong-bondong sejumlah negara telah datang ke kepulauan ini, mula-mula Portugis dan Spanyol, kemudian Belanda yang mulai menancapkan kaki di sini sejak abad ke-17 sampai abad ke-20.

Dalam kedudukannya sebagai tempat persinggahan penting dan tujuan perdagangan antar bangsa, Maluku kemudian berkembang menjadi kawasan yang dihuni oleh campuran beberapa jenis suku bangsa. Di sini muncul pemukiman suku-suku bangsa dengan berbagai latar belakang budaya dan adat istiadat. Di kota pelabuhan Hitu, pantai utara Ambon, misalnya bermukim pendatang dari Jawa. Berabad-abad lamanya mereka bermukim di sini, dan mereka membawa sebuah pola yang kemudian menjadi umum di Maluku, yaitu menetap di daerah pantai, sedangkan penduduk aslinya ketika itu masih berdiam di daerah pedalaman.

Kehidupan orang-orang pedalaman umumnya terutama di pulau Seram dan pulau Halmahera tidak berubah dari masa ke masa. Mereka tetap mempertahankan adat kebiasaan mereka. Kalaupun ada perubahan yang terjadi, maka perubahan itu sangat lamban. Tradisi yang sudah berabad-abad usianya ini masih tetap dipegang teguh. Hingga sekarang, oleh kaum pendatang mereka disebut orang *Alifuro*, yang diartikan tidak berkembang. (Budi Santoso dalam Profil Daerah Maluku: 1995).

Pengaruh dari bagian Barat Indonesia, terutama dari Jawa baru terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pada periode tersebut Sriwijaya sudah berhubungan dengan India dan Cina. Namun pelaut-pelaut Cina masih

merahasiakan pelayaran menuju Maluku sebagai daerah penghasil cengkeh. Baru pada zaman Dinasti Ming (1368-1643), diceritakan bahwa Maluku di laut tenggara dikenal sebagai suatu daerah yang sangat subur. Disebutkan pula bahwa daerah ini mempunyai “gunung dupa” yang jika hujan turun, dupa akan berjatuhan menutupi tanah, sehingga penduduk tidak mampu lagi mengumpulkannya. (Ibid, hal)

Pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit memegang peranan penting dalam politik maritim di Indonesia sehingga perdagangan rempah-rempah dari kepulauan Maluku pun dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Jawa. Jadi dapat dikatakan, sekitar abad ke-14, Maluku sudah mengambil peranan penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional.

Bangsa-bangsa Eropa baru pada abad ke-16 berhasil menemukan jalan dagang ke Maluku. Portugis mendarat di Banda pada 1512, mula-mula melakukan pendekatan kepada penduduk dengan kebijaksanaan yang lunak dan persuasif agar bisa berdagang. Sebaliknya Belanda yang juga langsung datang ke Banda melakukan pendekatan yang kejam. Mereka menolak kebiasaan tawar menawar yang sudah dilakukan berabad-abad lamanya. Lebih dari itu Belanda meminta seluruh hasil pala dan cengkeh dari seluruh pulau supaya dijual kepada mereka. Bagi rakyat setempat hal ini merupakan sesuatu yang melanggar adat. Akibatnya bentrokan dan kontak fisik pun tidak terhindarkan. Bagi penduduk Banda ini merupakan tragedi yang sangat menyusahkan. Belanda dengan VOC-nya akhirnya merajai seluruh kawasan Maluku. Mereka berhasil menyingkirkan para pedagang nusantara dan para pedagang asing lainnya, sehingga sejak awal abad ke-17 terbentang suatu jaringan perdagangan monopoli di kepulauan Maluku. Monopoli dagang dikendalikan VOC melalui benteng-benteng yang tersebar di kepulauan rempah-rempah itu serta armada-armadanya yang berpusat di Batavia. Perlawanan yang dilancarkan penduduk kepulauan Maluku sepanjang bagian pertama abad ke-17 sangat gigih. Tapi menghadapi teknologi perang VOC yang lebih unggul, berturut-turut para penguasa lokal berjatuhan. Mula-mula kepulauan Banda (1621) dan 1629, menyusul kepulauan Ambon (1650-an) yaitu Hitu dan akhirnya kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Kehadiran VOC di Maluku sejak abad ke-17 mengubah tatanan ekonomi wilayah itu secara radikal. Belanda

mengendalikan produksi cengkeh yang dipusatkan di kepulauan Ambon dan Lease dan produksi pala yang dipusatkan di kepulauan Banda.

Sejak itu keadaan sosial, budaya maupun politik di Maluku dan Maluku Tengah khususnya tercabik-cabik. Para ahli diantaranya Richad Chauvel mengungkapkan bahwa di sana dunia Melayu dan Melanesia bertumpang tindih, dengan akibat kawasan itu baik etnis maupun kebudayaan amatlah heterogen. Peranan daerah ini sebagai gudang komoditi dagang dan kemudian sebagai sumber rempah-rempah memperkenalkannya pada dunia perdagangan internasional. Hubungan itu membawa serta cita-cita politik dan ekonomi beserta dua agama dunia, Islam dan Kristen yang kemudian mendominasi masyarakat Ambon lebih dari empat abad. (Richad Chauvel : 1990).

Cengkeh yang dihasilkan memiliki mutu yang baik dan murah harganya. Maka baik Portugis maupun Belanda memandang perlu menanamkan kekuasaan politiknya di kawasan yang menghasilkan cengkeh itu. Terutama di pulau Ambon dan Lease. Hampir 450 tahun lamanya Ambon berhubungan dengan orang-orang Eropa. Dimulai sejak kontak perdagangan pertama sampai akhirnya secara politis didominasi oleh orang Eropa. Masyarakat Kristen Ambon adalah hasil dari kontak tersebut, seperti halnya masyarakat Islam adalah hasil kontak niaga dengan orang-orang Arab, Jawa, Ternate dan Makassar pada masa-masa sebelumnya.

Pada akhir dasawarsa pemerintahan Belanda, 65,9% dari penduduk Kepulauan Ambon beragama Kristen Protestan, dan 32,7% beragama Islam. Di kota Ambon, di samping orang Kristen dan Ambon, terdapat orang-orang Cina dan Arab maupun orang-orang Islam dari lain daerah Nusantara. Di luar kota, orang Ambon Kristen dan Islam tinggal di negeri (desa) yang berlainan, masing-masing dengan *raja* (kepala desa) dan *saniri negeri* (dewan desa) sendiri. Semua pulau di Maluku Tengah mempunyai baik negeri Islam maupun negeri Kristen, kecuali di pulau Nusa Laut semua desa beragama Kristen dan di Pulau Ambalau dekat Buru beragama Islam. Pada zaman kolonial para anggota dewan desa memilih rajanya dari keluarga atau *mata rumah* yang sudah ditentukan sebagai raja, meskipun residen Belanda mempunyai hak veto untuk menolak, mengangkat, maupun

membatalkannya. Namun sejak awal, Belanda memerintah negeri – negeri ini lewat para raja. Di atas tingkat desa, orang-orang Ambon yang duduk di pemerintahan adalah pembantu-pembantu administrasi, yang membantu para pejabat Eropa tingkat bawah. Mereka diambil dari keluarga raja yang terkemuka.

Sejak akhir abad ke-18, perniagaan cengkeh mundur seiring dengan kebangkrutan VOC dan akibat dari hilangnya keuntungan maka pemerintah kolonial menghapuskan monopoli pada tahun 1864. Meskipun tahun-tahun tertentu ada kalanya panen cengkeh membaik, tetapi sejak itu juga kaum petani Ambon berpendapat bahwa perdagangan cengkeh pada umumnya tidak menguntungkan. Hal itu membawa dampak dan penanamannya pun merosot tajam. Semua usaha untuk menemukan tanaman niaga lain yang cepat mendatangkan uang, gagal. Pulau-pulau Ambon pun lalu dibiarkan, dalam keadaan ekonomi ekspornya macet dan ekonomi nafkah hidupnya pun tidak menentu.

Bersamaan dengan dihapuskannya monopoli, Belanda meluaskan dan mengokohkan kekuasaannya di Nusantara pada akhir abad ke-19. Ini berarti, Belanda memerlukan sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan efektif, baik buat tentara maupun buat lapisan bawah birokrasinya yang sedang berkembang. Untuk mencapai kedua tujuan ini mereka memasukkan banyak orang Ambon Kristen. Pendidikan yang bercorak barat berjalan bersama-sama dengan agama Kristen. Sekolah-sekolah telah ada sejak zaman Portugis, tapi peluang untuk bersekolah baru bertambah pada akhir abad ke-19, Chauvel mengungkapkan bahwa pada dasawarsa berikutnya, beribu-ribu orang Ambon Kristen meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di dinas militer maupun sipil Belanda di seluruh Nusantara. Bekerja sebagai serdadu dan kerani ini mengubah pengalaman kolonial orang Ambon Kristen dari orang yang dieksploitasi habis-habisan di bawah monopoli rempah-rempah menjadi orang yang kedudukannya relatif istimewa. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa mereka mempunyai hubungan yang khusus dengan Belanda, karena mereka mempunyai kesamaan agama maupun tugas, teristimewa kemiliteran, “dalam membawa damai bagi Nusantara”. (Chauvel : ibid).

Orang – orang Ambon Islam tidak ikut serta dalam usaha-usaha kolonial yang kemudian ini. Para penguasa militer Belanda tidak merekrut mereka, seperti yang dilakukan terhadap orang Kristen, dan sampai dasawarsa 1920-an di desa-desa Islam tak ada fasilitas pendidikan. Pihak Islam sendiri beranggapan, bahwa memasuki pendidikan atau dinas militer Belanda sama saja artinya dengan masuk agama Kristen. Akan tetapi, mereka bukannya tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan di dunia kolonial sekeliling mereka. Penghapusan monopoli cengkeh, bersama-sama dengan perbaikan komunikasi, memudahkan penggalangan kembali hubungan antara orang Ambon Islam dengan rekan-rekan seagama mereka, baik di bagian lain Nusantara maupun di tempat lain. Mereka bertemu dengan dunia luar bukan sebagai budak kekuatan kolonial, namun sebagai pelaut, pedagang, atau haji. Adanya hubungan dengan dunia Muslim menimbulkan cita-cita baru di Ambon, dan kelak akan menghasilkan perubahan-perubahan penting, baik dalam kepercayaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, pengalaman orang Ambon Kristen berbeda sekali dengan pengalaman orang Ambon Islam pada akhir zaman kolonial. Identifikasi orang-orang Kristen dengan orang Belanda itu bertentangan dengan kecurigaan dan ketidakterlibatan orang-orang Islam. Orang-orang Kristen, dengan bantuan dan pendidikan Belanda, mendominasi masyarakat Ambon sedemikian rupa, sehingga banyak orang non Ambon menyangka Ambon itu daerah Kristen semata-mata.

Orang-orang Ambon, terutama orang-orang Kristen yang bekerja di luar kampung halaman, dihadapkan pada dilema akibat berkembangnya gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh kelebihan pendidikan mereka, orang-orang Ambon Kristen termasuk orang-orang Indonesia pertama yang pindah ke kawasan kelabu – sebagai kerani, ahli, maupun serdadu – di antara elite Eropa dan penduduk asli. Mereka dengan cepat sadar akan peluang yang diberikan lewat pendidikan yang lebih tinggi dan kemajuan karier, dan dengan perlindungan dan bantuan Belanda, mereka membentuk salah satu organisasi sukarelawan yang pertama, yaitu *Ambonschstudiefonds* (1909). Gunanya ialah untuk memberi beasiswa – ada kalanya juga berupa sekolah – pada para mahasiswa Kristen yang berbakat. Pada akhir dasawarsa 1910-

an beberapa orang Ambon, sebagaimana halnya kaum nasionalis Indonesia lainnya, mulai menyadari keterbatasan bekerja di dalam sistem; dan bahwa pada ujung-ujungnya kelak pemecahan satu-satunya hanyalah akan ada di dalam Indonesia yang bebas dari Belanda. Ini adalah kedudukan yang sungguh pelik buat orang-orang Ambon Kristen, yang menganggap dirinya lebih tinggi ketimbang sesama orang Indonesia, dan mendambakan kesederajatan dengan orang Eropa. (Chauvel : *ibid*).

Pada tahun 1917 kaum nasionalis Ambon membuka cabang Insulinde atau Indische Partij (yang di dipimpin oleh Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo) di Ambon, dan pada tahun 1920, Sarekat Ambon. Kedua organisasi ini menjelajahi kemungkinan mengembangkan cita-cita yang luas bagi pembangunan sosial ekonomi, dan menuntut keikutsertaan politik yang lebih besar bagi rakyat pribumi dalam mengurus segala kepentingan mereka. Di Ambon sendiri dampak mereka yang terbesar ialah lewat keterlibatan mereka dalam percekcoakan di desa-desa. Sesudah monopoli cengkeh dihapuskan pada tahun 1864, keadaan keuangan dan kekuasaan raja-raja merosot, dan meningkatnya mobilitas desa-desa Ambon membuka negeri mereka kepada dunia luar. Konflik-konflik lama antara perorangan dan keluarga-keluarga yang bersaing mengenai kepemimpinan negeri, tak lagi dapat dibatasi sampai di desa. Para anggota Indische Partij dan Sarekat Ambon datang dari kota, terpelajar, kebanyakan beragama Kristen berasal dari luar *negeri*. Mereka memberi tantangan kepada elite adat yang didukung Belanda dalam hal kepemimpinan masyarakat. Hal ini oleh Belanda maupun para raja dijawab dengan tegas. Pertama, Belanda mendukung hak para raja dan administrasi untuk mengusir tamu-tamu yang tak disukai dari negeri dan, kedua, membuang para tokoh utama nasionalis dari Ambon. A.J. Patty, pemimpin Sarekat Ambon, dibuang ke Digul pada bulan Oktober 1924; keberangkatannya menandai akhir kurun waktu aktivitas politik yang relatif bebas dan sukses. Sejak itu sampai dengan kedatangan Jepang, kaum nasionalis ditempatkan di pinggiran masyarakat Ambon, terpisah dari penduduk pedalaman.

Meskipun demikian, pada dasawarsa 1930-an Sarekat Ambon mampu bekerja di kota Ambon dengan tenang dan efektif, di bawah pemimpin baru, yaitu E.U. Pupella. Ia mendirikan sekolah semacam Taman Siswa,

yaitu Balai pendidikan, dan untuk beberapa tahun lamanya menerbitkan sebuah mingguan. Ia berhasil menarik simpati sekelompok kecil pendukung, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam disekitar kota Ambon. Meskipun yang paling terkemuka di antara mereka adalah orang-orang Kristen, tetapi bantuan kepada keuangan dan organisasinya kebanyakan datang dari orang-orang Islam. Mereka sangat sadar, bahwa sebagai orang Indonesia Ambon mereka harus mencari ikatan yang berada di luar agama. Mereka juga yakin, bahwa masa depan Ambon berada di dalam suatu Indonesia yang merdeka, di mana masyarakat Ambon akan berubah lambat atau cepat. Oleh sebab itu orang Kristen terutama, harus menyesuaikan diri kembali dari kesukaan mereka bekerja di pemerintahan, sipil, dan militer, kepada pertumbuhan ekonomi di daerahnya atau dikampung halaman sendiri.

Seperti anggota elite politik Ambon lainnya, kaum nasionalis banyak yang telah mengecap aneka tingkat pendidikan Belanda, namun tidak sebagaimana kebanyakan mitra-pasangan mereka. Sekarang mereka memiliki pengalaman berorganisasi yang otonom – mengurus sekolah-sekolah dan partai sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah.

Organisasi Sarikat Ambon bukanlah gerakan massa. Komitmen kepada kemerdekaan Indonesia pun tidak menyebar di masyarakat Ambon. Akan tetapi kadang-kadang terbukti bahwa serikat itu sanggup memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok yang berbeda – baik di kota maupun di desa atau negeri – negeri, Islam maupun Kristen.

Pengaruh pemerintahan kolonial yang panjang itu membawa perubahan pada tatanan ekonomi dan praktek-praktek perdagangan, sungguh-sungguh berdampak pada kehidupan sosial di Maluku. Akibat situasi politik dan sosial ekonomi yang sangat buruk pada abad ke-17 sampai permulaan abad ke-19, menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukan rakyat bertujuan membebaskan diri dari kungkungan Belanda yang selama ini telah mengambil kekayaan alam yang dimiliki Maluku dan juga kebebasan rakyatnya. Perang Pattimura 1817, adalah peperangan menentang kezaliman untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Perjuangan yang boleh disebut modern baru muncul pada permulaan abad ke-20, yaitu organisasi-organisasi yang berbasiskan etnis Ambon yang mengenyam pendidikan di tanah Jawa mulai berkreasi. Sarikat Ambon merupakan organisasi pertama dari orang-orang Ambon yang bersifat sosial politik, bertujuan untuk memajukan kemakmuran penduduk Ambon. Di Ambon sendiri pada awal abad ke-20 berdiri organisasi persatuan guru Hindia Belanda Nusa-Ina yang bertujuan memajukan kesejahteraan rakyat Maluku, baik Kristen maupun Islam.

Namun karena masa penderitaan Maluku yang cukup lama, Maluku seolah-olah mengalami sakit sosial dan ekonomi yang teramat dalam. Kehidupan rakyat Maluku umumnya sampai usai zaman pergerakan tidak banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Hubungan perdagangan dengan dunia luar boleh dikatakan tidak ada. Hubungan sosial dengan kawasan lainpun mandek. Maluku selama zaman pergerakan hingga tahun – tahun awal kemerdekaan merupakan kawasan terpencil dan ditinggalkan. Belanda telah berhasil mengucilkan penduduk negeri – negeri dari pengaruh luar yang dapat menentang kekuasaannya. Sehingga bebarapa saat setelah Belanda tidak berkuasa lagi, ada kelompok – kelompok yang berpengaruh yang ingin mengabadikan hubungan kolonial. Bahkan hasil *Dewan Maluku Selatan* mengungkapkan bahwa indikasi pembagian Ambon yang paling kentara yaitu antara Islam dan Kristen secara politik makin penting. Pimpinan PIM datang dari masyarakat Kristen maupun Islam, namun pendukungnya kebanyakan adalah golongan Islam kecuali para regent (raja, latu, pati) tidak banyak orang Islam yang ingin memperpanjang sistem kolonial, baik itu di kelompok *Pata Siwa* maupun kelompok *Pata Lima* .

Pada tahun 1950-an pembangunan di kawasan ini baru dimulai namun sasarannya belum tepat dan programnya masih dicari – cari. Ketika Orde Baru mulai bergema di tahun 1966, juga masih terasa berada jauh di bawah bayang – bayang program pembangunan. Keadaan baru mulai terasa berubah dalam tahun 1970-an saat program pembangunan lima tahun mulai dijalankan pemerintah. Program – program yang hendak dilaksanakan semakin jelas dan gairah masyarakat untuk ikut di dalam pembangunan pun tumbuh subur di Maluku. Kehidupan sosial mulai begairah, kehidupan agama pun kembali ceria. Kerukunan hidup antar pemeluk agama – agama

dalam bentuk *pela* menjadi lebih erat melalui upacara – upacara *Panas Pela*. Sekolah-sekolah dengan segala kegiatannya mulai menampakkan diri. Rumah sakit, tenaga medis, kehidupan kesenian dan kebudayaan, perumahan dan pemukiman, kesejahteraan sosial, peranan wanita dan kaum muda juga memperlihatkan langkah-langkah maju.

Di bidang kehidupan keagamaan program-program pelita berhasil membawa terang bagi propinsi ini dengan semakin bergairahnya masyarakat menjalankan ibadah keagamaan mereka. Rumah-rumah ibadah terus dibangun, pembinaan kehidupan keagamaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan bidang keagamaan berupaya menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih rohaniyah. Bidang pendidikan pun mengantar masyarakat daerah Maluku ke arah pemikiran yang cerdas, ahli dan terampil serta berdaya guna bagi daerahnya.

Agama sebagai penuntun hidup manusia dan sumber aspirasi, memang mendapat tempat dalam perjalanan pembangunan bangsa. Sebagai sebuah kekuatan spiritual, agama juga mendapat pengakuan sebagai pemberi arah bagi pembangunan manusia, penjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya, antara sesama manusia sendiri, antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya, serta keserasian hubungan antar bangsa.

Kesadaran yang tinggi akan peran serta kekuatan utama agama dalam pembangunan ini, telah mengantar Propinsi Maluku menuju kematangan pengertian dan pemahaman serta praktek hidup keagamaan masyarakat daerah ini. Agama, bagi Propinsi Maluku diberi tempat sebagai motivator dan dinamisator kemajuan pembangunan yang ditunjang oleh budaya *pela gandong* yang telah melembaga sejak lama.

Usaha penerangan dan bimbingan hidup beragama juga lebih diarahkan pada usaha menyesuaikan materi, metode dan media dakwah/penyiaran agama dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. Mengintegrasikan kegiatan secara lintas sektoral dalam rangka menanggulangi masalah-masalah sosial umumnya; menggerakkan dan mengarahkan potensi lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kehidupan beragama dalam masyarakat, dikaitkan dengan upaya pemantapan stabilitas dan ketahanan masyarakat serta peran sertanya dalam pembangunan.

3.2. Sistim Kemasyarakatan dan Religi

Jauh sebelum kedatangan bangsa asing (Portugis dan Belanda) penduduk Maluku terutama di Maluku Tengah, hidup atau berdiam di daerah-daerah pedalaman dan di gunung-gunung. Dipilihnya tempat yang strategis letaknya dan jauh dari serangan musuh, karena ketika itu sering terjadi perang antar suku. Penduduk hidup berkelompok dan membentuk masyarakat berdasarkan genealogis dan tersusun menurut garis keturunan ayah (patrilineal). Lambat laun kelompok-kelompok sosial yang genealogis itu bertumbuh dan berkembang semakin sempurna sehingga berstruktur kemudian membentuk struktur politik yang nyata. Di dalam sejarah daerah Maluku disebutkan bahwa “struktur politik tersebut berkembang menjadi semacam *Patrician Republican* di bawah suatu *rezim aristokrasi*”. (Depdikbud : 1978).

Pada mulanya kelompok sosial yang genealogis membentuk *rumah tau* yang dikepalai oleh seorang yang lebih *tua* (kepala rumah tau). Beberapa rumah tau yang mempunyai hubungan genealogis teritorial bergabung menjadi sebuah *soa*. Beberapa *soa* yang berdekatan membentuk *Aman* atau *Hena*. *Hena* atau *Aman* tersebut terletak di gunung, sehingga kini biasanya disebut *negeri lama (aman tawari)*. *Hena* atau negeri sekarang ini yang berada di pesisir adalah pindahan dari negeri lama di gunung.

Beberapa *hena* atau *aman* membentuk lagi perserikatan-perserikatan yang lebih besar yaitu *Uli*. Terkenal dua macam *Uli* yang besar. Di Maluku Utara dikenal *Uli Siwa* dan *Uli Lima*. Di Maluku Tengah lebih populer dengan *Pata Siwa* dan *Pata Lima*. Sedang di Maluku Tenggara dikenal dengan nama *Ur Siu* dan *Lor Lim*.

Negeri-negeri di Maluku Tengah umumnya mempunyai pola dasar pembentukan dan struktur pemerintahan yang sama. Akan tetapi di antara beberapa pulau dan negeri masih terdapat pula perbedaan-perbedaan. Di pulau Ambon misalnya nampak adanya perbedaan antara jazirah Leihitu dan jazirah Leitimur. Di jazirah Leihitu terdapat suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Empat Perdana Hitu yang terdiri dari tujuh *Uli* dan diperintah langsung oleh 30 orang *Galarang*. Sedang di jazirah Leitimur tidak ada suatu bentuk pemusatan kekuasaan, kecuali penguasa negeri

sendiri. Misalnya Soya dan petuanannya menyebut diri *uli-soya*; Nusaniwel dengan petuanannya menyebut diri *uli-Nusaniwel* dan Kilang disebut *uli-Kilang*.

Di pusat-pusat kekuasaan seperti Empat Perdana Hitu atau pun di negeri-negeri, ada jabatan-jabatan tertentu dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Misalnya dalam menghadapi musuh bersama diperlukan seorang pemimpin yang disebut *Kapitan*. Sebutan untuk jabatan ini mungkin tidak asli, tetapi kewajiban kapitan ialah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Seseorang yang ditunjuk sebagai kapitan dianggap oleh masyarakat memiliki kekuatan magis tertentu dan kebal terhadap segala macam senjata. Ia mampu mengalahkan lawan dengan kekuatan dan kharismanya. Disamping kapitan ada seseorang yang siap membantu dan menggantikannya kapan saja. Pembantu ini biasanya ada beberapa orang dengan sebutan *Malessy*. Kalau Kapitan berhalangan maka *Malessy* siap mewakili atau menggantikannya. Ada pejabat yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan keagamaan. Ia disebut *Mauweng*. Ia bertindak sebagai *pandita adat* atau kepala adat, dan berkewajiban memimpin upacara-upacara adat. Kadang-kadang ia bertindak pula sebagai dukun. Dalam pelaksanaan tugas-tugas itu ia dikatakan selalu berhubungan dengan dunia *dewata*. Selain *Mauweng* ada pula seorang pembantu dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang disebut *Ma'atoke*.

Jabatan lain yang tugasnya berdekatan dengan *Mauweng* adalah *Tuan Tanah*. Kadang-kadang disebut *Tua Adat* ada pula yang menyebutnya *Tuan Negeri*. Biasanya jabatan ini dipegang oleh anggota *rumah tau* atau *mata rumah* (clan) yang pertama datang dan membangun desa. Ia dianggap memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai asal-usul desa (negeri) dengan segala komponen *kedewataannya*. Bahkan kadang-kadang ia dianggap pemilik tanah di desa itu.

Pejabat bidang perekonomian disebut *Kewang*. Tugasnya adalah mengawasi dan menjaga batas wilayah desa, batas-batas dusun (kebun/ladang) antar warga desa serta hasil-hasil hutan dan laut dari petuanan negerinya (desanya). Hal itu dimaksudkan agar hasil-hasil hutan dan laut tidak diganggu orang asing, ataupun pemakaian/penggunaan yang tidak

senonoh oleh anak negeri sendiri atau pun pemiliknya sendiri. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil bumi negerinya Kewang berhak menentukan *Sasi* dengan persetujuan pemerintah dan lembaga adat negeri, karena itu ia disebut juga Latu Kewano. *Sasi* adalah batas waktu yang optimal untuk panen yang baik. Misalnya tiga bulan atau enam bulan atau satu tahun.

Sebagai penyampai berita dari pemerintah (Latu, Pati, Raja) kepada seluruh penghuni negeri dilakukan oleh *Marinyo*. *Marinyo* diangkat oleh raja dan masyarakat.

Raja/Pati atau Latu atau pun orang kaya adalah kepala desa atau pemimpin negeri/hena. Ia merupakan pemimpin yang utama yang ditunjang oleh aparat-aparat desa/negeri yang lainnya. Latu/Pati sepenuhnya dibantu oleh *Kepala Soa*, yang biasanya lebih dari satu orang.

Jabatan-jabatan pemimpin utama yang diuraikan di atas diwariskan secara turun temurun. Karena itu segala keahlian dalam fungsi jabatan-jabatan tersebut biasanya diajarkan kepada putra sulung atau salah seorang dari anak laki-laki dalam keluarga batih atau keponakan keponakan dari garis keturunan bapak dapat mewarisinya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Selain pemimpin utama dengan fungsi jabatannya masing-masing, ada aparat pemerintahan yang berfungsi membantu raja. Terutama untuk mengatur dan memudahkan jalannya pemerintahan negeri. Aparat-aparat pemerintahan itu adalah 1) Saniri Raja-Pati, yang melaksanakan tugas sehari-hari, keanggotaannya terdiri atas, Raja, Kepala Soa, Kepala Kewang dan *Marinyo*. 2) Badan Saniri Lengkap, yang bertugas membantu dan memperlancar jalannya roda pemerintahan sekaligus sebagai pengontrol pemerintahan. Badan ini terdiri dari anggota Badan Saniri Raja-Pati, para Kapitan, Kepala Adat dan Tuan Tanah. 3) Badan Saniri Besar, dapat dikatakan sebagai badan tertinggi yang keanggotaannya terdiri atas Badan Saniri Raja-Pati, Badan Saniri Lengkap, pengurus mesjid (di negeri-negeri Islam), pengurus gereja (di negeri-negeri Kristen) Kepala-kepala keluarga dan semua orang laki-laki yang sudah dewasa. Badan ini mengadakan rapat atau persidangan setahun sekali, atau sewaktu-waktu jika keadaan mendesak.

Misalnya terjadi persengketaan batas wilayah atau ulayat (tanah negeri) atau peristiwa-peristiwa lainnya yang menyangkut kepentingan negeri. Persidangan Saniri Besar dapat dianggap atau diumpamakan sebagai suatu *Demokrasi Langsung*, yang dilaksanakan dengan terbuka dan diadakan di *Baileu* (Balai Musyawarah Negeri).

Dewasa ini di negeri-negeri di jazirah Leihitu terdapat pejabat pemangku adat istiadat dan pemangku agama. Dalam kelompok pemangku adat terdapat kepala soa, para kapitan, para tuan atau tukang (yang mengerjakan baileu dan rumah ibadah), para kewang, tuan tanah, para tanasse (nakhoda kapal nelayan) dan marinyo. Sedang para pemangku agama di negeri-negeri (Islam) adalah Imam, Chatipe (Chatib), Motim (Modin), Marbout (yang bertanggung jawab atas kebersihan mesjid), dan para lepe atau lebe atau lebai.

Pembagian tugas kerja di dalam hena atau negeri itu dalam perkembangannya sampai sekarang berdampak pada pengelompokan keluarga atau *marga* yang pada akhirnya terjadi klasifikasi secara alamiah. Misalnya marga atau clan dengan nama Latu atau Pati didepannya adalah kelompok keturunan raja. Namun ada pula yang tidak menggunakan kata Pati dan Latu dan orang lain mengetahui akan asal-usul mereka. Seperti Latuconsina, Pattisahusiwa, Latumeten, Pattiselano, Mewar, Laisina, Rehatta, dan lain-lain. Pada akhirnya sistim kemasyarakatan yang nampak adalah pengelompokan-pengelompokan berdasarkan keturunan dari jabatan yang telah diuraikan di atas. Dalam banyak hal masih terdapat perbedaan-perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain dan satu pulau dengan pulau yang lain. Di pulau Seram misalnya, sistim kemasyarakatan orang alifuru yang dilembagakan adalah *kakehan*.

Pola pembentukan masyarakat dan struktur pemerintahan semacam di Maluku Tengah itu pernah ada pula di Maluku Tenggara, yaitu di Kepulauan Kei. Di dalam Sejarah Daerah Maluku, disebutkan bahwa sekitar permulaan abad XV muncul sebuah kerajaan yang mencoba mempersatukan negri-negri atau Ohoiratun-Ohoiratun di daerah itu yang kemudian disebut kerajaan Ohoiwur di Pulau Kei Kecil. Ada pula bentuk perserikatan yang menggabungkan negri-negri atau desa-desa ke dalam dua kelompok sosial

yaitu kelompok *Ursiu* atau *Siu-Ivak* dan kelompok *Lorlim* atau *Lim-itel*. Kesatuan-kesatuan sosial yang dapat disebut juga sebagai kesatuan politis dikepalai seorang *Raja* atau *Rat* atau *Orang Kaya* atau *Halaai*. Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu hidup berbagai norma. -

Norma yang merupakan faktor pengikat kesatuan hidup masyarakat adalah norma-norma adat. Norma-norma adat itu dapat menjamin hubungan antar anggota masyarakat sehingga berjalan dengan baik dan harmonis. Perserikatan atau persekutuan adat yang terdapat di Kepulauan Kei tersebut terdiri atas dua kelompok, yaitu Lorlim terdiri dari enam negeri (enam orang raja) yakni : 1) Raja Tuble, raja negeri Tual; 2) Jarbadan, raja negeri Tesoat; 3) Ibes, raja negeri Nerong; 4) Ramaf, raja negeri Fer; 5) Songli, raja negeri Rumat dan 6) Kirkes, yaitu raja negeri Ibra. Sementara Ursiu terdiri atas delapan raja dari delapan negeri (Raadschap), yaitu : 1) Ar Nuhu, raja negeri Danar; 2) Sakmas, raja negeri Wain; 3) Baldu, raja negeri Dulah; 4) Wahadat, raja negeri Ohoitahait; 5) Katel, raja negeri Ohoinangan; 6) Eckel raja negeri Jamtil; 7) Borman Somlain, raja negeri Watlaar; 8) Benar, raja Ohoilimwaf. Konsep semacam ini hampir sama dengan Pata Siwa dan Pata Lima di Maluku Tengah. Ada keseimbangan antara perhitungan 5 dan 9 dengan 6 dan 8 (delapan).

Struktur semacam ini muncul pula di desa-desa (negeri-negeri) yang lebih kecil, yang kepala desanya disebut orang kaya dan di bawah itu ada lagi bentuk serupa yang disebut kepala soa. Dengan demikian susunan di atas hampir sama dengan struktur pemerintahan adat di Maluku Tengah yaitu Uli, seperti yang sudah dikemukakan dalam sub bab 2.

Di antara wilayah-wilayah kesatuan politik tersebut ternyata terjalin hubungan kemasyarakatan dan kekerabatan yang harmonis, terutama pada kesatuan-kesatuan lebih kecil. Hubungan kemasyarakatan yang terjalin bukan saja merupakan suatu persekutuan yang tercipta atau terbentuk berdasarkan ikatan genealogis atau teritorial melainkan juga jauh di luar jangkauan itu, yakni berdasarkan perjanjian perdamaian dan kesepakatan yang dicapai setelah terjadinya suatu insiden (musibah) atau peperangan. Persekutuan yang terbentuk ini disebut *Taibet* atau *Teebel* yang mirip dengan lembaga adat *Pela* di Maluku Tengah. Persekutuan seperti itu (Taibet)

biasanya melibatkan dua atau tiga desa, karena diketahui mempunyai hubungan genealogis dari leluhur mereka. Taibet juga bisa terbentuk karena adanya perjanjian perdamaian sekaligus perjanjian persahabatan dan persaudaraan yang dikukuhkan dengan sumpah setia. Kemudian di dalam lembaga Taibet tersebut dilengkapi berbagai aturan adat dan sangsi-sangsi. Kedua belah pihak wajib memelihara aturan adat tersebut. Hubungan-hubungan semacam ini dapat ditingkatkan sampai ke hubungan perdagangan demi untuk mempertahankan kehidupan perekonomian.

Sistim kekerabatan yang dianut adalah patrilineal sehingga dalam pergaulan kekerabatan (range of kindship of affiliation) anak-anak lebih banyak bergaul dengan kerabat dari pihak ayah. Berdasarkan sistim kekerabatan patrilineal ini berkembanglah berbagai organisasi kesatuan hidup pada masyarakat Maluku Tenggara. Di Pulau Kei misalnya berkembang sistim kesatuan hidup yang dapat dilukiskan sebagai berikut :

- Rinrahan* adalah keluarga-keluarga batih patrilineal.
- Rahanyan* adalah clan-clan yang terbentuk karena adanya persatuan rinrahan.
- Ohoiratut* adalah organisasi/persekutuan, yang terbentuk karena adanya penggabungan dari beberapa clan.
- Lor atau Ur* adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa Ohoiratut.

Masuknya pengaruh-pengaruh dan nilai kebudayaan asing membawa perubahan pula dalam struktur masyarakat dan pemerintahan. Dalam ceritera rakyat setempat disebutkan bahwa telah datang ke Kepulauan Kei seorang tokoh ternama yang dianggap sebagai nenek moyang para pemimpin sesudahnya. Ia kemudian terkenal sebagai seorang raja dari negeri Ohoiwur (Kei Besar) dengan nama Tabtut. Ia dianggap sebagai tokoh peletak *hukum dasar* yang mengatur ketertiban masyarakat. Ia memperkenalkan suatu peraturan dasar yang disebut *Hukum Larwul Ngabal*.

Hukum tersebut berisi norma-norma yang mengatur kesusilaan, hak milik, soal-soal kepercayaan, kepemimpinan dan soal-soal kriminal seperti larangan perzinahan, pembunuhan, pencurian, fitnah dan sebagainya. Selanjutnya dalam hukum tersebut masyarakat dibagi dalam golongan-

golongan *kasta* yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Golongan masyarakat yang menduduki tingkat teratas disebut *Mel-mel*, golongan menengah disebut *Ren-ren*, dan golongan masyarakat biasa (bawah) disebut *Iri-ri*. Selanjutnya dalam hukum Larwul Ngabal itu, untuk melindungi hak milik perseorangan diciptakan tanda-tanda khusus atau lambang-lambang tertentu yang menyatakan larangan mengambil hak milik orang lain. Tanda-tanda atau lambang-lambang itu terbuat dari daun kelapa yang muda (*janur*) dan atau kayu, disebut *Balwarin*. Norma-norma tersebut selanjutnya dalam proses penerapannya disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat, sehingga akhirnya menjadi milik masyarakat Kei sampai sekarang ini.

Pembagian masyarakat atas kasta-kasta tersebut diduga berasal pula dari sistim agama Hindu yang masuk ke daerah ini bersama orang-orang Bali yang bermigrasi ke sana. Keadaan masyarakat seperti ini umumnya terdapat pada kesatuan-kesatuan hidup di negeri-negeri yang mempunyai keterikatan *genealogis* yang kuat. Meskipun terdapat lapisan-lapisan dalam masyarakat, mereka dapat hidup dalam suatu ikatan teritorial yang diperkuat pula oleh kepentingan sosial ekonomis yang sama. Kadang-kadang peperangan kecil bisa terjadi, karena timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan persekutuan, misalnya pelanggaran adat atau daerah (*petuanan*) persekutuan maka akan segera terjadi perselisihan-perselisihan yang menjurus kepada peperangan antar suku. Akan tetapi apabila peperangan itu reda maka hubungan antara kesatuan-kesatuan politis dapat meluas sampai jauh dari batas-batas ikatan *genealogis* dan teritorial. Hal itu dapat terjadi karena sebagian masyarakat Maluku masih mempercayai bahwa mereka berasal dari satu leluhur yang selalu mengawasi mereka. Apabila mereka melakukan kesalahan yang berulang maka mereka akan mendapat kutukan. Kepercayaan semacam itu masih hidup dalam sistem religi yang dimiliki masyarakat sampai sekarang.

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, cara berpikir penduduk Maluku sebagai makhluk manusia yang lain di dunia ini. Cara berfikir dan pandangan hidup mereka sangat tergantung pada sekitaran alam di mana mereka menggantungkan hidup. Timbulnya perasaan segan dan takut terhadap tantang-tantangan alam yang dihadapi mendorong mereka untuk

mencari dan menemukan rahasia di balik tantangan alam tadi. Penemuan-penemuan itu mendorong mereka untuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam, sehingga timbul sistem kepercayaan animistik dan dinamistik pada masyarakat. Sistem kepercayaan semacam itu, penduduk di Maluku menyebutnya sebagai *kepercayaan asli*. Kepercayaan asli yang dimaksud adalah kepercayaan animisme dan dinamisme tadi. Animisme, kepercayaan yang menganggap bahwa seluruh alam ini dihuni oleh roh atau jiwa, ada roh yang baik ada pula roh jahat. Roh yang dimaksud adalah roh nenek moyang. Upacara-upacara adat yang sekarang ini masih dilaksanakan menunjukkan adanya sistem kepercayaan itu. Dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, misalnya batu besar, pohon besar atau benda-benda pusaka. Selain itu ada pula kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap suci dan keramat karena dihuni roh-roh nenek moyang.

Penyembahan terhadap roh nenek moyang, di Ternate disebut *Gomangga*. Aturan-aturan yang diwarisi dari nenek moyang, sampai sekarang masih dipatuhi dan takut dilanggar karena dapat mendatangkan malapetaka. Berbagai bentuk roh jahat juga dikenal, antara lain *Hatemadubo*, *Meki* dan *Gonda*. Roh-roh jahat ini mendiami pohon-pohon, gunung dan goa. Disamping itu terdapat pula kepercayaan kepada roh tertinggi yang disebut *Gikirimoi* yaitu suatu pribadi tertinggi yang tidak kelihatan. Ia-lah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian kekuasaannya diserahkan kepada manusia pertama yang diciptakannya yang diyakini sebagai nenek moyang masyarakat Ternate yang selalu dipuja-puji. Di Tidore roh tertinggi itu disebut *Jou Wange* yang menurunkan kekuatannya kepada seseorang yang disebut *Momale*, yaitu orang yang menjalankan upacara-upacara adat. Upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Maluku hampir sama dengan upacara-upacara yang dilakukan penduduk di kepulauan Melanesia.

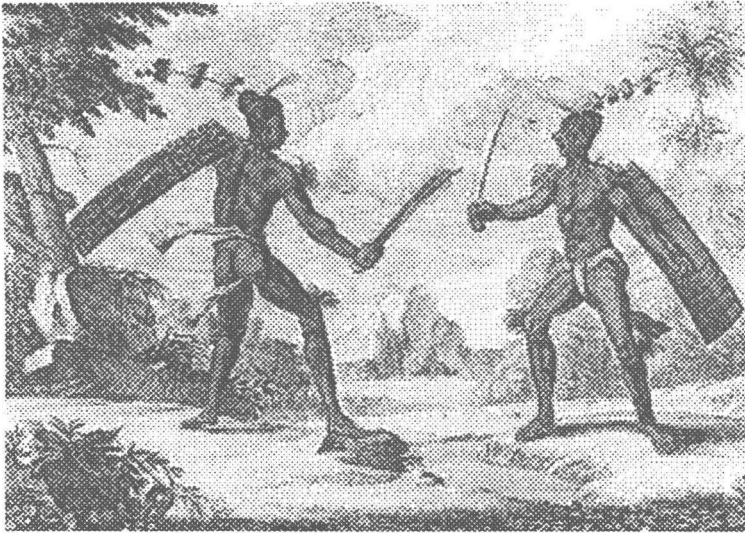


Foto 43. Upacara Adat

Di pulau Ambon pun sampai dewasa ini masih ada sisa kepercayaan seperti demikian. Misalnya; pemujaan terhadap Batu Marawael di desa Hatalae, pemujaan terhadap Tampayang Setan di gunung Sirimau, pemujaan terhadap Batu Teong di negeri-negeri Uri Meseng, pemujaan batu-batu pamali di rumah Baileo. Selain itu tempat-tempat keramat di desa-desa Pulau, Kabau dan Ruhumoni serta tempat-tempat tertentu di negeri-negeri lama yang terdapat di gunung-gunung memberi gambaran tentang adanya sisa kepercayaan animisme dan dinamisme. Tempat-tempat itu dipakai sebagai tempat bertemu dan berbicara dengan roh nenek moyang yang telah meninggal. Di situ terdapat kepercayaan akan kekuatan magis, misalnya mengobati orang sakit dengan *tiup-tiup*, pemakaian *Tali Kaeng* (ikat pinggang) sebagai jimat untuk menghindarkan diri dari mara bahaya, dan sebagainya. Namun kepercayaan akan adanya maha pencipta segala sesuatu di dunia ini, juga diyakini. Istilah yang digunakan adalah *Upu Lanite* atau *Upu Datu*.

Di kepulauan Kei kepercayaan animisme disebut dengan istilah *Ngu-Mat*, sedangkan dinamisme disebut *Wadar-Metu*. Kedua kekuatan masih

diyakini. Hal itu terlihat dari adanya bermacam-macam upacara adat dalam bentuk pemujaan kepada *Nit-Jamad-Ubud* (tete-nene moyang), *Ler Wuan* (matahari dan bulan), *Aiwarat* (pohon-pohon), *Aiwat* (batu-batu), *Rahanyam* (mata rumah), *Tun-Lair* (tanjung dan labuan), *Nuhu-Tanat* (gunung-tanah = bukit dan dataran), *Wama-kasal* (pusat negeri-desa), dan *Kabur-Hat* (kuburan). Di tempat-tempat tersebut masyarakat sering mengadakan upacara adat, dipimpin oleh *Metuduan* yang sama dengan *Mauweng* di Ambon dan Maluku Tengah. Di samping itu masyarakat mengenal benda-benda jimat untuk kekuatan diri terhadap senjata-senjata tajam disebut *Mamar*.

Sisa kepercayaan asli ini masih nampak di desa-desa di Maluku walaupun mereka telah menyatakan diri sebagai penganut agama Islam atau Kristen. Malahan terdapat campuran antara aturan dan nilai agama tersebut dengan aturan nilai kepercayaan asli yang dikenal dengan sinkritisme. Dalam sistem kepercayaan itu telah nampak adanya dualisme, yang terus berlanjut dalam perkembangan berbagai aspek budaya. Terutama di daerah Maluku Tengah yaitu di Ambon dan Lease. Pertama-tama antara penduduk yang masih berdiam di pedalaman atau gunung-gunung dengan penduduk di pesisiran; antara daerah-daerah yang telah mengenal budaya politik Belanda dan yang tidak sama sekali mengenal sistem pemerintahan Belanda; dan antara penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama Kristen. Namun demikian ternyata bahwa masyarakat yang serba dualis dalam soal budaya itu masih tetap bertahan sampai kini. Kekuasaan kolonial yang bercokol cukup lama di wilayah ini dan kemudian kekuasaan politik Republik Indonesia sejak tahun 1950 dan adanya lembaga *Pela* dan *Gandong* masih merupakan faktor-faktor yang bisa menjamin integrasi masyarakat.

3.3. Sistem Pemerintahan Adat di Negeri-negeri yang berpela

Daerah Maluku Tengah yang meliputi Kotamadya Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Buru dalam sistem pemerintahan negeri (desa) menurut adat-istiadat (hukum adat) pada masa lampau memiliki sesuatu yang unik. Sistem pemerintahan negeri yang

tercipta sejak tiga ratus tahun lampau yaitu ketika penduduk masih bermukim di bukit-bukit dan gunung-gunung di pindahkan oleh VOC ke pesisir pantai untuk membentuk negeri (desa).

Penduduk yang berpindah ke pesisir pantai itu bermusyawarah, dan hasil dari musyawarah itu ditetapkan antara lain :

1. Nama untuk negeri (aman) yang dipindahkan dari aman (hena) yang lama
2. Sistem pemerintahan negeri menurut hukum adat
3. Wilayah petuanan (ulayat negeri)
4. Famili atau mata rumah yang menjadi kepala pemerintahan negeri yang akan disebut Upu Latu dan lain-lain.

Adat-istiadat atau hukum adat yang ditetapkan tersebut setelah berlangsung ratusan tahun diformalkan dalam Staatsblad 1824 No. 19A tentang Reglement Kaparentahan Benoa Ambon. (Ohorella, M.G. : 2000).

Sistem pemerintahan negeri menurut hukum adat serta pranata dan lembaga adat yang mengatur kehidupan dan penghidupan dalam negeri di daerah Maluku Tengah itu adalah sebagai berikut :

- a. *Upu Latu* dari negeri atau desa baik lelaki atau perempuan adalah orang terpilih dari mata rumah (marga) yang memerintah dan diangkat menjadi *Regen* dengan gelar adat Raja, Pati atau Orang Kaya.
- b. *Saniri Raja Pati* ialah badan yang menyelenggarakan pemerintahan negeri sehari-hari terdiri dari Upu Latu dan para pembantunya yaitu para Kepala Soa sebanyak enam orang. Mereka bertugas dan berfungsi pula sebagai hakim perdamaian negeri karena itu disebut Makemat Raja Pati.
- c. *Saniri Negeri* ialah badan musyawarah negeri yang terdiri atas Upu Latu, Saniri Raja Pati, Tetua Adat Negeri, mereka yang diangkat menurut adat istiadat/hukum adat dan mereka yang dipilih dari rakyat biasa. Badan ini biasanya terdiri dari delapan sampai lima belas orang. Fungsinya ialah membuat dan mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan, memusyawarahkan masalah-masalah yang

menyangkut kepentingan negeri serta menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan negeri/desa.

- d. **Kasisi**, suatu istilah dari Arab yang digunakan untuk menyebut mereka yang menjabat penghulu agama di negeri-negeri (desa-desa) yang beragama Islam, seperti Imam, Khatib, Modim dan sebagainya.
- e. **Tuagama**, suatu istilah dari Melayu Ambon untuk menyebut tetua atau orang tua-tua negeri yang bertugas membantu seorang guru (pendeta) di negeri-negeri yang beragama Kristen.
- f. **Kewang**, adalah semacam korps polisi negeri atau desa, dipilih dan diangkat dalam suatu rapat saniri besar atau musyawarah negeri lengkap. Mereka bertugas memeriksa, mengawasi, mengamankan, mengayomi petuanan (ulayat negeri) meliputi daratan (tanah) dan perairan (laut) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk kehidupan dan penghidupan penduduk serta mengusahakan penataan terhadap pranata *adat sasi* (menangkap, mengadili dan menghukum para pelanggar).



Foto 44. Para Kewang yang dipimpin Latu Kewano dalam upacara mulai menutup sasi di Baileo negeri Nolot.

- g. *Sasi*, adalah seluruh ketentuan dan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengatur kehidupan dan penghidupan di dalam sebuah negeri/desa, yang mengandung suruhan dan larangan selama suatu jangka waktu tertentu (3 bulan atau 6 bulan) bagi penduduk negeri/desa termasuk penduduk negeri/desa lain, serta memuat sanksi berupa ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar pranata adat sasi. Pranata adat sasi ini mempunyai peranan sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup termasuk perekonomian negeri.
- h. *Marinyo*, istilah dari bahasa Portugis berarti pesuruh negeri. Ia bertugas menyampaikan perintah dan atau pemberitahuan dari Upu Latu (Raja) kepada penduduk negeri.
- i. *Pela dan Gandong*, diartikan sebagai suatu sistem persekutuan yang didasarkan pada perjanjian bersama antara dua atau lebih negeri yang terletak pada satu pulau atau pulau yang berbeda. Mereka para leluhur yang membuat perjanjian itu memfiksikan bahwa mereka seakan-akan dilahirkan dari satu rahim (gandong) ibu sehingga mereka hidup bersaudara sebagai adik dan kakak dalam hal tolong menolong satu sama lain dan sebagainya. Pela dan gandong semacam ini telah dipelihara dengan baik oleh sementara orang atau kelompok negeri-negeri yang memiliki hubungan tersebut.

Sistem pemerintahan negeri yang didasarkan pada adat-istiadat/hukum adat yang sudah diformalkan dengan Staatsblad 1820 No. 19 A itu memegang peranan penting dalam kehidupan rakyat pada negeri-negeri di daerah Maluku Tengah. Sistem pemerintahan tersebut dapat dikatakan dewasa ini telah rusak dan dihilangkan pada masa orde baru dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sehingga orang Ambon dapat dikatakan kehilangan kebudayaannya yang membawa akibat lebih jauh yaitu kehilangan identitas dan rasa harga diri sebagai orang Ambon (Maluku). Kerusakan dan kehilangan kebudayaan itu, menyangkut sistem pemerintahan negeri, diantaranya adalah :

1. Kata *negeri* yang berasal dari bahasa Melayu dan dikenal rakyat sejak tiga abad lampau telah diganti dengan istilah desa yang merupakan barang baru (asing) di telinga orang Ambon.

2. Kepala negeri/desa yang dahulu disebut Upu Latu dengan gelar Bapa Raja, Pati atau Orang Kaya diganti dengan Kepala Desa (Kades). Dahulu seharusnya dipilih dan diangkat dari keturunan bangsawan sering diabaikan dengan memilih dan mengangkat mereka yang berasal dari mantan anggota ABRI/Polri, Birokrat dan sebagainya. Akibatnya kepala desa ini tidak memiliki kharisma sebagai tokoh adat yang disegani dan dipatuhi perintahnya oleh penduduk negeri/desa.
3. Saniri Rajapatih, yang merupakan badan pemerintahan harian negeri/desa, terdiri dari : Upu Latu atau Regen (gelar adat: raja, patih atau orang kaya) dan para pembantunya yaitu para Kepala Soa (setiap kepala soa mewakili marga/famili inti dari negeri/desa), sama sekali telah dihilangkan, dan hanya dikenal namanya saja oleh penduduk negeri/desa. Akibatnya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menjadi perangkat pemerintah desa sekarang ini, yang didasarkan pada Undang – Undang No.5 tahun 1979, kewalahan menangani permasalahan – permasalahan yang dihadapi desa setiap hari, misalnya : menjalankan pemerintahan desa sehari – hari, penyelesaian sengketa – sengketa tanah dan warisan, upaya mensejahterakan rakyat desa dan lain – lainnya.
4. Jika suatu ketika, Upu Latu atau Regen meninggal dunia, atau berhalangan tetap (misalnya : sakit berkepanjangan) maka sistem pemerintahan negeri menurut adat istiadat/hukum adat, Upu Latu atau Regen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap itu, harus diganti oleh Kepala Soa yang tertua usianya dari para Kepala Soa yang duduk dalam Saniri Rajapatih. Hal ini telah pula dihilangkan dan tugas tersebut digantikan oleh Camat (selama Kepala Desa baru belum terpilih dan dilantik). Akibatnya, penduduk negeri/desa tidak taat pada Camat yang merangkap Kepala Desa, sehingga seringkali menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam negeri /desa. Alasan penduduk ialah bahwa dalam hal tersebut Camat dapat saja mewakili pemerintah Daerah/Pusat, akan tetapi tidak dapat mewakili masyarakat hukum adat “negeri”.

5. Saniri Negeri yang anggotanya berjumlah antara 8 – 15 orang, yang diangkat lebih banyak dari tokoh – tokoh/tetua adat, kini telah diganti dengan Lembaga Musyawarah Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD/LKMD) yang anggotanya diangkat dari golongan fungsional di desa, seperti : ketua koperasi, guru – guru sekolah, purnawirawan ABRI/POLRI, pensiunan birokrat, pengusaha, ketua kelompok tani, ketua kelompok nelayan dan lain – lain. Akibatnya, dalam musyawarah LMD/LKMD di desa, lebih banyak masalah politik dibicarakan daripada kemakmuran dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi topik perbincangan dan pelaksanaannya.
6. Kasisi, dinegeri / desa beragama Islam, boleh dikatakan tetap seperti keadaan dahulu, hanya saja untuk menduduki jabatan – jabatan Imam, Khotib, Modim, kadang – kadang Kepala Desa mengangkat mereka sesuai dengan seleranya, tanpa menghiraukan aspirasi penduduk, sehingga bertentangan dengan adat istiadat / hukum adat. Akibatnya, terjadi ketidak harmonisan hidup dari penduduk di dalam negeri / desa, sehingga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat hukum adat “negeri” menjadi terganggu.
7. Tuagama, yaitu tetua adat di negeri/desa beragama Kristen, yang bertugas membantu seorang guru (pendeta), dalam melaksanakan tugasnya memadukan unsur agama dan unsur adat istiadat/hukum adat. Sekarang ini tugas ini telah diambil alih oleh seorang pendeta yang berpendidikan modern, yang kurang memperhatikan unsur adat istiadat/hukum adat. Akibatnya, jika timbul konflik dalam kehidupan masyarakat, penyelesaiannya tidak digunakan pendekatan melalui adat istiadat/hukum adat, yang selalu mengutamakan kebersamaan, keharmonisan dan kedamaian.
8. Marinyo sebagai penyampai berita atau pesuruh negeri guna menyampaikan perintah dan pemberitahuan kepada penduduk, sejak masa Orde Baru sudah dihilangkan. Padahal, jabatan marinyo ini sangat efektif dalam hal menyampaikan berbagai informasi kepada penduduk, baik informasi itu berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah negeri (Raja) sebagai

pemimpin masyarakat hukum adat negeri. Akibatnya, penduduk kehilangan komunikasi dengan kepala pemerintah negeri/desa sebagai kepala adatnya, sehingga sering terjadi mis-komunikasi, yang pada akhirnya menimbulkan rasa antipati.

9. Kewang sebagai lembaga adat, pada masa lampau sangat efektif untuk memberdayakan penduduk negeri/desa. Baik kaum lelaki terutama para pemuda maupun kaum perempuan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dari sebuah negeri maupun antar negeri/desa bertetangga. Lembaga adat ini, memegang peranan penting dalam memberdayakan kaum lelaki dan para pemuda Ambon (Maluku) menjadi lebih produktif. Dengan mengoperasionalkan lembaga adat ini, pada masa lampau daerah Maluku Tengah terkenal sebagai daerah penghasil komoditi rempah – rempah yang bermutu di dunia Internasional. Namun dewasa ini, lembaga adat Kewang, sejalan dengan pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru, hanya dikenal namanya saja, sedangkan operasional dari lembaga adat ini hampir tidak ditemukan lagi pada negeri – negeri/desa - desa di Ambon maupun di Maluku umumnya. Akibatnya, apabila terjadi konflik antar penduduk dalam sebuah negeri atau desa, atau antar penduduk negeri bertetangga seperti kerusakan yang terjadi di Ambon dan Maluku sekarang ini. Hal tersebut tidak dapat lagi diredam oleh lembaga adat Kewang sesuai fungsinya yaitu menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian karena lembaga adat tersebut sudah dihilangkan/ditinggalkan. Akibat lain, ialah kaum lelaki terutama para pemuda yang terkenal malas dan enggan bekerja, tidak dapat diberdayakan melalui lembaga adat Kewang, dibandingkan dengan para pendatang seperti orang- orang Bugis, Buton dan Makassar yang rajin, bekerja keras, ulet dan hemat sehingga terjadi kesenjangan sosial.
10. Sasi sebagai keseluruhan ketentuan dan norma – norma hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang mengatur kehidupan dan penghidupan dalam sebuah negeri/desa, dan berfungsi melestarikan lingkungan hidup (petuanan) negeri/desa, mengalami pula hal yang sama seperti lembaga adat Kewang, telah pula ditinggalkan. Sebenarnya pranata

adat sasi ini sangat penting dan berguna untuk mendidik penduduk negeri/desa supaya taat dan tunduk pada hukum dan melaksanakannya. Namun akibatnya pranata adat ini dihilangkan/ditinggalkan, maka ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam sebuah negeri/desa tidak terjamin lagi.

3.4. Pela, Gandong dan Siwalima

Tentang asal-usul terbentuknya *pela* dan *gandong* ada beberapa versi. Menurut cerita turun temurun yang beredar di dalam masyarakat Ambon, terbentuknya hubungan Pela sudah sejak ratusan tahun yang lalu sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat. Yaitu ketika orang-orang Ambon dan Lease masih mendiami pulau Seram sebagai masyarakat Alifuru. Dalam kehidupan masyarakat Alifuru di pulau Seram, budaya *Pela* berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat *kakehan*. *Kakehan* adalah kelompok kecil masyarakat adat di dalam masyarakat Alifuru baik pada suku Alune maupun suku Wemale di pulau Seram. Dalam kelompok *kakehan* ini ikatan persaudaraan sangat kuatnya dan merupakan “harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar”. (Tamaela, 1999). Artinya di dalam keadaan bagaimanapun dan situasi apapun persatuan persahabatan tidak boleh luntur. Misalnya harus membela sesama anggota baik dalam keadaan benar atau salah sekalipun. Juga dalam membantu sahabat untuk mengayau atau membangun rumahnya.

Pendapat seperti itu dikemukakan pula oleh seorang peneliti Belanda yaitu Dieter Bartels. Dalam suatu penelitian ilmiah yang dilakukan Bartels, ia berpendapat bahwa Pela telah ada sebelum datangnya orang Portugis di abad ke-16. Bentuk-bentuk Pela yang pertama terdapat di kalangan masyarakat pengayau yaitu orang atau suku Alifuru. Mereka memerlukan bentuk kerjasama ini untuk melaksanakan pengayauan dengan baik. Kemudian bentuk kerjasama ini berkembang dalam perang-perang antar suku. Bentuk kerjasama serupa kemudian tumbuh dan berkembang pula di pulau Ambon dan pulau-pulau Lease dengan nilai yang lebih positif. Seiring dengan perpindahan penduduk dari pulau Seram ke pulau-pulau kecil yang ada di selatan, bentuk ini kemudian berguna dalam perdagangan maupun perang melawan penjajah.

Pada masa kejayaan kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, kerajaan-kerajaan ini selalu bersaing untuk memperluas kekuasaannya ke selatan. Mereka berusaha menaklukkan orang dan daerah di sekitar pulau Seram. Hal ini mengakibatkan tekanan pada masyarakat sehingga terjadilah ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran orang Portugis dan Belanda antara kurun waktu 1512-1656. Kekejaman penjajah mendorong benih-benih Pela semakin tumbuh dan berkembang ke pulau Ambon dan Lease. Banyak negeri-negeri (desa) menjalin hubungan mengikrarkan persahabatan untuk saling membantu menghadapi kekuatan asing dari luar itu. Upacara pengikraran Pela dan Gandong ini dilaksanakan dalam ritus adat dan agama penyembahan nenek moyang (leluhur) yang berdasarkan dinamisme dan animisme. Pembentukannya selalu disertai dengan sumpah yang diucapkan dalam bahasa lokal atau bahasa tanah. Di kemudian hari ritus ini tetap diikuti oleh masyarakat/kelompok yang sudah menganut agama baik Islam maupun Kristen. Ritual yang dilakukan dipisahkan antara ritus adat dan ritus agama. Biasanya setelah menyelesaikan ritus adat, para anggota lalu menuju ke mesjid atau gereja untuk melaksanakan ritus menurut keyakinan agamanya. Dengan demikian, dimaksudkan supaya ikrar dan sumpah persaudaraan ini direstui dan syah secara adat maupun agama. Sebagai contoh negeri Hunitetu dan Lohiatala mengadakan hubungan Pela mereka mengikrarkan sumpah sebagai berikut :. (Dieter Bartels dalam Leirissa: 1999).

Ooo! tunai-lasatale, pulane, leamatai, Tuwale, Babike, lanite, tapele, selu jami, ooo! ... kinu kwate kai Lohitalaoo ... kinu kwate kurele, pela jurule; saka mimise, noa mimise, lesi kena lumaio, sapu kena lumaio.

Ooo! saa marelo tetu matau; saa malau soa tetu peisoa, iane kete matau; timule keru matao; halate likio matao. Mata sakalele pelene.

Kinu kwate kurele, pela kurele; saka mimise, noa mimise, saka nunu rupu kena patu, patu rupu kena nunuee, nunu pali tolase, tolase pali nunuee, hioooo.....!

Terjemahan bebasnya adalah :

Oh, yang maha kuasa, bulan dan matahari, Babike dan Tuwale, langit dan bumi, pandanglah kami ooo...!, kami sedang minum air sumpahan dengan Lohiatala, suatu sumpah yang abadi, sumpah yang kuat.

Perhatikanlah dan ingatlah baik-baik agar tidak menjadi marah dan bertengkar antara sesama.

(Bila tidak dilaksanakan, maka kalau) kau ingin memanjat pohon untuk menangkap kusu maka kau akan jatuh ke tanah, atau lebah akan menyengatmu sampai mati; kau akan mati ketika memakan sagumu yang masih hangat, kau akan mati ketika memakan pinang, di laut kau akan jatuh dari perahumu ke laut dan ditelan ikan; kau akan mati ketika angin timur berhembus dan kau akan mati ketika angin barat menghembus, mati bagaikan kunang-kunang.

Kami sedang minum sebuah sumpah yang abadi, sumpah yang kuat; waspadalah, jangan lupa; (kita akan menjadi satu sekuat) pohon beringin dan batu karang, bagaikan batu karang dan pohon beringin, bagaikan pohon tolase yang bertumbuh bersama pohon beringin, hioooo.....!.

Hubungan dan perjanjian pela semacam ini pada masa pemerintahan Belanda dipandang sebagai usaha masyarakat pribumi untuk menggalang persatuan dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Kegiatan semacam itu dianggap sebagai gangguan dan ancaman dari luar. (Holleman, J. Tamaela : 1999). Dengan anggapan demikian, rakyat di desa-desa semakin merapatkan barisan dan bersatu padu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pela dan Gandong tumbuh subur untuk menghadapi tantangan bersama. Hubungan itu terus menguat sebagai landasan budaya dan jatidiri orang Ambon. Terutama pada era penjajahan tersebut dan terus dipelihara sampai kini sudah berabad-abad lamanya. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa Pela dan Gandong telah menjembatani persaudaraan umat Islam dan umat Kristiani sejak dahulu adalah suatu kenyataan sejarah dan fakta yang tidak dapat dibantah. Meskipun hubungan itu hanya antara dua negeri

saja, atau satu negeri dengan dua atau tiga buah negeri lainnya.

Gandong merupakan hubungan persaudaraan yang berdasarkan genealogis yang diwariskan oleh para leluhur atau para moyang dari negeri-negeri yang memiliki hubungan persaudaraan. Hal itu seperti terjadi pada penduduk pulau Nusalaut dan penduduk pulau Ambalau. Dahulu moyang penduduk kedua pulau itu bersaudara (kakak-beradik) tinggal di sebuah pulau. Suatu peristiwa psikologis, politik dan alam pernah terjadi. Akibatnya kedua orang itu berpisah. Begitu juga tempat tinggalnya, terpisah. Keturunan mereka kini mendiami kedua pulau itu yang terpisah jauh. Pulau Ambalau penduduknya beragama Islam sedang pulau Nusalaut penduduknya beragama Kristen. Masing-masing terdiri atas 7 (tujuh) buah negeri. Di pulau Nusalaut adalah negeri-negeri : Titawai, Amet, Acon, Abubu, Sila, Leinitu dan Nalahia sedang pulau Ambalau negeri-negerinya adalah Ulima, Kampung Baru, Masawoy, Elara, Selasih, Wailua dan Lumoi.

Di pihak lain ada pendapat yang dikemukakan para ahli sejarah bahwa dari penelitian ilmiah yang mereka lakukan ternyata memberi gambaran yang berbeda. Bahwa masyarakat Kristen dan Islam sejak berabad-abad yang lampau saling memisahkan diri.

Dalam keadaan seperti itu institusi pela dan gandong diciptakan dalam upaya untuk menyediakan forum agar masyarakat yang *segregatif* itu bisa bekerjasama untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

BAB IV

PERANAN DAN FUNGSI PELA

4.1. Pengertian Pela pada Orang Ambon

Orang Ambon adalah orang-orang yang secara geografis menempati atau berada di pulau Ambon, pulau-pulau Lease yaitu Haruku, Saparua dan Nusalaut serta pulau Seram bagian barat. Kepulauan ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Jadi mereka yang merasa sebagai orang Ambon adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tersebut, yang secara kultural adalah orang-orang yang menempati zone sub kultural Maluku Tengah.

Secara tradisional orang Ambon lekat dengan budaya pela, bahkan budaya pela itu disebut-sebut sebagai jatidiri orang Ambon. Sejak ratusan tahun lalu menjadi warisan budaya leluhur dan merupakan ikatan persatuan yang sakral. Apabila diantara dua orang atau dua kelompok orang atau dua desa menyebut satu sama lain dengan pela maka mereka adalah dua sahabat karib yang sangat erat. Sekalipun di dalam sejarah yang ilmiah memberi gambaran bahwa masyarakat Kristen dan Islam sejak berabad-abad yang lampau saling memisahkan diri satu sama lainnya tidak pernah hidup bersama-sama. Desa-desa atau negeri-negeri di Ambon-Lease masing-masing berdiri sendiri terlepas satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu tatanan supra desa yang menyatukannya seperti institusi kerajaan di Maluku Utara. Namun demikian masyarakat negeri-negeri Kristen dan Islam itu justru hidup berdampingan dalam hubungan dan ikatan pela dan gandong. Mereka saling membantu, tolong-menolong baik dalam susah maupun senang. Itulah arti pela bagi orang Ambon.

Secara ilmiah memang agak sulit menjelaskan arti kata pela karena demikian banyak pendapat yang beredar sekarang belum disaring melalui penelitian yang mendalam. Dieter Bartels yang pernah mengadakan penelitian lapangan di Maluku Tengah, menyebutkan bahwa kata pela pada umumnya dianggap berasal dari salah satu bahasa-bahasa lokal di Maluku Tengah. Dalam bahasa Melayu Ambon yang digunakan di zaman sekarang, artinya adalah persahabatan, persekutuan, konfederasi, liga, atau

persaudaraan. Namun kata itu hampir selalu digunakan untuk mengacu sistem aliansi antar negeri yang tradisional di Maluku Tengah. (Bartels, 1977: dalam Leirissa, 1999).

Demikian pula tidak mudah menentukan dengan pasti asal-usul dan sejak kapan institusi ini telah ada dalam masyarakat Maluku Tengah. Meskipun Bartels juga mengatakan institusi ini sudah terbentuk jauh sebelum masa kolonial. Menurut Stesemen, kata *pela* berasal dari kata *pilatu* yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah bilamana mereka mendinding rumah dengan atap maka atap itu di-*pilatu* supaya rapi kuat dan tidak mudah bergerak atau hancur oleh tiupan angin. (Stesemen, 1927, J. Tamaela : 1999). Jadi kata *pilatu* ini artinya menjepit, mengikat erat-erat untuk mempersatukan, memperkuat, memperkokoh. Dengan demikian penyatuan itu benar-benar kokoh, dan tahan terhadap segala keadaan atau bantingan. Selanjutnya para ahli hukum adat mendefinisikan *pela* sebagai suatu ikatan persaudaraan yang terjadi akibat suatu ikrar antara satu negeri (desa) dengan negeri (desa) yang lain. Persaudaraan yang terjalin tersebut tidak memiliki ikatan genealogis (darah atau keturunan), tanpa melihat agama yang dianut dan status sosial masyarakatnya. *Pela* juga merupakan institusi dari serangkaian upacara sakral dengan nilai serta aturan dan konsekuensi yang terjadi apabila tidak dipatuhi.

Dengan demikian maka *pela* sesungguhnya adalah ikatan atau aliansi antara dua negeri atau dua buah pemukiman. Menurut Bartels bentuk aliansi seperti itu bisa terdapat di setiap masyarakat di luar Ambon dan Maluku Tengah. Aliansi atau ikatan yang sudah melembaga itu sebagai ciri utamanya adalah bentuk kerjasama yang melampaui batas-batas agama yang demikian berbeda yaitu antara Islam dan Kristen. Sehingga *pela* barangkali merupakan satu-satunya sistem pengaturan interaksi antara orang-orang yang berlainan agama itu dan jauh melampaui hubungan-hubungan kekeluargaan yang ada di wilayah lain di Indonesia.

Pada umumnya ikatan *pela* menyangkut dua buah negeri. Namun setiap negeri bisa mengadakan hubungan *pela* dengan sejumlah negeri lain. Akan tetapi tidak pernah ada suatu sistem *pela* yang menyangkut seluruh *pela* yang dimiliki suatu negeri. Jadi hubungan *pela* selalu hanya antara

dua negeri saja. Hubungan pela itu bisa dilakukan atau terjalin antara dua negeri yang sama-sama beragama Kristen, sama-sama beragama Islam, bahkan antara dua negeri yang berbeda agama. Negeri yang satunya beragama Islam dan yang lain beragama Kristen. Pela juga dapat terjalin antara negeri-negeri yang terletak di pulau-pulau yang berbeda dan jauh. Jadi pela dapat dinilai sebagai suatu lembaga atau institusi yang paling penting yang dapat mengintegrasikan masyarakat Ambon di atas tahapan ikatan desa ataupun ikatan Uli. Pela dianggap sebagai hubungan persaudaraan yang abadi. Dahulu, pembentukan pela dan kemudian sekarang ini panas pela, disertai ritual-ritual dan sumpah sakral. Konsepsi utama yang mendasari pela adalah :

- negeri-negeri yang berpela saling membantu dalam masa krisis misalnya pada waktu perang atau bencana alam.
- Negeri-negeri yang berpela harus membantu melaksanakan proyek kemasyarakatan yang besar, apabila diminta oleh negeri pelanya.
- Bila anggota sepela mengunjungi negeri pelanya ia harus diberi makan.
- Ada anggota-anggota negeri-negeri yang berpela dianggap sedarah-daging sehingga perkawinan antara anggota sepela sangat dilarang (dianggap sebagai incest).

Setiap pelanggaran atas aturan-aturan pela itu dapat terkena sangsi atau hukuman berat, terutama dari para leluhur (*upu-ama*) yang diyakini ikut mendengar ikrar mereka. Pela itu sendiri dapat dibedakan atas, *pela keras*, *pela batu karang* (*pela tune/pela tuni*) dan *pela tanpa sirih* (*tempat sirih*).

Pela keras atau *pela tuni* memiliki hubungan yang sangat kuat yang dipandang sebagai bentuk pela yang autentik, asli dan orisinil. Pembentukan pela tuni pada zaman dahulu, biasanya ditandai dengan acara minum darah. Konon tetesan darah dari *ibu jari* para pemimpin adat negeri-negeri yang mengadakan perjanjian mengangkat pela, dicampur dengan tuak (*sopi*) atau ditetaskan ke dalam air pada suatu wadah untuk kemudian diminum bersama-sama. Melalui acara yang dianggap sakral ini seakan mereka telah berikrar bahwa mereka adalah bersaudara, sehingga masing-masing

berkewajiban untuk saling membantu, menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Itulah sebabnya pela ini disebut juga *pela darah*, dan tidak memperkenankan adanya ikatan perkawinan antara anggota se pela.

Salah satu bentuk *pela tuni (pela keras)* atau *pela darah* yang cukup terkenal adalah *pela batu karang*. Dalam Sarasehan Kebudayaan Maluku, John Tamaela mengungkapkan bahwa pela bentuk ini merupakan hubungan persatuan (*pela*) dalam wujud bantu-membantu pada saat peperangan khususnya bantuan material seperti bahan makanan serta tenaga dan senjata. Pela batu karang ini sangat menonjol sepanjang periode Hongi-Tochten. (Tamaela : 1999). Setiap negeri yang berpela saling membantu dalam mengirim armada (*kora-kora*) atau tenaga pendayung untuk ekspedisi pelayaran Hongi Tochten yang diciptakan Belanda.

Akan halnya *pela tampa sirih (tempat sirih)*, dibentuk berdasarkan dimana ikrar persatuan dan persahabatan itu dicetuskan oleh para pemimpin negeri. Hubungan pela ini berbasiskan tempat sirih sebagai wadah adat yang sakral. Para pemimpin adat kedua negeri bersumpah setia kemudian memakan sirih pinang secara bersama-sama. Seperti halnya pela tuni, anggota pela tempat sirih juga memiliki kewajiban untuk saling membantu dan bergotong-royong dalam berbagai hal. Misalnya membangun balai desa (*baileu*), gereja, mesjid, sekolah dan lain-lain. Namun dalam hal perkawinan, tidak ada larangan untuk menikah antara sesama anggota sepela seperti di dalam hubungan pela darah (*pela keras*).

Selain pela, budaya masyarakat Ambon juga mengenal hubungan *Gandong*, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai saudara sekandung. Gandong adalah ikatan persaudaraan, karena hubungan genealogis atau pertalian darah antara satu negeri dengan negeri yang lain yang terpisah karena adanya suatu peristiwa historis. Artinya, secara genealogis, para leluhur negeri-negeri tersebut pernah bersaudara. Akan tetapi karena pengaruh masuknya bangsa asing, ada diantaranya yang memeluk agama Nasrani, tetapi ada pula yang memeluk agama Islam. Agar tidak dipisahkan oleh perbedaan agama yang mereka anut, maka diikrarkanlah ikatan gandong ini. Itulah sebabnya, gandong juga tidak memperkenankan adanya ikatan perkawinan antar anggotanya. Ada yang menyapa anggota gandongnya dengan gandong saja, dan ada pula yang

saling menyapa dengan menyebut *adik* dan *kakak*. Tergantung pihak mana yang dianggap kakak dan pihak mana yang dianggap adik. Ada pula yang menyapa anggota gandongnya dengan *bongso*. Hubungan mereka ini dahulu sangat harmonis.

4.2. Negeri-Negeri yang Berpela

Penelitian Stresseman dan Bartels yang diungkapkan Prof. Leirissa cukup menjelaskan secara ilmiah, lembaga pela yang mengatur integrasi masyarakat Ambon di Maluku Tengah itu. Selain ada hubungan (pela) antara dua negeri atau dua pemukiman yang antara lain bertujuan saling membantu dalam perang, terdapat pula pela antara rumah tau (mata rumah) atau clan-clan tertentu. Negeri-negeri yang berpela yang bertujuan untuk membantu dalam perang misalnya dahulu di Seram antara negeri Loiatala dan Hunitetu, antara Ahilo dan Sanahu, antara Samasuru dan Paulohi, dan antara Makariki dan Saleman. (Leirissa : loc.cit.).

Pela di antara negeri-negeri yang berlainan agama umpamanya antara Hatuhaha (negeri Islam) dan Tuhaha (Kristen); antara Hatuhaha (Islam) dan negeri Oma (Kristen); antara Werinama (Islam) dengan Kilang (Kristen); antara Iha (Islam) dan Samasuru (Kristen); antara Ihaluhu (Islam) dan Ihamahu (Kristen); antara Wakasihi (Islam) dan Etti (Kristen); antara Hattu (Kristen) dan Wakasihi (Islam); antara Negeri Lima (Islam) dan Hattu (Kristen); antara Passo (Kristen) dan Batumerah (Islam); antara Laha (Islam) dan Amahusu (Kristen); antara Pelau (Islam) dan Titawai (Kristen); antara Waai (Kristen) dan Morella (Islam); antara Tulehu (Islam) dan Paperu (Kristen); antara Asilulu (Islam) dan Tiou (Kristen); antara Seith (Islam) dan Oou (Kristen); antara Ureng (Islam) dan Liliboi (Kristen); antara Luhu (Islam) dan Ihamahu (Kristen) dan masih banyak lagi. Sementara itu pela antara clan-clan tertentu misalnya antara Wairisal dan Manusama, antara Salaruane dan Purimahua, dan antara Tuhuteru dan Manuputty.

Selain menjalin hubungan persaudaraan dan persahabatan, lembaga pela juga merupakan wadah pemeliharaan bahasa-bahasa tanah. Sebab di beberapa negeri yang dahulu kala mempunyai bahasa yang sama, dalam

perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan kata maupun kalimat. Bahkan ada pula negeri-negeri atau desa-desa yang sejak berkenalan dengan budaya politik Belanda, bahasa tanahnya hampir tidak pernah digunakan lagi terutama di negeri penganut agama Kristen. Generasi berikutnya dapat dikatakan tidak mengetahui lagi bahasa daerah atau bahasa tanahnya. Bahasa tanah hanya digunakan dalam upacara-upacara tradisional semacam panas pela atau upacara-upacara desa/negeri. Pada upacara-upacara tersebut, desa-desa yang berpela saling mengunjungi baik atas dasar diminta atau pun tidak. Dalam upacara yang diadakan oleh suatu negeri yang dihadiri negeri-negeri sepelanya, biasanya menggunakan bahasa tanah. Di arena-arena seperti itu pula para anggota sepele yang lebih muda dapat mendengarkan dan menyimak sekaligus mempelajari bahasa tanah yang belum mereka ketahui itu.

Budaya pela dan gandong memang telah menjadi warisan sejarah dan adat di Maluku terutama orang Ambon. Bila kedua istilah itu dipadukan menjadi *pela gandong* pengertiannya pun akan lebih kukuh. Kalau dirumuskan maka pengertiannya akan menjadi “satu ikatan persaudaraan yang kuat, jujur, tulus, saling mengasihi dan saling tolong menolong antara sesama”. Di dalamnya tentu akan mencerminkan persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, harga-menghargai disertai kemanusiaan yang santun dan beradab. Pencerminkan seperti itu akan terlihat pada berbagai acara yang dilaksanakan antara negeri-negeri yang *berpela*, *bergandong* dan negeri-negeri yang *berpela gandong*.

Negeri Batumerah yang terletak di dekat Kota Ambon berpela dengan Negeri Passo kurang lebih 15 km di utaranya. Ketika upacara peletakan *kubah kecil/kepala mesjid* Batumerah, kubah tersebut sebelumnya diarak keliling negri (desa). Upacara itu diikuti oleh para tokoh adat dan tokoh agama kedua negeri, kemudian bersama-sama mereka menuju Mesjid untuk menaikkan kubah tersebut ke tempatnya oleh rakyat kedua negeri. Orang Passo mengangkat kubah mesjid itu dari sebelah kiri dan orang Batumerah mengangkatnya di sebelah kanan. Upacara ini adalah upacara lanjutan pembangunan mesjid tersebut. Beberapa waktu sebelum itu, pembangunan Mesjid “An-Nur” Batu Merah telah melibatkan saudara, pela dan gandong negeri tersebut. Negeri Laha bersaudara dengan negeri Batumerah, sedang

negeri Hative Besar dan Ema berpela gandong dengan Batumerah. Itu sebabnya empat tiang utama dalam Mesjid An-Nur adalah masing-masing sumbangan dari : Negeri Laha, Negeri Hative Besar, Negeri Ema; dan Batumerah hanya menanggung satu tiang saja. Sementara upacara peletakan kepala mesjid itu tentu sarat dengan bantuan dari Negeri Passo yang berpela dengan negeri Batumerah. Pada kesempatan-kesempatan seperti itu pula diungkapkan asal-muasal terjalannya hubungan persaudaraan (pela) antara kedua negeri.

Tersebutlah ceritera ketika Batumerah dan Passo berikrar pela kira-kira tahun 1500-an; perahu (kora-kora) kedua negeri itu berpapasan dalam perjalanan di laut. Mereka baru pulang dari menyerahkan upeti ke Ternate. Ketika berada di laut Buru datanglah badai dan gelombang. Kora-kora Passo nyaris tenggelam. Semua muatan dan bahan makanan dibuang ke laut, agar perahu lebih enteng untuk menembus gelombang. Namun laut belum mau berdamai, orang-orang Passo berteriak minta tolong. Pada saat yang kritis itu perahu (kora-kora) Batumerah datang menolong. Semua awak perahu Passo dinaikkan ke perahu Batumerah. Mereka lalu mendayung menuju pantai di suatu tanjung di pulau Buru. Di pantai itu semuanya duduk bersama-sama di pasir putih, untuk mengganjal perut dengan sisa makanan yang masih ada pada orang Batumerah. "Mari katong (kita) makan bersama, walau makanan tinggal sedikit, sagu salempeng dipatah dua, ikan julung dibagi dua, kelapa sebuah dibelah dua". Dialog itu mengiringi makan yang penuh linangan air mata karena sukacita, selamat dari badai yang menerpa. Selesai makan mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk membuat suatu ikrar mengangkat sumpah, menjalin persaudaraan dengan membalik batu karang besar yang berada di tanjung itu. Tetesan darah yang mengalir dari jari-jari mereka karena tajamnya batu karang ditampung dan disatukan. Di atas kesatuan darah itu mereka bersumpah dan berikrar "orang-orang Passo mengangkat orang Batumerah sebagai pela kakak dan sebaliknya orang Batumerah mengangkat orang Passo sebagai pela adik. Persaudaraan ini harus tetap dijaga sampai kiamat atau sampai akhir zaman. Dalam upacara simbolik yang sakral mereka bersumpah, *"barang siapa yang*

sengaja membalik batu ini, batu akan menindihnya;” dalam bahasa adatnya berbunyi *Sei Hale Hatulo Hatu Hele Hei*. Dengan teriakan yang histeris, seakan ikrar itu harus didengar oleh alam dan para leluhur, hubungan persaudaraan itu dikukuhkan. Tempat bersejarah bagi kedua desa (negeri) itu berdiri sebuah desa yang sampai kini disebut *Desa Pela* atau *Tanjung Pela*. (Awat T. dan Latief Hatala, 1999). Di sela-sela peristiwa kerusuhan yang melanda Ambon, ternyata orang Passo dapat menyelamatkan orang Batumerah dan sebaliknya orang Batumerah dapat menyelamatkan orang Passo. Kedua desa yang berpela itu Passo beragama Kristiani sedang Batumerah adalah Muslim.

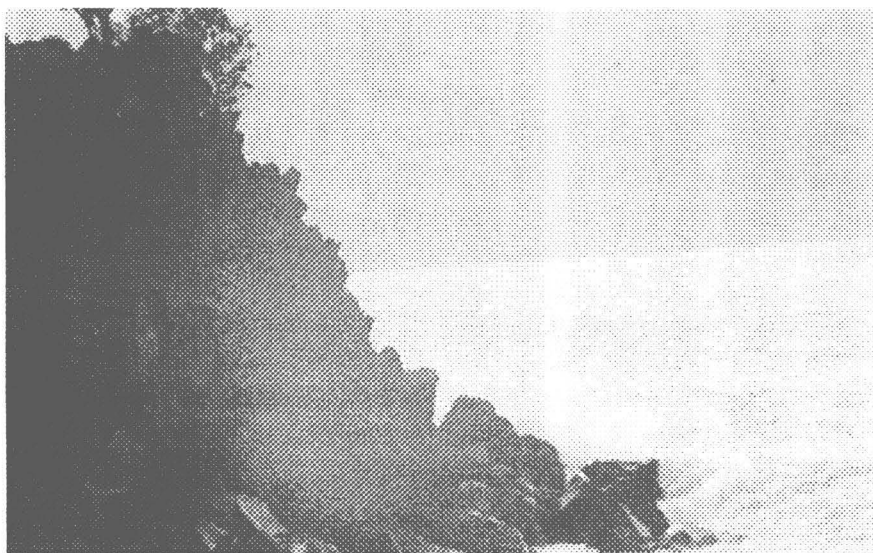


Foto 45. Tanjung Pela di Buru Utara

Negeri Laha dan Negeri Amahusu mempunyai hubungan pela basudara atau pela gandong sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika terjadi kerusuhan Ambon pada awal tahun 1999, warga Amahusu yang dipimpin Bapa Rajanya datang ke negeri Laha. Mereka mengadakan dialog, bermusyawarah dan bermufakat untuk saling menjaga dan melindungi warga

mereka anggota segandong. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan tentang hubungan persaudaraan mereka yang dahulu diikrarkan oleh moyang-moyang (leluhur) mereka. Bahwa dahulu kedua warga negeri tersebut adalah bersaudara.

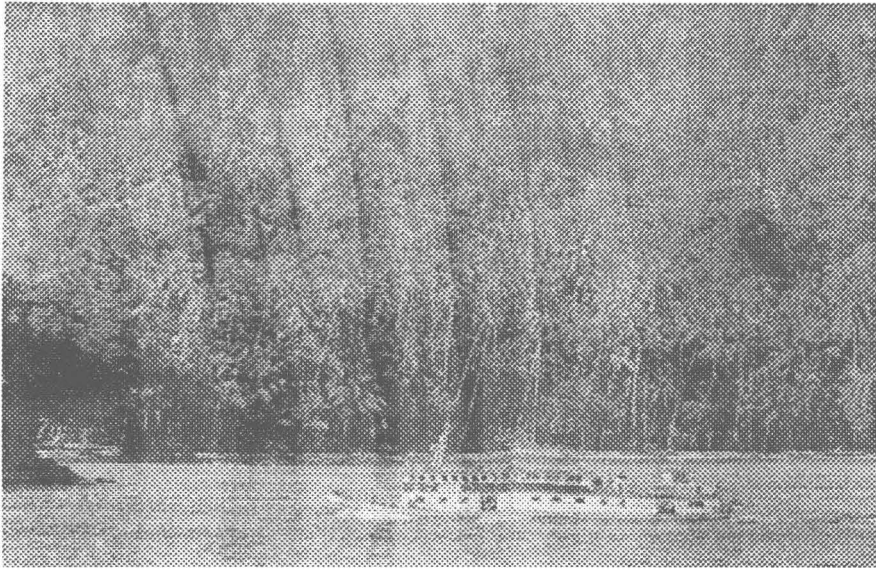


Foto 46 Perahu motor Amahusu yang mengunjungi negeri Laha

Mereka mendiami negeri Nusaniwel, sebuah negeri yang aman dan subur. Di sepanjang pantainya ditumbuhi pohon kelapa. Dalam bahasa daerah kelapa disebut *nyiwel*, *nyier*, *niwel*. Ketika terjadi perang antara Hitu dan Portugis, Portugis diusir ke jazirah Hitu selatan dan Leitimur. Orang Portugis yang marah, melampiaskan amarah mereka kepada rakyat Nusaniwel yang tidak mengerti persoalan Portugis dan Hitu. Negeri Nusaniwel diporak-porandakan sehingga rakyatnya lari kocar-kacir. Sebagian dari mereka yang lari itu tertangkap dan dijadikan budak Portugis. Selanjutnya para budak itu mengikuti/masuk agama tuannya. Mereka yang mengikuti Portugis itu mendiami Amahusu dan mereka yang lolos mendiami negeri Laha. Di kedua negeri itu sampai sekarang masih terdapat nama-

nama keluarga (clan atau fam) yang sama karena bersaudara. Misalnya: Hehuat, Mahulete, Laturua, dan sebagainya. Di negeri (desa) Laha terdapat banyak pohon sagu yang menjadi makanan pokok rakyat negeri Laha. Sedangkan di Amahusu masih banyak pohon kelapa yang ditanam seperti di aman (desa) yang lama. Keduanya dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan makanannya.



Foto 47 Pohon Sagu

4.3. Pela dan Gandong Dalam Kehidupan Beragama

Dimuka telah diungkapkan bahwa lembaga pela merupakan ikatan persaudaraan antara dua negeri yang berbeda agama. Yaitu negeri yang seluruh penduduknya bergama Kristen dan negeri yang seluruh

penduduknya beragama Islam. Dalam ajaran agama-agama di dunia ini ada dua hukum peribadatan paling utama yang perlu diperhatikan seorang umat manusia. Di dalam konsep Islam disebutkan tentang hubungan dengan Allah sang pencipta dan hubungan dengan sesama manusia harus dipelihara. Konsep itu disebut dengan *hablumminallah* dan *hablumminannaas*; bahwa seorang manusia muslim harus menjalin hubungannya dengan Allah secara benar dengan penyerahan diri secara total. Disamping itu ia harus membina hubungan dengan baik secara horizontal dengan sesama manusia. Hal itu merupakan kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Sementara itu dalam konsep agama Kristen dua hukum utama yang ada di dalam Bibel adalah; yang pertama seorang Kristiani harus mengasihi Tuhan Allah dengan sebulat-bulat hatinya dan dengan segenap jiwa dan akal budi. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. (Dr. Rahantoknan: 1999).

Seharusnya manusia bertolak dari dasar tersebut sehingga berbagai permasalahan antara umat manusia dapat diselesaikan dengan musyawarah. Terutama manusia Maluku yang pada beberapa waktu yang lalu larut dalam sentimen agama yang sangat dangkal. Apalagi hal itu ditambah dengan perbedaan kepentingan dan pemikiran yang sempit. Perbedaan agama atau pun pertentangan agama haruslah dilihat sebagai dua unsur yang berbeda. Perbedaan itu seharusnya tidak dilihat sebagai yang paling benar dan yang menang. Akan tetapi seyogianya menjadi dasar untuk suatu penelitian yang lebih mendalam. Hasil-hasil yang ditemukan dari penelitian bisa dijadikan instrumen dalam menjalin hubungan kemanusiaan yang harmonis.

Kesalahfahaman yang terjadi dalam masyarakat Maluku karena perbedaan kepentingan antara lain disebabkan oleh komunikasi budaya antara generasi tua dan generasi muda tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Institusi pela yang diagungkan para generasi tua dan yang dikagumi banyak orang di wilayah Indonesia yang lain ternyata tidak populer bahkan hampir tidak dikenal lagi oleh banyak generasi muda di Maluku Tengah. Demikian juga pranata hukum adat di negeri-negeri yang sudah terlupakan.

Dr. Rahantoknam mengungkapkan bahwa Pela di Ambon atau Taebet (teebe) di Kei dan Kidabela di Tanimbar hanya dipandang sebagai suatu

event atau peristiwa yang pernah terjadi. Mungkin saja diumpamakan sebagai sejarah PON I di zaman revolusi. Atau seperti sejarah terjadinya pela antara Batumerah dan Passo yang telah diungkapkan di muka. Makna dan hakekat dari pela dan gandong itu sendiri tidak diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga hampir terlupakan.

Banyak generasi muda yang mengabaikan nilai dan hakekat pela dan gandong itu. Hal ini disebabkan nilai dan hakekat pela dan gandong tersebut tidak tersosialisasikan secara baik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda di negeri-negeri yang berpela. Sementara pendidikan modern yang semakin meningkat dan berkwalitas mengenyampingkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Pendidikan agama pun memberi andil yang tidak sedikit dalam proses peminggiran nilai-nilai budaya tradisional yang dianggap lama dan usang. Padahal nilai budaya lama seperti pela dan gandong, dibangun atau dibentuk atas dasar moral untuk saling tolong menolong atau saling membantu. Lembaga adat yang dahulu dipandang sebagai media atau wadah pemersatu itu, dapat mengintegrasikan masyarakat Maluku melampaui batas-batas agama.

Berdasarkan uraian itu selanjutnya Rahantoknam menyebutkan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rangka rekonsiliasi masyarakat Maluku :

1. Belajarlah tentang adat istiadat dari dalam lembaga-lembaga kebudayaan yang sudah kita miliki. Di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai budaya yang luhur yang dapat menjadi pengendali bagi segala tingkah laku kita sehari-hari.

2. Dalamilah ajaran agama, agar nilai-nilai agama yang hakiki dapat diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sesama manusia pada umumnya.

Untuk dapat mengamati kenyataan pela gandong dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam maka orang tidak dapat berkesimpulan lain kecuali berpendapat bahwa pela gandong justru berintikan dan melibatkan Islam terutama Muslimin Maluku, khususnya di kepulauan Ambon dan Lease di satu pihak dan saudara-saudara pemeluk Kristiani di pihak lainnya.

Haji Daud Soleman sesepuh Maluku, dalam Sarasehan Kebudayaan

Maluku di Jakarta mengutarakan pela gandong telah tumbuh sebagai tradisi turun-temurun. Dan setiap tradisi telah lestari dan terkristalisasi sebagai pengalaman dan kearifan masyarakat. Memang tidak semua tradisi dapat terpelihara, namun nilai-nilai moral dan agama memerlukan proses membumi, indigeonisasi, melalui pelestarian tradisi adat tersebut.

Dewasa ini tampak adanya kerawanan dalam era perubahan. Perubahan yang dipengaruhi faktor-faktor ekstern dengan mengatasnamakan globalisasi dan mondialisme. Faktor-faktor tersebut telah masuk dan mencoba menyatu dalam kesadaran kita bahwasanya penempatan diri sebagai bangsa sejahtera dan terhormat mengharuskan penyesuaian diri, penyerasian nilai dan selera, tidak jarang kebablasan dalam peniruan gaya hidup. Banyak nilai yang tergusur tidak terkecuali yang luhur seperti pela gandong. Badai globalisasi membawa dampak positif dan negatif sehingga kita hampir kehilangan jati diri. Padahal apabila kita mau menoleh dan bernostalgia, menatap kembali permata-permata nilai budaya dan moral agama, terasa sejuk menenteramkan. Namun kini nilai pela dan gandong nampak tersisihkan bahkan semakin menjauh dari tatanan masyarakat kita, yang sedang berpacu dalam globalisasi sehingga nyaris kehilangan identitas dan jati diri. Lebih jauh Daud Soleman mensinyalir bahwa telah terjadi eskalasi dan akselerasi perubahan dalam mata rantai sebab akibat, yang aneh bin ajaib berpangkal pada ulah manusia sendiri, demi kemakmuran manusia sepihak. Terjadi perpisahan antara paradigma kemakmuran dari hal yang lebih hakiki yaitu paradigma kesejahteraan. Pela sebagai tautan persaudaraan Muslim-Kristiani seharusnya berjaln berkelindan dengan perkembangan moral agamis yang kian indah. Begitu juga di perkotaan dan pedesaan, supaya kampung dan dusun tidak dilanda serba permusuhan yang mengerikan.

Simpang siur persaingan dan kepentingan telah menggeser manusia dari situasi dan kondisi kolektif menjadi perorangan individu. Padahal dalam ajaran Islam telah ditancapkan sejarah secara jelas melalui firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an yang artinya :

“Sesungguhnya kami Tuhan telah menciptakan kamu dari sepasang tunggal pria dan wanita dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenali agar saling berinteraksi positif.

Sesungguhnya yang terbaik diantaramu adalah yang paling baik/murni taqwanya”. (Ar-Rum : 21 & 22)

Berdasarkan firman tersebut manusia dalam kolektifitas bersuku dan berbangsa merupakan kutub serba nilai di satu pihak berhadapan dengan kutub nilai manusia perorangan yang taqwa di pihak lain. Peran dan posisi agama yang dalam kehidupan modern kini menjadi sangat sentral harus lebih diberdayakan, sehingga kemanusiaannya tidak terperiferikan di pinggiran-pinggiran gagasan dan struktur institusi manusia itu sendiri. Yang paling utama adalah ibadah manusia perorangan dalam menyembah Tuhannya hingga tali hubungan antara insani itu dijalin erat dengan *Hablumminallah*, tali tautan vertikal dengan Tuhan dengan keterpaduan *Hablumminannaas* tali tautan horizontal sesama manusia.

Islam sangat mengutamakan keterpaduan manusia dalam hubungan horisontal dengan sesamanya, terjalin dengan hubungan vertikal dengan Penciptanya. Malah dalam situasi dan kondisi apapun janji Al-Qur'an dalam berbagai surat seperti suat Al-Imran :112 dan Al-Baqarah ayat 262, yang antara lain mengungkapkan bahwa :

“Akan tertimpa petaka di manapun mereka berada, kecuali bila bertaut dengan tali vertikal allah serta tali horisontal sesama manusia”.

Islam, sebagaimana agama pada umumnya, akan lestari nilai-nilainya yang sudah teruji dalam proses jarak membumi sehingga berpadu dalam kearifan bertradisi, seperti halnya pela gandong itu. Konfigurasi dan sistem nilai yang terkandung dalam pela gandong sesungguhnya brilyan, universal, dapat disosialisasikan ke luar Maluku. Oleh sebab itu tidak mustahil bahwa para leluhur, para upu ama atau datuk-moyang kita dari pihak Islam ternyata diinspirasi oleh suatu anjuran Al-Qur'an yang sakral yang antara lain terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

“Ulurkan tanganmu bergotong-royong dalam bakti dan takwa. Dan janganlah saling menolong dalam dosa dan permusuhan”.

Implementasi anjuran Qur'ani yang nyaris harfiah, dan letterlijk dalam bentuk pela gandong itu memerlukan renungan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap proaktif nyata dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai dan tradisi yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu Pendeta Alex Pattianakotta telah mengungkapkan bahwa berbagai dampak yang ditimbulkan kekisruhan sosial memberikan kesan yang kuat bahwa nilai-nilai tradisional yang diharapkan tetap lestari, termasuk lembaga pela dan gandong ternyata mengalami pergeseran nilai yang cukup serius. Sendi-sendi kekerabatan keluarga yang sangat fundamental yang kita jumpai dalam pranata atau lembaga pela ternyata hampir tak mampu memperlihatkan keunggulan kompetitifnya dalam paradigma kerukunan hidup antar umat beragama. Sangatlah bijaksana bila proses perubahan tata nilai yang berlangsung dicermati kembali, yang pada gilirannya mengantarkan kita secara arif dan bijaksana untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan yang lebih persuasif bagi semua pihak. Intervensi nilai-nilai baru yang secara meyakinkan menerobosi nilai-nilai tradisional memberikan gambaran yang kuat bahwa komitmen kultural kita terhadap nilai-nilai tradisional semakin longgar, kalau tidak dikatakan sebagai “sangat rapuh”. Padahal kontribusi nilai agama Kristen bagi lembaga pela dan gandong yang dianut dan diberlakukan oleh kebanyakan negeri (desa) di Maluku (khususnya Maluku Tengah) selalu bersifat terbuka dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Faktor agama malah bukan menjadi kendala dalam mewujudkan keinginan yang kuat untuk melestarikan nilai-nilai tradisional yang dimiliki. Memang, agama oleh kebanyakan orang dilihat sebagai wahana yang mengekspresikan komitmen spiritual. Sedangkan pada pihak lain, pranata pela dan gandong lebih banyak mengekspresikan komitmen moral dan komitmen kulturalnya. Namun haruslah diakui bahwa landasan spiritual yang kuat pasti dapat mengakomodir dengan baik komitmen moral dan komitmen kultural yang dimiliki. Landasan spiritual seharusnya mampu memberdayakan seluruh nilai kehidupan tanpa kecuali, termasuk pula komitmen moral dan komitmen kultural. Ada beberapa dasar pandangan Kristiani yang dapat dijadikan acuan berpijak dalam kerangka pikir kita untuk menyoroti perlakuan-perlakuan khusus tentang pranata pela dan gandong :

1. Yesus Kristus selama menjalankan misinya Ia selalu menempatkan dirinya dalam koridor tradisi dan adat istiadat Israeli dan nasaret yang kemudian dikemas dengan arif untuk memberikan pemberdayaan bagi manusia dalam rangka meningkatkan kualitas

hidupnya dari waktu ke waktu. Dimensi seperti ini pula seharusnya mampu mendorong institusi *pela* dan *gandong*, sehingga masyarakat dan bangsa kita selalu akan diberkati dan mengagungkan serta memuliakan Allah senantiasa. Hal itu seperti tertera dalam Injil Yohanes 2 : 6; 19 : 40.

2. Pada sisi yang lain, Yesus Kristus selalu mengajak para muridnya untuk memahami bahwa mengakselerasikan misi dalam konteks adat dan tradisi Israeli tidak lalu membuat seseorang kehilangan jati dirinya serta komitmen spiritualnya kepada Allah (Mark. 7 : 3-8). Ia harus mampu menatap diri dan mengadakan retrospeksi sehingga hidupnya selalu harus mengacu kepada firman Allah. Lembaga *pela* dan *gandong* sebagai wahana persemaian bertumbuhnya kekerabatan keluarga tidak boleh menjadi ajang pertarungan yang membuat seseorang terpisah dari Khaliknya.
3. Yesus Kristus selalu memberikan wawasan baru dalam membangun kasih dan persaudaraan di antara sesama saudara (Mat. 22 : 37-40). Landasan kasih menjadi tumpuan berpijak utama bagi terselenggaranya suasana persaudaraan yang lebih akomodatif. Tanpa kasih ikatan persaudaraan akan menjadi hambar dan tidak bermanfaat. Ikatan kekerabatan *pela* dan *gandong* akan semakin membuka diri untuk menerima orang lain apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak bersikap menganggap dirinya sendiri lebih baik dari orang lain. Malah sebaliknya ia terpenggil untuk menebarkan cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, yang mampu menjangkau banyak orang.

BAB V

PELA GANDONG DALAM KERANGKA BUDAYA NASIONAL INDONESIA

Pela gandong atau pela dan gandong adalah inti kebudayaan Maluku yang lahir dari gagasan-gagasan dan nilai-nilai budaya daerah itu. Pela gandong merupakan abstraksi dan pengalaman para pendukungnya yang selanjutnya telah menguasai sikap dan tingkah laku mereka. Sejak pertengahan Januari 1999 lembaga pela dan gandong tersebut mendapat sorotan dari berbagai arah. Karena lembaga tersebut adalah salah satu lembaga dan mozaik budaya yang berada di dalam bingkai “kebudayaan nasional”. Tragedi sosial yang berkepanjangan di Maluku nyaris menghancurkan jati diri masyarakat dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal jauh sebelum itu lembaga budaya pela dan gandong berfungsi sebagai kerangka acuan yang memberi makna dan arah bagi kehidupan sosial serta sebagai mekanisme pengendali dalam membina pergaulan sosial penduduk di Maluku terutama di Maluku Tengah. Hal itu telah pernah diwujudkan dalam kompetisi-kompetisi yang sehat misalnya dalam lomba dayung Arumbai (perahu hias) pada hari-hari bersejarah nasional seperti pada kesempatan peringatan hari Proklamasi 17 Agustus atau 28 Oktober hari Sumpah Pemuda.

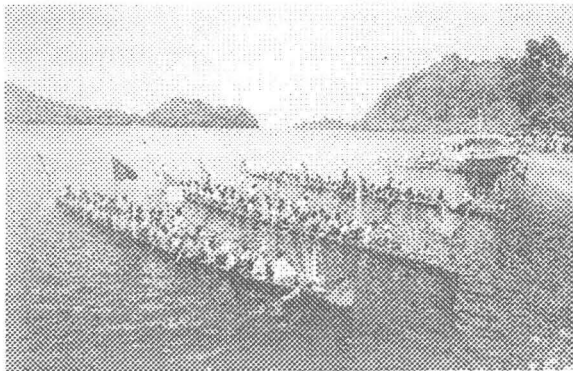


Foto 48 “Arombai Manggurebe”. Lomba dayung perahu hias antara berbagai negeri di Ambon dan Lease

Seyogianya *pela* dan *gandong* sebagai bagian dari kebudayaan nasional, mempunyai kekuatan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab kenyataan bahwa kebudayaan nasional mempunyai kekuatan-kekuatan pengendali. Di antaranya adalah :

1. dapat memberi makna dan arah kehidupan serta cita-cita bangsa
2. merupakan kerangka acuan bagi sikap dan tingkah laku sosial dalam pergaulan antar sesama warga negara
3. merupakan jati diri bangsa yang menumbuhkan rasa bangga dan mengikat segenap penduduknya. (Ditjenbud : 1996).

Sehubungan dengan pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional, sudah barang tentu *lembaga pela dan gandong* berada di dalam kontek kebijaksanaan itu. Hal itu tentu sejalan dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa *pela* dan *gandong* sebagai puncak kebudayaan daerah tentulah mempunyai nilai yang akomodatif terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Dalam usaha menuju ke arah kemajuan adat, budaya dan persatuan, *pela* dan *gandong* mampu menjadi indikator untuk tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, yaitu dalam rangka mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Melalui *lembaga pela* dan *gandong* kebudayaan maritim yang telah berkembang sejak dahulu di Maluku perlu dipelihara dan dikembangkan serta dilestarikan dalam rangka memanfaatkan kekayaan alam laut Maluku.

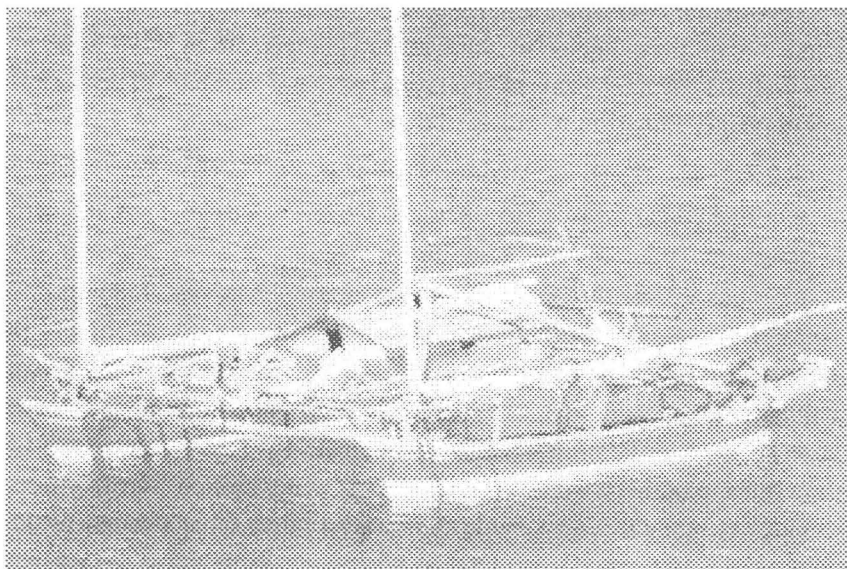


Foto 49 “Perahu Semang”, alat transportasi laut serta sebagai sarana perekonomian maritim

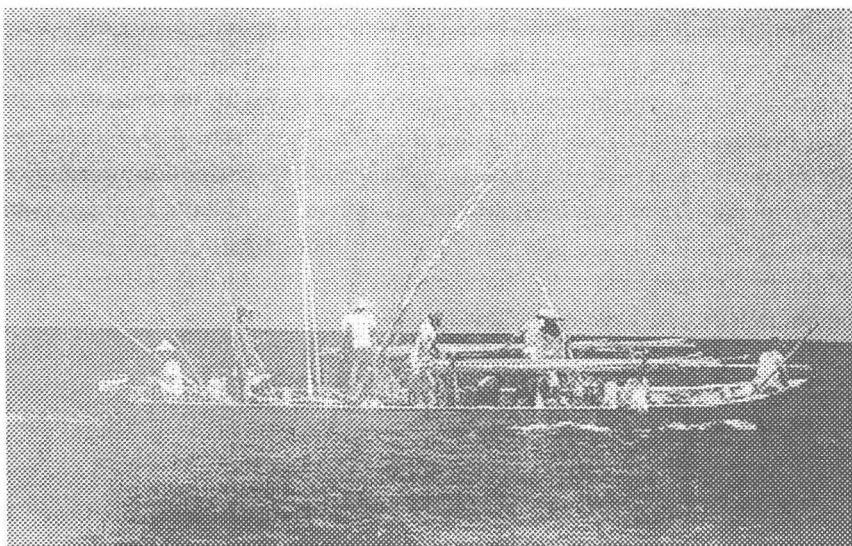


Foto 50 Perahu Nelayan sekarang yang sudah menggunakan motor tempel

Upaya memajukan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam itu diharapkan akan meningkatkan persatuan bangsa. Itu artinya bangsa Indonesia termasuk masyarakat Maluku sebagai pendukung budaya *pela* dan *gandong* harus bersikap terbuka tetapi selektif. Mampu mengadaptasi bahan-bahan baru yang masuk dari kebudayaan lain. Dengan demikian diharapkan kebudayaan asli *pela dan gandong* akan lebih berbobot dalam mempertinggi kebudayaan nasional.

Dewasa ini melalui sistem informasi yang mengglobal baik media cetak maupun elektronik terjadi akulturasi budaya yang sangat gencar. Begitu pula dalam pertemuan-pertemuan budaya antar suku maupun antar bangsa tanpa disadari terjadi proses saling mempengaruhi dan saling mengambil alih antara satu dengan yang lain. Anjungan Maluku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan terminal untuk memberi informasi tentang kebudayaan Maluku.

Sebaliknya anjungan tersebut juga merupakan terminal masuknya unsur-unsur budaya baru yang dapat memperkaya kebudayaan Maluku. Tentunya setelah terseleksi untuk dapat digunakan dan diserap. Proses saling mempengaruhi ini akan dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan yang bersangkutan. Namun di pihak lain bisa timbul kekuatiran akan terjadi pergeseran nilai, apabila proses adaptasi berjalan tanpa filter yang memadai.

Masuknya pengaruh kebudayaan asing dari berbagai arah terhadap kebudayaan materiil maupun non materiil perlu diwaspadai. Sebagai akibat perkembangan teknologi dan arus informasi serta keberhasilan pembangunan, kontak-kontak budaya tidak mungkin dihindari. Demikian gencarnya kontak tersebut sehingga seolah-olah kita tidak diberi kesempatan untuk memilih atau menolak mana yang cocok dan mana yang tidak.

Proses pembuatan tenunan tradisional Maluku Tenggara perlu dipelihara sebagai asset daerah yang dapat menjembatani kelompok-kelompok masyarakat.

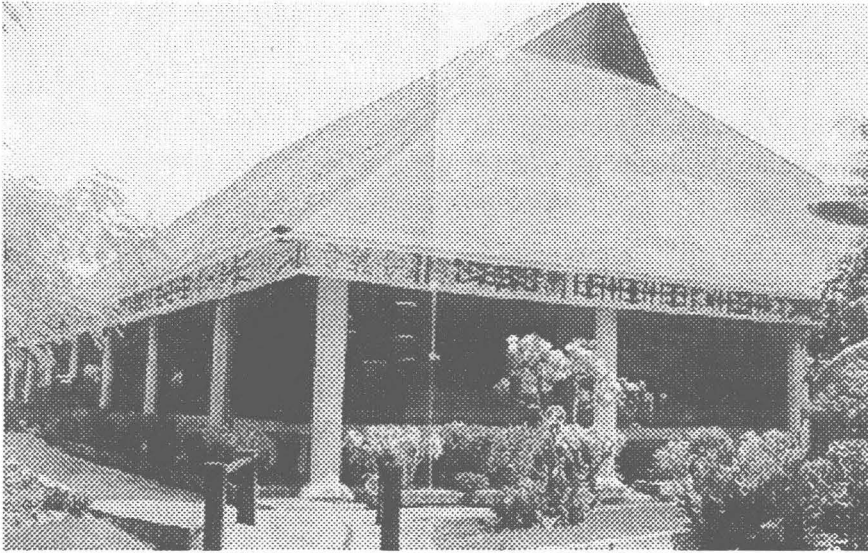


Foto 51 Anjungan Maluku di TMII, yang merupakan terminal informasi dan adaptasi

Selanjutnya kelompok-kelompok masyarakat tersebut diharapkan dapat membentuk suatu *masyarakat madani*. Yaitu suatu civil society yang telah populer sejak tahun 1980-an di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Suatu tataran di dalam masyarakat yang berada antara lingkup pemerintah (polity) dan lingkup masyarakat bawah yang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial. Dalam lingkup menengah itu masyarakat secara bersama-sama baik Muslim maupun Kristiani mengambil keputusan bersama untuk mengatur tata kehidupan yang lebih baik. Dalam lingkup menengah itu setiap pihak berhak menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya tanpa dihambat pihak lain. Dalam lingkup menengah itu perbedaan-perbedaan diakui, diterima bahkan dihormati. Dalam lingkup itu pula setiap pihak boleh membentuk organisasi-organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya dan menyuarakan hati nuraninya. Dengan kata lain masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dimana perbedaan kepentingan bisa diselesaikan bersama secara beradab pula. Dengan demikian lembaga pela dan gandong pun akan bermanfaat dan dapat dipelihara kelestariannya.

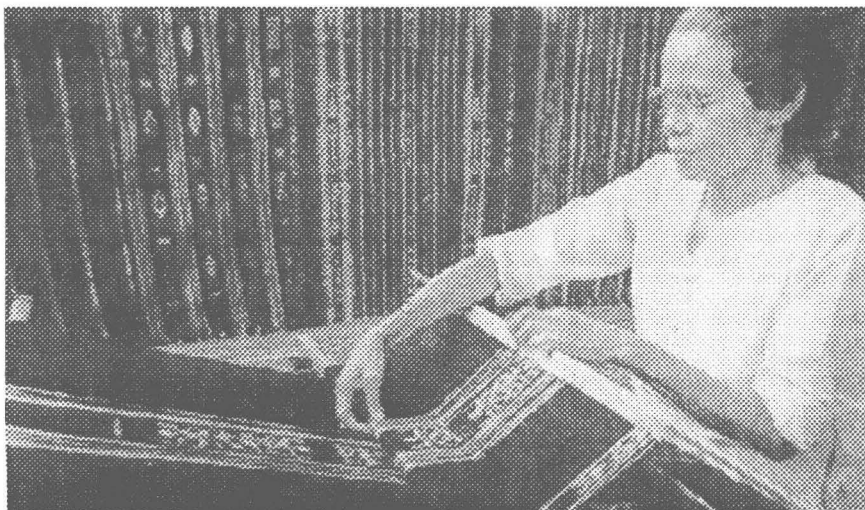


Foto 52 Penenunan kain tradisional Tanimbar

PENUTUP

Dari sejarah yang dipelajari secara ilmiah, ternyata memberi gambaran yang berbeda dari anggapan sementara orang yang menyatakan masyarakat Kristen dan Islam sejak beratus tahun hidup bersama. Harus diakui bahwa masyarakat Kristen dan Islam sejak berabad-abad yang lampau saling memisahkan diri satu sama lain tidak pernah hidup bersama. Negeri-negeri atau desa di Ambon Lease dan Seram masing-masing berdiri sendiri terlepas satu dengan yang lain. Masyarakat Kristen memisahkan diri di desa atau negeri sendiri dan demikian pula masyarakat Muslim mengelompok di desa yang lain. Hal itu karena di Maluku tidak ada suatu tatanan kekuasaan semacam *supra desa* atau suatu institusi semacam kerajaan yang menyatakannya seperti di Maluku Utara atau di Jawa. Di daerah-daerah tersebut justru masyarakat Kristen dan Islam hidup bersama dan berdampingan dalam suatu desa.

Namun demikian institusi-institusi seperti *pela* dan *gandong* justru adalah upaya untuk menyediakan forum agar masyarakat yang *segregatif* ini bisa bekerjasama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Harus diakui bahwa dalam kasus-kasus konflik yang makro seperti dewasa ini institusi *pela* dan *gandong* tak dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sangat luas dan variatif. Akan tetapi *pela* dan *gandong* bisa menyelesaikan konflik-konflik yang berskala mikro, yaitu antara dua desa yang berpela di Maluku Tengah.

Dari analisis ilmiah yang dilakukan para ahli sejarah, dapat dikatakan bahwa masyarakat Ambon di Maluku Tengah yang kita kenal sekarang ini terbentuk sejak pertengahan abad ke-17, yaitu sejak VOC dapat menguasai kepulauan itu dengan tujuan mengendalikan produksi rempah-rempah di Maluku secara keseluruhan dengan bentuk monopoli. Sejak itu disusun suatu sistem pemukiman penduduk yang diberi nama "negeri".

Para pemeluk Islam dipisahkan dari para pemeluk Kristen dan masing-masing harus berdiam di negeri-negeri sendiri dengan larangan berpindah tanpa alasan. Ini merupakan salah satu jalan untuk menaklukkan Ambon dan Lease yang berlangsung kurang lebih 50 tahun lamanya.

Sekalipun larangan berpindah kini tidak dipatuhi lagi dengan ketat, namun hingga kini setiap negeri dihuni oleh pemeluk agama yang sama. Di Ambon-Lease tidak ada negeri yang penduduknya terdiri dari orang Kristen dan orang Islam. Hanya penduduk kota Ambon saja yang merupakan perkecualian dimana ada orang Islam maupun orang Kristen dan juga pemeluk agama lainnya.

Karena perlawanan yang demikian lama (sekitar 50 tahun) yang diberikan para pemeluk Islam terhadap VOC, maka di kalangan negeri-negeri Islam sangat jarang muncul keinginan untuk berinteraksi dengan pihak Belanda, kecuali dalam soal penanaman dan penjualan cengkeh yang memang diwajibkan kepada mereka (dan orang Kristen).

Sebab itu ketika VOC mulai membangun sekolah-sekolah di setiap negeri sejak abad ke-17, masyarakat Islam menolak adanya sekolah-sekolah itu di negeri-negeri mereka. Lagi pula sistem pendidikan itu merupakan bagian integral dari pemeliharaan agama Kristen yang mulai dimasukkan secara gencar ketika itu pula. Demikian besar penolakan umat Islam itu sehingga, ketika sistem pendidikan itu diubah menjadi sistem pendidikan yang netral (sekuler), golongan Islam tetap menolak memanfaatkannya.

Sebab itu pula tidak mengherankan bahwa sejak awal abad ke-20 banyak orang Kristen yang dapat meneruskan pendidikan tinggi dan menjadi dokter, insinyur, ahli hukum dan lainnya. Dalam masa kolonial itu hanya ada seorang pemuda negeri Islam yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Leiden, negeri Belanda, yaitu Abdul Sukur, putra Raja Hitu yang sayangnya meninggal pada usia muda.

Orang-orang Kristen dapat memanfaatkan pendidikan Belanda maka banyak pemuda dari negeri-negeri Kristen dapat memasuki bidang-bidang pekerjaan yang disediakan oleh sistem kolonial. Bahkan jarang pemuda-pemuda dari negeri-negeri Islam menjadi tentara ketika tentara kolonial (KNIL) terbentuk tahun 1830.

Perbedaan dalam kesempatan kerja antara yang Islam dan yang Kristen itu bukan saja karena pilihan, yaitu bukan saja karena orang Islam yang memilih tidak memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dalam sistem kolonial itu. Melainkan jarang terjadi di kalangan pemuda-pemuda

Islam, sebab selain enggan memasuki pendidikan barat, politik kolonial sejak abad ke-17 juga memperkuat perbedaan antara Islam dan Kristen. Politik kependudukan kolonial ketika itu adalah “integrasi dan segregasi”. Orang Kristen diintegrasikan dalam sistem kolonial, dan orang Islam sengaja disegregasikan dari sistem kolonial.

Politik kolonial tersebut di atas memang didasarkan pada prasangka buruk bahwa masyarakat Islam merupakan ancaman bagi kelangsungan kolonialisme. Hal itu didasari pertimbangan-pertimbangan praktis. Sebagai contoh soal Pemberontakan Sepoi di India pada pertengahan abad ke-19 merupakan suatu isarat bagi Belanda betapa besarnya resiko menerima para pemuda Islam dalam tentara KNIL. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa pemberontakan itu meletus ketika tentara Sepoi di India itu mengetahui bahwa minyak yang digunakan untuk membersihkan senjata, dibuat dari lemak babi.

Maka dapatlah disimpulkan, bahwa secara obyektif masyarakat Ambon-Lease sebagai produk dari sistem kolonial itu adalah masyarakat yang pincang, dimana ketidakadilan merupakan salah satu cirinya yang penting. Namun kenyataan itu baru disadari sejak awal abad ke-20. Maka ketika *Indische Partij* dari Douwes Dekker didirikan pada tahun 1917, bibit-bibit nasionalisme pertama-tama itu mendapat tempat di negeri-negeri Islam. Demikian juga Sarekat Ambon yang didirikan tahun 1923. Di Ambon, Haruku dan Saparua maupun di negeri-negeri pesisir selatan Seram, bermunculan perkumpulan-perkumpulan *Indische Partij* di negeri-negeri Islam. Hal ini baru terungkap ketika dokumen-dokumen Belanda dari abad ke-20 dipelajari dan diterbitkan di negeri Belanda. Itulah sebabnya ketika Alexander Jacob Patty mempropagandakan Sarekat Ambon di Ambon, maka respons yang positif datangnya dari negeri-negeri Islam dibandingkan dengan di negeri-negeri Kristen. Wadah ini yang dimaksud sebagai tali pengikat antara Islam dan Kristen pada waktu itu tidak bisa mengambil langkah-langkah untuk membangun kerjasama antara kedua pemeluk agama yang berbeda itu. Hal itu disebabkan karena pemerintah kolonial selalu berupaya menghalang-halangi adanya kerjasama antara kedua pemeluk agama tersebut.

persatuan antara masyarakat Maluku tengah merupakan mitos asal-usul yang dimasukkan dalam hampir semua upacara panas pela di Maluku Tengah.

Nunusaku yang berada di pulau Seram itu juga menjadi inspirasi bagi persatuan antara penduduk Maluku Tengah. Di pulau itu terdapat susunan masyarakat yang terbagi dalam dua bagian yang menyatu. Kedua bagian itu adalah Patasiwa dan Patalima. Lima sesungguhnya adalah empat bagian dimana satu menjadi primus interparis, seperti halnya Empat Perdana dan Raja Hitu. Siwa atau sembilan adalah lima ditambah empat, jadi sesungguhnya terdiri dari konfigurasi yang sama pula.

Pengertian persatuan dalam konfigurasi itu akan lebih jelas bila diingat bahwa sering pula unsur sembilan dilambangkan dengan perempuan (ina) dan unsur lima dilambangkan dengan pria (ama). Wanita dan pria tidak bisa hidup terpisah karena tidak mungkin ada masyarakat kalau keduanya terpisah. Dengan demikian unsur-unsur yang berbeda itu (wanita dan pria) hanya bisa bertahan bila bersatu.

Dalam masa kini ketika timbul kebutuhan untuk menciptakan simbol-simbol persatuan demi integrasi masyarakat, maka konfigurasi yang umum tersebar di seluruh Maluku itu menjadi inspirasi. Dengan demikian terwujudlah semboyan *Siwa Lima* yang menjadi kebanggaan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku sekarang. Seolah-olah hendak dikemukakan bahwa seluruh Maluku adalah satu. Semboyan *Siwa Lima* yang digali dari sejarah budaya Maluku itu, merupakan perwujudan *bhineka tunggal ika* dalam konteks Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

Andili Bahar A., "Profil Daerah Maluku Utara", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra* 1979 *Indonesia*, Jilid 8, No.1.

Bartels Dieter, *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncritism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Disertasi Cornell university.

Budi Santoso, Profil Daerah Maluku.

Burger Dh & Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jakarta: PN. Pradja Paramita.

Chauvel Richad, *Bukan Revolusi tapi Kontra Revolusi, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Audri Kahin, Grafitti, Jakarta.

Christie Jan Wisseman, "State Formation in Early Maritime Southeast Asia. A Consideration of the theories and data", *Bijdragen*, Jilid 151, No.2

Deacon A.B., "The Kakihan Society of Ceram and New Guinea Initiation Cults", *Folklore*, No.36.

Depdikbud, Sejarah Daerah Maluku, Ditjenbud, Jakarta.

Depdikbud, Geografi Budaya Daerah Maluku, P3KD, Jakarta.

Depdikbud, Sejarah Sosial Daerah Maluku, Proyek IDSN, Jakarta.

Depdikbud, Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Propinsi Maluku, P3KD, Jakarta.

Ditjenbud, Pokok-Pokok Kebijakan Kebudayaan Nasional, PMK, Jakarta.

Duyvendak J., *Het Kakehan-Genootschap van Seram*, Amelo: W. Hilarius.

Ekris A. van, "Het Ceramsche Kakianverbond", *Mededelingen vanwege het Nederlandsche Zendingelingengenootschap*, No.9.

persatuan antara masyarakat Maluku tengah merupakan mitos asal-usul yang dimasukkan dalam hampir semua upacara panas pela di Maluku Tengah.

Nunusaku yang berada di pulau Seram itu juga menjadi inspirasi bagi persatuan antara penduduk Maluku Tengah. Di pulau itu terdapat susunan masyarakat yang terbagi dalam dua bagian yang menyatu. Kedua bagian itu adalah Patasiwa dan Patalima. Lima sesungguhnya adalah empat bagian dimana satu menjadi primus interparis, seperti halnya Empat Perdana dan Raja Hitu. Siwa atau sembilan adalah lima ditambah empat, jadi sesungguhnya terdiri dari konfigurasi yang sama pula.

Pengertian persatuan dalam konfigurasi itu akan lebih jelas bila diingat bahwa sering pula unsur sembilan dilambangkan dengan perempuan (ina) dan unsur lima dilambangkan dengan pria (ama). Wanita dan pria tidak bisa hidup terpisah karena tidak mungkin ada masyarakat kalau keduanya terpisah. Dengan demikian unsur-unsur yang berbeda itu (wanita dan pria) hanya bisa bertahan bila bersatu.

Dalam masa kini ketika timbul kebutuhan untuk menciptakan simbol-simbol persatuan demi integrasi masyarakat, maka konfigurasi yang umum tersebar di seluruh Maluku itu menjadi inspirasi. Dengan demikian terwujudlah semboyan *Siwa Lima* yang menjadi kebanggaan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku sekarang. Seolah-olah hendak dikemukakan bahwa seluruh Maluku adalah satu. Semboyan *Siwa Lima* yang digali dari sejarah budaya Maluku itu, merupakan perwujudan *bhineka tunggal ika* dalam konteks Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

Andili Bahar A., "Profil Daerah Maluku Utara", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra* 1979 Indonesia, Jilid 8, No.1.

Bartels Dieter, *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Disertasi Cornell university.

Budi Santoso, Profil Daerah Maluku.

Burger Dh & Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jakarta: PN. Pradja Paramita.

Chauvel Richad, *Bukan Revolusi tapi Kontra Revolusi, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Audri Kahin, Grafitti, Jakarta.

Christie Jan Wisseman, "State Formation in Early Maratime Southeast Asia. A Consideration of the theories and data", *Bijdragen*, Jilid 151, No.2

Deacon A.B., "The Kakihan Society of Ceram and New Guinea Initiation Cults", *Folklore*, No.36.

Depdikbud, Sejarah Daerah Maluku, Ditjenbud, Jakarta.

Depdikbud, Geografi Budaya Daerah Maluku, P3KD, Jakarta.

Depdikbud, Sejarah Sosial Daerah Maluku, Proyek IDSN, Jakarta.

Depdikbud, Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Propinsi Maluku, P3KD, Jakarta.

Ditjenbud, Pokok-Pokok Kebijakan Kebudayaan Nasional, PMK, Jakarta.

Duyvendak J., *Het Kakehan-Genootschap van Seram*, Amelo: W. Hilarius.

Ekris A. van, "Het Ceramsche Kakianverbond", *Mededelingen vanwege het Nederlandsche Zendingelingengenootschap*, No.9.

- Fraassen Ch. F. van *Ambon Rapport*. Thesis M.A. Leiden
- Hanna Willard A., *Kepulauan Banda. Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Leirissa R.Z., *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Leirissa R.Z., *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta.
- Leirissa R.Z., *Maluku Dalam Perjuangan Nasional*, FSUI, Jakarta.
- Leirissa R.Z., *Sejarah Kebudayaan Maluku*, Depdikbud, Jakarta.
- Leirissa R.Z., *Maluku Tengah di Masa Lampau*.
- Leirissa R.Z., *Pela-Gandong dan Masyarakat Madani di Ambon Lease*.
- Lestaluhu, M.R.L., *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Ohorella M.G., "Membangun Kembali dan Melestarikan Hukum Adat Tentang Pemerintahan Negeri di Daerah Maluku Tengah (Kotamadya Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Pulau Buru) Menyongsong Pemberlakuan Otonomi Daerah Tahun 2001".
- Reid Antony, *Asia Tenggara dalam Masa Perdagangan Emporium dan Imperium*, Volume Satu: Negeri di bawah Angin.
- Sachse, F.J.P., *Seran*. Mededeelingen van het Burueau voor de bestuurszaken der buitengewesten bewerkt door het Encyclopaedisch Burueau, Aflevering 29, Weltevreden: G. Kolff.
- Stresemann E., *Die Lauterscheinungen in den Amboinischen Sprachen*, *Zeitschrift für eingeborenen-sprachen*, Supplement, 10, Berlin.
- Tamaela John, *Asal Usul Pela Dan Kebudayaan Asli Daerah Maluku*, Makalah Sarasehan Kebudayaan Maluku, LKM, Jakarta.
- Tauren, O.D., *Patasiwa und Patalima: Vom Molukkeneiland Seran und seinen Bewohnern*. Leipzzig: Voigtlander.
- Taylor dan Aragon, *Beyond the Java Sea*.

